



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BANJAR**

2026



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

**DINAS
PENDIDIKAN
KABUPATEN
BANJAR**

Jl. Sekumpul Ujung Desa
Bincau No.3 RT.05 RW.03
Telp. (0511) 6749084
Martapura 70651
Website :
disdik.banjarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini dapat disusun secara tepat waktu, akurat, dan berbasis data. Laporan ini merupakan manifestasi komitmen institusi terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan selama periode triwulan berjalan.

Laporan ini menyajikan capaian indikator kinerja utama secara terukur dan objektif, disertai analisis kritis terhadap tingkat pencapaian, kesenjangan yang terjadi, serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja. Selain itu, dirumuskan pula langkah-langkah strategis dan tindak lanjut yang terarah guna memperkuat efektivitas, efisiensi, serta kualitas implementasi program pendidikan di Kabupaten Banjar.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, serta para pemangku kepentingan yang telah menunjukkan dedikasi, sinergi, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program serta penyusunan laporan ini. Kolaborasi yang solid menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan.

Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja, dasar pengambilan kebijakan, serta acuan dalam perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan di Kabupaten Banjar.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, April 2026



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar

Hj. Liana Penny, ST.,MS
Pembina Tk. I
NIP. 198007122005012013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Maksud dan Tujuan.....	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Isu Strategis	4
BAB II	5
PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Indikator Kinerja Utama	5
B. Perjanjian Kinerja.....	7
BAB III	26
AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran.....	202
BAB IV	215
PENUTUP.....	215
LAMPIRAN	217

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menyajikan informasi yang akurat, mutakhir, dan terukur mengenai perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagai dasar pemantauan kinerja.;
- b. Menyajikan data perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara rinci, transparan, dan akuntabel guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan;
- c. Mengidentifikasi secara sistematis kendala, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi kinerja;
- d. Merumuskan alternatif solusi yang strategis, aplikatif, dan berkelanjutan dalam rangka memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

- a. Laporan Kinerja disusun untuk menyajikan gambaran yang akurat, terukur, dan berbasis data mengenai tingkat pencapaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai instrumen utama pengendalian kinerja;
- b. Laporan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, yang selanjutnya menjadi dasar perumusan langkah perbaikan yang terarah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pada periode berikutnya;
- c. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja instansi pemerintah, sehingga memberikan akses informasi yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- d. Laporan Kinerja berfungsi sebagai landasan strategis dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun berikutnya, guna memastikan bahwa program yang dirancang lebih tepat sasaran, efektif, dan selaras dengan tujuan pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah seperti.

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sarana prasarana pendidikan dasar;
- b. Mengusulkan pemberian bantuan pada pendidikan dasar;
- c. Melaksanakan pemetaan akreditasi sekolah;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama, serta Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang pendidikan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang pendidikan;
- e. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas; dan,
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Dasar Hukum

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan di bidang pendidikan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar berlandaskan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 100.3.3 / 195 / DISDIK / 2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Perencanaan
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan; dan

3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- f. Bidang Sarana Prasarana terdiri dari:
 1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

E. Isu Strategis

Isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yaitu :

1. Kurangnya minat Masyarakat untuk menempuh jalur Pendidikan formal dan cenderung memilih jalur Pendidikan keagamaan
2. Masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS)
3. Masih terdapat wilayah dengan keterbatasan sarana dan prasarana Pendidikan terutama di daerah terpencil
4. Belum meratanya kompetensi dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan
5. Belum optimalnya kualitas hasil belajar siswa
6. Belum optimalnya kualitas kelembagaan satuan pendidik

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengukur secara objektif tingkat keberhasilan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberadaan indikator kinerja memberikan arah yang jelas sekaligus menjadi tolok ukur yang tegas dalam menilai apakah suatu program atau kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai hasil sesuai dengan perencanaan. Indikator kinerja yang dirumuskan secara tepat akan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan representatif dalam menggambarkan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Apabila didukung oleh sistem pengumpulan dan pengolahan data yang andal, indikator kinerja mampu menghasilkan pengukuran yang valid dan reliabel terhadap capaian kinerja, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Lebih dari sekadar alat pelaporan, indikator kinerja merupakan komponen krusial dalam proses perencanaan kinerja. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja sejak tahap perencanaan. Hal ini bertujuan agar setiap rencana yang disusun telah dilengkapi dengan alat ukur yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilannya.

Dengan penetapan indikator kinerja yang terstruktur sejak awal, kualitas perencanaan akan meningkat secara signifikan, karena mampu menghindari penetapan sasaran yang abstrak, sulit diukur, dan tidak dapat diverifikasi secara objektif. Dengan demikian, indikator kinerja berperan penting dalam memastikan bahwa setiap target yang ditetapkan bersifat terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mengampu urusan Pendidikan. Berdasar urusan dan program yang diampu Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mendukung pencapaian 5 (lima) misi Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu

Misi ke-1 : *Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas*

Tabel 1.1

Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
1	2	3	4
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	89,47%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	96,92%

		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	65,23%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	86,77%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	100%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	100%
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	64,02%
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	92,37%
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	74,73%
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	83,76
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,50

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen strategis yang memuat komitmen kinerja antara pemberi dan penerima amanah untuk mencapai target kinerja yang terukur, dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki instansi. Dokumen ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen utama dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai dasar yang objektif dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sekaligus sebagai tolok ukur evaluasi kinerja serta landasan penerapan mekanisme penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) secara adil dan terukur.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran langsung dari sasaran strategis dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dioperasionalkan melalui pelaksanaan kegiatan tahunan oleh instansi pemerintah. Di dalamnya termuat target capaian kinerja tahunan yang spesifik, terukur, dan terstruktur untuk seluruh indikator kinerja pada مستوى sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan secara terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran, sehingga memastikan adanya keselarasan antara target kinerja dan dukungan sumber daya. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja menjadi instrumen pengendalian yang menegaskan target yang harus dicapai oleh instansi dalam satu tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2026 merupakan penjabaran operasional dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, sehingga memiliki kesinambungan yang kuat antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan kinerja tahunan.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	(Jumlah anak usia 5-6 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 5-6 tahun) X 100%	89,47	Persen	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Rp. 505.615.398.638 2. Rp. 159.063.578.447	Kepala Dinas
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	(Jumlah anak usia 7-15 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun) X 100%	96,92	Persen			
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	(Jumlah anak usia 7-18 tahun yang bersekolah / Jumlah penduduk usia 7-18 tahun) X 100%	65,23	Persen			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	(Jumlah Siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini) X 100%	86,77	Persen			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	(Jumlah Siswa pada Jenjang Sekolah Dasar / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Sekolah Dasar) X 100%	100	Persen	3. Program Pengembangan Kurikulum	3. Rp. 204.527.000	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	(Jumlah Siswa pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama) X 100%	100	Persen			
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini) x 100%	64,02	Persen			
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar) x 100%	92,37	Persen			
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	(Jumlah Siswa Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama / Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama) x 100%	74,73	Persen			

2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	$\frac{\text{Jumlah Pencapaian Indikator yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Total Indikator yang Ditetapkan}} \times 100\%$	83,76	Indeks			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Komponen penilaian: 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 20% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25% Dari masing-masing komponen penilaian terdapat subkomponen dengan bobot penilaian: 1) Sub-komponen keberadaan 20% 2) Sub-komponen kualitas 30% 3) Sub-komponen pemanfaatan 50%	79,50	Nilai			Kepala Dinas
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	$\sum (\text{Unsur Kepatuhan} \times 50\%) + (\text{Unsur Pelayanan Publik} \times 50\%)$	93,50	Persen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 505.615.398.638	Sekretaris
5	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen yang Tersusun	100	Persen	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 62.651.700	Kasubbag Perencanaan
6	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen SPIP	100	Persen			
7	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	$\frac{(\text{Jumlah Laporan yang Berhasil Disusun})}{(\text{Jumlah Total Laporan yang Harus Disusun})} \times 100\%$	100	Persen	Administrasi Keuangan	Rp. 498.512.958.918	Kasubbag

	Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan					Perangkat Daerah		Keuangan
8	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	$(\text{Jumlah Laporan yang Berhasil Disusun}) / (\text{Jumlah Total Laporan yang Harus Disusun}) \times 100\%$	100	Persen			
9	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	$(\text{Jumlah Laporan yang Berhasil Disusun}) / (\text{Jumlah Total Laporan yang Harus Disusun}) \times 100\%$	100	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 311.530.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	$(\text{Jumlah Laporan yang Berhasil Disusun}) / (\text{Jumlah Total Laporan yang Harus Disusun}) \times 100\%$	100	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.813.251.700	
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	$((\text{Banyaknya Jenis Layanan yang telah Diberikan}) / (\text{Jumlah Total Layanan Yang Harus Diberikan})) \times 100\%$	100	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Rp. 3.405.129.920	
12	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan	$(\text{Jumlah Laporan Pengadaan BMD yang Berhasil Disusun}) / (\text{Jumlah Total Pengadaan BMD}) \times 100\%$	100	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Rp. 463.029.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

13	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	$(\frac{\text{Total Jumlah Pemeliharaan BMD yang Dianggarkan}}{\text{Total Realisasi Pemeliharaan BMD}}) \times 100\%$	100	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Rp. 1.046.847.400	
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah(ATS)- Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	$(\frac{\text{Jumlah ATS Tahun 2024} - \text{Jumlah ATS Tahun } N}{\text{Jumlah ATS Pada Tahun 2024}}) \times 100\%$	3,31	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	1. Rp. 17.678.292.800 2. Rp. 19.000.000	Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
15	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Indeks Pemerataan Guru (IPG) $IPG = 1 - (\sum G_i - G_i \text{ rata-rata} / 2N)$ Dimana: • G_i = Jumlah guru di wilayah i • $G_i \text{ rata-rata}$ = Jumlah guru rata-rata per wilayah • N = Jumlah wilayah	0,52	Indeks			
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik	$(\frac{\text{Jumlah PTK Bersertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Total PTK Formal}}) \times 100\%$	43,97	Persen			

16	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah Sekolah}} \times 100\%$	74,89	Persen	3. Pengelola an Pendidika n Nonformal /Kesetaraa n	3. Rp. 20.155.890.300 4. Rp. 134.358.000	
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terakreditasi minimal B	$\frac{\text{Jumlah SP Akreditasi A} + \text{Jumlah SP Akreditasi B}}{\text{(Total SP)}} \times 100\%$	85,71	Persen			
17	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	$\frac{\text{Jumlah SP yang Mengimplementasi IKM \& Mulok}}{\text{Jumlah Total SP}} \times 100\%$	100	Persen	4. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidika n Anak Usia Dini dan Pendidika n Nonformal		Kabid Pembina an Pendidika n Anak Usia Dini dan Pendidika n Non Formal/Kesetaraa n
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	$\frac{\text{Jumlah PNF/K yang Mengimplementasi IKM \& Mulok}}{\text{Jumlah Total PNF/K}} \times 100\%$	100	Persen			
18	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	$\frac{\text{Jumlah PAUD dengan laporan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Total PAUD}}$	100	Persen	1. Pengelola an Pendidika n Anak Usia Dini (PAUD)	1. Rp. 9.932.458.000	Kasi Pendidika n Anak Usia Dini
19	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{(\text{Jumlah Anak Tidak Mampu yang Bersekolah di SD})}{(\text{Jumlah Seluruh Anak Tidak Mampu Usia SD})} \times 100\%$	20,39	Persen	2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidika n Anak Usia Dini	2. Rp. 25.022.000	

20	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Keamanan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	72,93	Nilai	dan Pendidikan Nonformal		
		Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Nilai Total Kebhinekaan dan Inklusivitas Literasi Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	69,70	Nilai			
21	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	Σ (Kurikulum muatan lokal yang telah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan memenuhi kriteria kesesuaian)	1	Kurikulum			
22	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah PNF/K dengan laporan administrasi dan keuangan}}{\text{Jumlah Total PNF/K}}$	100	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	1. Rp. 20.003.680.000	Kasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
23	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	$\left(\frac{\text{Jumlah Anak Tidak Mampu yang Bersekolah di PNF/K}}{\text{Jumlah Seluruh Anak Tidak Mampu Usia PNF/K}} \right) \times 100\%$	7,22	Persen	2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2. Rp. 109.336.000	
24	Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jlh masy. yang mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah total masy. sasaran pendidikan kesetaraan}} \times 100\%$	65,23	Persen			

	Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	Σ (Pondok Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan)	10	Satuan Pendidikan			
25	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Keamanan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	74,42	Nilai			Kasi Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Kebhinekaan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	63,5	Nilai			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Inklusivitas Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	62,42	Nilai			
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Keamanan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	69,48	Nilai			
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Kebhinekaan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	67,27	Nilai			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Inklusivitas Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	60,03	Nilai			
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Keamanan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	69,77	Nilai			
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Kebhinekaan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	69,17	Nilai			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Inklusivitas Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	60,53	Nilai			

26	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya	(Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang mengalami peningkatan kompetensi / Jumlah total pendidik dan tenaga kependidikan) x 100%	42,25	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1. Rp. 7.745.834.800	Kasi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
27	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya	(Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PNF/ K yang mengalami peningkatan kompetensi / Jumlah total pendidik dan tenaga kependidikan) x 100%	100	Persen	2. Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan 3. Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2. Rp. 152.210.300 3. Rp. 19.000.000	Kasi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
28	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal S1/D4	$\frac{\text{Jumlah PTK PAUD dengan ijazah} \geq \text{S1/D4}}{\text{Total PTK PAUD}} \times 100\%$	72,80	Persen			Kasi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
29	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Jumlah Kepsek Aktual}}{\text{Jumlah Kepsek Ideal}} \times 100\%$	1:1	Rasio			
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{\text{Jumlah Pengawas Aktual}}{\text{Jumlah Pengawas Ideal}} \times 100\%$	1:14,03	Rasio			

						n		
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Sekolah Dasar	$\left(\frac{\text{Jumlah ATS Tahun 2024}-\text{Jumlah ATS Tahun N}}{\text{Jumlah ATS Pada Tahun 2024}}\right) \times 100\%$	14,22	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.Rp. 45.521.597.200	Kabid Pembinaan SD
31	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	$\left(\frac{\text{Jumlah SP Akreditasi A} + \text{Jumlah SP Akreditasi B}}{\text{Total SP}}\right) \times 100\%$	80,70	Persen			
32	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Kemampuan Literasi Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	66,68	Nilai			
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Kemampuan Numerasi Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	59,83	Nilai			
		Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Karakter Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	61,46	Nilai			
33	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	$\frac{\text{Jumlah SD yang Mengimplementasi IKM \& Mulok}}{\text{Jumlah Total SD}} \times 100\%$	100	Persen	2.Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	2.Rp.18.822.000	
34	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik	$\left(\frac{\text{Jumlah PTK Bersertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Total PTK Formal}}\right) \times 100\%$	67,54	Persen			
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	<p>Indeks Pemerataan Guru (IPG)</p> $IPG = 1 - \left(\frac{\sum G_i - G_i \text{ rata-rata} }{2N}\right)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • G_i = Jumlah guru di wilayah i • $G_i \text{ rata-rata}$ = Jumlah guru rata-rata per wilayah • N = Jumlah wilayah 	0,62	Indeks			
35	Meningkatnya Tata Kelola dan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah	$\frac{\text{Jumlah SD dengan laporan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Total SD}}$	100	Persen	Pengelolaan Pendidikan		Kasi Kurikulu

	Manajemen Satuan Pendidikan	Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan				Sekolah Dasar (SD)		m dan Penilaian SD
36	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Keamanan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	78,69	Nilai		Rp. 40.382.887.600	
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Kebhinekaan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	73,40	Nilai			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Inklusivitas Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	64,48	Nilai			
37	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Pendidikan Dasar yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	Σ (Kurikulum muatan lokal yang telah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan memenuhi kriteria kesesuaian)	3	Kurikulum			
38	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar	$\frac{\text{Jumlah Anak Tidak Mampu yang Bersekolah di SD}}{\text{Jumlah Seluruh Anak Tidak Mampu Usia SD}} \times 100\%$	62,95	Persen			
39	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik	$\frac{\text{Jumlah SD dengan kategori nilai Literasi Baik}}{\text{Jumlah Total SD Kabupaten Banjar yang diniai}} \times 100\%$	66,68	Persen	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Rp. 3.818.414.400	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik	$\frac{\text{Jumlah SD dengan kategori nilai Numerasi Baik}}{\text{Jumlah Total SD Kabupaten Banjar yang diniai}} \times 100\%$	59,83	Persen			
		Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang	$\frac{\text{Jumlah PD Berprestasi Pada Semua Cabang Lomba}}{\text{Jumlah PD yang Mengikuti Ajang Lomba}} \times 100\%$	27,45	Persen			

		berprestasi Akademik dan Non Akademik						
40	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik	$\frac{\text{Jumlah SD dengan kategori nilai Karakter Baik}}{\text{Jumlah Total SD Kabupaten Banjar yang diniai}} \times 100\%$	83,91	Persen			
41	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	(Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang mengalami peningkatan kompetensi / Jumlah total pendidik dan tenaga kependidikan) $\times 100\%$	25,97	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Rp. 1.320.295.200	Kasi PTK SD
42	Meningkatnya Pemenuhan dan Distriibusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	$\frac{\text{Jumlah Kepsek Aktual}}{\text{Jumlah Kepsek Ideal}} \times 100\%$	1:1	Rasio	2. Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	2. Rp. 18.822.000	
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	$\frac{\text{Jumlah Pengawas Aktual}}{\text{Jumlah Pengawas Ideal}} \times 100\%$ Dimana: • Jumlah Pengawas Ideal = Jumlah Total Satuan Pendidikan / Rasio Ideal	1:10,66	Rasio			
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar	Lihat hasil rapor pendidikan	0,72	Indeks			
43	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar	$\frac{\text{Jumlah PTK SD dengan ijazah} \geq \text{S1/D4}}{\text{Total PTK SD}} \times 100\%$	96,03	Persen			
44	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang	$\left(\frac{\text{Jumlah ATS Tahun 2024} - \text{Jumlah ATS Tahun N}}{\text{Jumlah ATS Pada Tahun 2024}} \right) \times 100\%$	10,54	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah	1. Rp. 19.709.877.400	Kabid Pembinaan SMP

		Sekolah Menengah Pertama				Menengah Pertama		
45	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	$(\text{Jumlah SP Akreditasi A} + \text{Jumlah SP Akreditasi B}) / (\text{Total SP}) \times 100\%$	90,79	Persen			
46	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Kemampuan Literasi Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	75,42	Nilai			
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Kemampuan Numerasi Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	67,78	Nilai			
		Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Karakter Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	59,57	Nilai			
47	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	$\frac{\text{Jumlah SMP yang Mengimplementasi IKM \& MuLoK}}{\text{Jumlah Total SMP}} \times 100\%$	100	Persen	2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2. Rp. 30.169.000	
48	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik	$(\text{Jumlah PTK Bersertifikat Pendidik}) / (\text{Jumlah Total PTK Formal}) \times 100\%$	67,66	Persen	3. Pemerataan Kuantitas Dan	3. Rp. 17.622.000	

	dan Tenaga Kependidikan		<p>Indeks Pemerataan Guru (IPG)</p> $IPG = 1 - (\sum G_i - G_i \text{ rata-rata} / 2N)$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • G_i = Jumlah guru di wilayah i • $G_i \text{ rata-rata}$ = Jumlah guru rata-rata per wilayah • N = Jumlah wilayah 	0,82		Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		
49	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah SMP dengan laporan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Total SMP}}$	100	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Rp. 15.884.200.500	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP
50	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Keamanan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	76,43	Nilai	2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2. Rp. 30.169.000	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Kebhinekaan Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	73,20	Nilai			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Nilai Total Iklim Inklusivitas Peserta Didik}}{\text{Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti ANBK}} \times 100\%$	65,81	Nilai			

51	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	Σ (Kurikulum muatan lokal yang telah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan memenuhi kriteria kesesuaian)	1	Kurikulum			
52	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	$(\frac{\text{Jumlah Anak Tidak Mampu yang Bersekolah di SMP}}{\text{Jumlah Seluruh Anak Tidak Mampu Usia SMP}}) \times 100\%$	43,79	Persen			
53	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik	$\frac{\text{Jumlah SMP dengan kategori nilai Literasi Baik}}{\text{Jumlah Total SMP Kabupaten Banjar yang diniai}} \times 100\%$	75,42	Persen	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 3.200.572.100	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
		Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik	$\frac{\text{Jumlah SMP dengan kategori nilai Numerasi Baik}}{\text{Jumlah Total SMP Kabupaten Banjar yang diniai}} \times 100\%$	67,78	Persen			
		Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik	$\frac{\text{Jumlah PD Berprestasi Pada Semua Cabang Lomba}}{\text{Jumlah PD yang Mengikuti Ajang Lomba}} \times 100\%$	14,14	Persen			
54	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik	$\frac{\text{Jumlah SMP dengan kategori nilai Karakter Baik}}{\text{Jumlah Total SMP Kabupaten Banjar yang diniai}} \times 100\%$	75,61	Persen			

	Menengah Pertama							
55	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	(Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang mengalami peningkatan kompetensi / Jumlah total pendidik dan tenaga kependidikan) x 100%	56,19	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Rp. 625.104.800	Kasi PTK SMP
56	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Jumlah Kepsek Aktual}}{\text{Jumlah Kepsek Ideal}} \times 100\%$ Dimana: • Jumlah Kepala Sekolah Ideal = Jumlah Total Satuan Pendidikan / Rasio Ideal	1:1	Rasio	2. Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	2. Rp. 17.622.000	
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Jumlah Pengawas Aktual}}{\text{Jumlah Pengawas Ideal}} \times 100\%$ Dimana: • Jumlah Pengawas Ideal = Jumlah Total Satuan Pendidikan / Rasio Ideal	1:7,6	Rasio			
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	Lihat hasil rapor pendidikan	0,87	Indeks			
57	Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	$\frac{\text{Jumlah PTK SMP dengan ijazah} \geq \text{S1/D4}}{\text{Total PTK SMP}} \times 100\%$	96,33	Persen			
58	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar sarana SNP}}{\text{Jumlah Total Satuan Pendidikan yang Dinilai}} \times 100\%$	79.55	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1. Rp. 4.118.142.580	Kabid Sarana dan Prasarana
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran	$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar prasarana SNP}}{\text{Jumlah Total Satuan Pendidikan yang Dinilai}} \times 100\%$	71.19	Persen	2. Pengelolaan Pendidikan	2. Rp. 896.121.000	

		sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)				Nonformal/Ke setaraan	3. Rp. 38.554.655.000	
						3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Rp. 11.946.602.167	
						4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5. Rp. 40.000.000	
						5. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		
59	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki sarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	61,39	Persen	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 38.554.655.000	Kasi Sarana Prasarana SD
		Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki prasarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	43,70	Persen			

		dengan kondisi lengkap dan baik						
60	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki sarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	79,81	Persen	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1. Rp. 4.118.142.580	Kasi Sarana Prasarana PAUD, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki prasarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	89,60	Persen		2. Rp. 40.000.000	
61	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki sarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	100	Persen	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rp. 896.121.000	Kasi Sarana Prasarana PAUD, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki prasarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	96,05	Persen			
62	Tersedianya Sarana dan	Persentase satuan Pendidikan sekolah	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki sarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	77,00	Persen	Pengelolaan Pendidikan		Kasi Sarana

	Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran	menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik				Sekolah Menengah Pertama	Rp. 11.946.602.167	dan Prasarana SMP
		Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	$\frac{\text{Jumlah sekolah negeri yang memiliki prasarana lengkap}}{\text{Jumlah total sekolah negeri}} \times 100\%$	55,41	Persen			

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama, yaitu penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, serta metode pengukuran kinerja. Penetapan kinerja telah diuraikan pada Bab II yang memuat Rencana Kinerja Tahun 2026 sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi.

Proses pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran ini memanfaatkan berbagai sumber data, baik data internal instansi maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi, dalam bentuk data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup dua aspek utama. Pertama, kinerja kegiatan, yaitu tingkat capaian target pada setiap indikator yang meliputi aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Kedua, kinerja sasaran, yaitu tingkat pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk

kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 2. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tw. 1	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	5	7	8	9	10
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	N/A	Persen	N/A	0	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	N/A	Persen	N/A	0	
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	N/A	Indeks	N/A	0	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	Nilai	N/A	0	
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	N/A	Persen	N/A	0	
5	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	35,14	Persen	27,03	76,92	
6	Terkoordinirnya Penyusunan Dokomen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	28,57	Persen	28,57	100,00	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tw. 1	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
7	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	25	Persen	25	100,00	
8	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	25	Persen	25	100,00	
9	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	25	Persen	25	100,00	
10	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	15	Persen	15	100,00	
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	25	Persen	25	100,00	
12	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	25	Persen	25	100,00	
13	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	0,25	Indeks	0,25	100,00	
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik	40,35	Persen	40,35	100,00	
14	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B	72,16	Persen	72,16	100,00	
15	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	Persen	100	100,00	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tw. 1	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	Persen	100	100,00	
16	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100	Persen	100	100,00	
17	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	15,76	Persen	15,76	100,00	
18	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	1	Kurikulum	1	100,00	
19	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	25	Persen	25	100,00	
20	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	Persen	2	100,00	
21	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan	20	Persen	20	100,00	
		Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	10	Satuan Pendidikan	10	100,00	
22	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya	30,25	Persen	30,25	100,00	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tw. 1	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
23	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya	25	Persen	25	100,00	
24	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal S1/D4	52,8	Persen	52,8	100,00	
25	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1:1	Rasio	1:1	100,00	
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	1:14,03	Rasio	1:14,03	100,00	
26	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)- Sekolah Dasar	4,11	Persen	4,11	100,00	
27	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	74,3	Persen	74,3	100,00	
28	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	Persen	100	100,00	
29	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik	62,15	Persen	62,15	100,00	
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	0,87	Indeks	0,87	100,00	
30	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	25	Persen	15	60,00	
31	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	78,69	Nilai	0	0,00	
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	73,4	Nilai	61,21	83,39	
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar	64,48	Nilai	55,71	86,40	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tw. 1	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
32	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	20,1	Persen	20,1	100,00	
33	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1:1	Rasio	1:1,27	59,74	
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1:10,66	Rasio	1:16,22	92,71	
34	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar	95,02	Persen	93,44	98,34	
35	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	5,27	Persen	5,27	100,00	
36	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	85,53	Persen	85,53	100,00	
37	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	Persen	100	100,00	
38	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik	40	Persen	0	0,00	
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama	0,2	Indeks	0	0,00	
39	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	100	Persen	100	100,00	
40	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	1	Kurikulum	1	100,00	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tw. 1	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
41	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik	10	Persen	10	100,00	
42	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik	15	Persen	15	100,00	
43	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	25	Persen	25	100,00	
44	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1:1	Rasio	1:1	100,00	
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1:7,6	Rasio	1:11,84	94,10	
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	0,69	Indeks	0,69	100,00	
45	Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	95,43	Persen	95,43	100,00	
46	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	78,32	Persen	78,32	100,00	
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	67,3	Persen	67,3	100,00	
47	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	60,37	Persen	60,37	100,00	
		Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	41,16	Persen	41,16	100,00	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tw. 1	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
48	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	19,96	Persen	3	15,03	
		Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	22,4	Persen	5	22,32	
49	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	25	Persen	7,5	30,00	
		Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	24	Persen	10	41,67	
50	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekola Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	75,94	Persen	75,94	100,00	
		Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	51,39	Persen	51,39	100,00	

A. Hasil Capaian Target Kinerja

1. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Sasaran kinerja berikut memiliki 9 indikator yaitu sebagai berikut :

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui proporsi anak pada rentang usia tersebut yang telah mengakses layanan pendidikan pra-sekolah, seperti PAUD atau taman kanak-kanak. Indikator ini memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar, baik dari aspek kognitif, sosial, maupun emosional.

Pada pelaporan triwulan ini, indikator APS usia 5–6 tahun belum dapat dihitung karena data target dan realisasi belum tersedia. Hal ini disebabkan oleh rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga informasi terkait jumlah anak usia 5–6 tahun yang mengikuti pendidikan pra-sekolah belum dapat diperoleh. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0 persen%, yang perlu dipahami bukan sebagai rendahnya tingkat partisipasi, melainkan sebagai konsekuensi dari belum tersedianya data.

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun digunakan untuk mengukur proporsi anak pada rentang usia wajib belajar yang sedang mengakses layanan pendidikan formal, yaitu pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar, karena menggambarkan sejauh mana seluruh anak usia sekolah telah terjangkau oleh sistem pendidikan.

Pada pelaporan triwulan ini, indikator APS usia 7–15 tahun belum dapat dihitung karena data target dan realisasi belum tersedia. Kondisi ini disebabkan oleh rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga informasi mengenai jumlah anak usia 7–15 tahun yang bersekolah belum dapat diperoleh secara resmi. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0%, yang perlu dipahami bukan sebagai rendahnya tingkat partisipasi, melainkan sebagai konsekuensi dari belum tersedianya data yang valid dan terverifikasi.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan

Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun jalur kesetaraan digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan anak usia sekolah dalam pendidikan nonformal, seperti program Paket A, Paket B, dan Paket C. Jalur kesetaraan ini berfungsi sebagai alternatif bagi anak-

anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, baik karena faktor ekonomi, geografis, sosial, maupun sebab lainnya seperti putus sekolah.

Pada pelaporan ini, indikator APS usia 7–18 tahun kesetaraan belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Hal ini disebabkan oleh rapor pendidikan sebagai sumber utama data belum dirilis, sehingga informasi mengenai jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan belum dapat diperoleh secara resmi. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, melainkan menunjukkan belum tersedianya data pendukung.

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi anak dalam layanan pendidikan anak usia dini secara umum. APK dihitung dengan membandingkan jumlah seluruh peserta didik yang terdaftar di satuan PAUD (tanpa melihat apakah usianya sesuai atau tidak) dengan total populasi anak usia PAUD di suatu wilayah. Oleh karena itu, indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang cakupan layanan pendidikan anak usia dini, termasuk kemungkinan adanya anak di luar usia ideal yang juga terlayani.

Pada periode pelaporan ini, indikator APK PAUD belum dapat dihitung karena data target dan realisasi belum tersedia. Kondisi ini terjadi karena rapor pendidikan sebagai sumber utama data belum dirilis, sehingga informasi mengenai jumlah peserta didik PAUD maupun jumlah populasi usia PAUD belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, melainkan menunjukkan belum tersedianya data pendukung.

e. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar secara umum. APK dihitung dengan membandingkan jumlah seluruh siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), termasuk mereka yang berusia di bawah atau di atas usia sekolah ideal, dengan total populasi anak usia sekolah dasar di suatu wilayah. Dengan demikian, indikator ini memberikan gambaran luas mengenai cakupan layanan pendidikan dasar, tanpa memperhatikan kesesuaian usia peserta didik.

Pada triwulan ini, indikator APK Sekolah Dasar belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Hal ini terjadi karena rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga data mengenai jumlah siswa SD maupun jumlah populasi usia sekolah dasar belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator tercatat sebesar 0%, yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, melainkan menunjukkan belum tersedianya data yang dibutuhkan untuk perhitungan.

f. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP) digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang menengah pertama secara keseluruhan. APK dihitung dengan membandingkan jumlah seluruh siswa yang terdaftar di SMP, baik yang berada pada usia sekolah ideal maupun di luar usia tersebut, dengan total populasi penduduk usia SMP di suatu wilayah. Dengan demikian, indikator ini memberikan gambaran mengenai cakupan layanan pendidikan menengah pertama secara luas.

Pada pelaporan ini, indikator APK SMP belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Hal ini disebabkan oleh rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga data mengenai jumlah peserta didik SMP serta jumlah penduduk usia sekolah menengah pertama belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator tercatat sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, melainkan menunjukkan belum tersedianya data yang dibutuhkan untuk perhitungan.

g. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD digunakan untuk mengukur proporsi anak pada usia PAUD yang benar-benar sedang bersekolah di jenjang yang sesuai, yaitu layanan pendidikan anak usia dini. Berbeda dengan APK yang menghitung seluruh peserta didik tanpa memperhatikan kesesuaian usia, APM lebih spesifik karena hanya menghitung anak yang *berusia sesuai dengan jenjang PAUD. Oleh karena itu, indikator ini sangat penting untuk menilai ketepatan akses pendidikan sejak usia dini.

Pada periode pelaporan ini, indikator APM PAUD belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Hal ini terjadi karena rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga informasi

terkait jumlah anak usia PAUD yang benar-benar bersekolah pada jenjang PAUD belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, melainkan menunjukkan belum tersedianya data yang dibutuhkan untuk perhitungan.

h. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar digunakan untuk mengukur proporsi anak pada usia sekolah dasar yang benar-benar bersekolah pada jenjang yang sesuai, yaitu Sekolah Dasar (SD). Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menghitung seluruh peserta didik tanpa memperhatikan kesesuaian usia, APM lebih fokus pada ketepatan usia, sehingga indikator ini penting untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dasar dalam menampung anak sesuai kelompok usia idealnya.

Pada periode pelaporan ini, indikator APM Sekolah Dasar belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Hal ini disebabkan oleh rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga informasi mengenai jumlah anak usia SD yang sedang bersekolah di jenjang SD belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator ditampilkan sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, melainkan menunjukkan belum tersedianya data yang diperlukan untuk perhitungan.

i. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP) digunakan untuk mengukur proporsi anak pada usia sekolah menengah pertama yang benar-benar bersekolah di jenjang SMP sesuai dengan kelompok usianya. Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencakup seluruh peserta didik tanpa memperhatikan kesesuaian usia, APM lebih menekankan pada ketepatan usia dalam mengakses pendidikan, sehingga indikator ini penting untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dalam menampung peserta didik sesuai jenjang yang semestinya.

Pada periode pelaporan ini, indikator APM SMP belum dapat dihitung karena data target dan realisasi tidak tersedia. Kondisi ini terjadi karena rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga informasi mengenai jumlah anak usia SMP yang bersekolah pada jenjang SMP belum dapat diperoleh secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, capaian indikator tercatat sebesar 0%, yang tidak mencerminkan kondisi riil

di lapangan, melainkan menunjukkan belum tersedianya data yang diperlukan untuk perhitungan.

2. Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

Sasaran kinerja ini memiliki indikator Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Indikator Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan layanan dasar pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana satuan pendidikan dan pemerintah daerah telah memenuhi standar minimal layanan pendidikan, yang mencakup berbagai aspek seperti ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, proses pembelajaran, serta dukungan manajemen pendidikan.

Pada periode Triwulan I, indikator ini memiliki target N/A dan realisasi N/A, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja. Kondisi ini terjadi karena rapor pendidikan sebagai sumber data utama belum dirilis, sehingga data yang dibutuhkan untuk menghitung Indeks SPM Bidang Pendidikan belum tersedia secara resmi dan terverifikasi. Akibatnya, nilai capaian belum dapat ditetapkan dan belum dapat menggambarkan kondisi mutu pelayanan pendidikan secara objektif.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kinerja ini memiliki indikator berupa Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. SAKIP mencerminkan sejauh mana perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal telah dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi pada hasil (outcome).

Pada periode Triwulan I, indikator ini memiliki target dan realisasi N/A, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 0%. Kondisi ini terjadi karena pada tahap awal tahun anggaran, penilaian atau penghitungan Nilai SAKIP belum dapat dilakukan, mengingat proses evaluasi SAKIP umumnya dilakukan secara periodik dan terintegrasi dalam satu siklus tahunan.

Selain itu, belum tersedianya nilai SAKIP juga disebabkan oleh proses pengumpulan dan konsolidasi dokumen kinerja perangkat daerah yang masih berjalan, termasuk dokumen perencanaan (Renstra dan Renja), pengukuran

kinerja, serta laporan kinerja (LKjIP) yang menjadi komponen utama dalam penilaian SAKIP. Oleh karena itu, penilaian belum dapat dilakukan secara lengkap dan komprehensif pada triwulan ini termasuk belum dilakukannya evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat Daerah sebagai dasar pencantuman realisasi kinerja nilai SAKIP perangkat daerah.

4. Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

Sasaran kinerja memiliki Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menjalankan ketentuan administrasi, tata kelola internal, serta kualitas pelaksanaan kinerja organisasi. IKKI juga mencerminkan sejauh mana Dinas Pendidikan telah menerapkan prinsip tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengendalian internal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada Triwulan I, indikator ini memiliki target dan realisasi yang masih N/A, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 0%. Kondisi ini terjadi karena pada awal tahun anggaran, pengukuran IKKI belum dapat dilakukan secara lengkap, mengingat sebagian besar data dan dokumen pendukung kinerja internal masih dalam proses penyusunan dan konsolidasi.

Selain itu, belum tersedianya nilai IKKI pada Triwulan I juga disebabkan oleh karena belum dilakukannya penilaian mandiri IKKI pada akhir triwulan IV oleh Dinas berdasarkan data kepatuhan dan kinerja pelayanan publik yang terkumpul secara keseluruhan pada akhir tahun dan belum dilakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri IKKI oleh Inspektorat daerah.

5. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan

Sasaran kinerja "Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan" bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga evaluasi, dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku.

Indikator kinerja sasaran ini diukur melalui Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja sesuai ketentuan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan

perangkat daerah dalam melaksanakan siklus manajemen kinerja, yang meliputi *perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan sejauh mana dokumen perencanaan (Renstra dan Renja), penganggaran (RKPD dan APBD), serta pelaporan evaluasi kinerja telah disusun secara selaras, terukur, dan konsisten.

Pada Triwulan I, indikator ini memiliki target sebesar 35,14%* dengan realisasi sebesar 27,03%, sehingga diperoleh capaian sebesar 76,92%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi sebesar 27,03% dari target 35,14% menggambarkan bahwa sebagian besar dokumen dan proses perencanaan serta penganggaran telah disusun sesuai ketentuan, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal atau belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyesuaian program dan kegiatan, sinkronisasi antar dokumen perencanaan, serta proses finalisasi anggaran pada awal tahun berjalan.

6. Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP

Sasaran kinerja "Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP" bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyusunan dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh perangkat daerah berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPIP merupakan instrumen penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Indikator kinerja diukur melalui Persentase Dokumen SPIP yang disusun sesuai dengan ketentuan Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan koordinasi dalam penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPIP merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada Triwulan I, indikator ini menetapkan target sebesar 28,57%* dengan realisasi sebesar 28,57%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyusunan dokumen SPIP pada periode tersebut telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan, baik dari sisi jumlah maupun kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian ini menunjukkan bahwa koordinasi penyusunan dokumen SPIP telah berjalan dengan baik di sebagian besar perangkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif unit pengelola SPIP dalam memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitasi teknis kepada perangkat daerah dalam menyusun dokumen SPIP sesuai pedoman maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Indikator kinerja yang digunakan pada sasaran ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi keuangan mencakup berbagai aspek, seperti penatausahaan anggaran, pelaksanaan belanja, pencatatan transaksi keuangan, serta pelaporan keuangan yang harus dilakukan secara tertib, akurat, dan tepat waktu.

Pada Triwulan I, indikator ini memiliki target sebesar 25% dengan realisasi sebesar 25%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi keuangan pada periode tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan mencapai target 100% pada triwulan ini mencerminkan bahwa sistem pengelolaan keuangan perangkat daerah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga menunjukkan adanya kedisiplinan dalam pelaksanaan administrasi keuangan, mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan.

8. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Indikator kinerja yang digunakan pada sasaran ini Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi BMD mencakup proses pencatatan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, serta pelaporan aset daerah agar tercatat secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Triwulan I, indikator ini memiliki target sebesar 25% dan realisasi sebesar 25%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah pada periode tersebut telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan mencapai target pada Triwulan I mencerminkan bahwa perangkat daerah telah melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dengan baik, khususnya dalam aspek tertib administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini juga menunjukkan adanya komitmen dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan aset daerah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

9. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja "Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan" bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan administrasi kepegawaian di seluruh perangkat daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, guna mendukung terciptanya tata kelola kepegawaian yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Indikator kinerja ini diukur melalui Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan, dengan target sebesar 25%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi capaian berada pada angka 25%, sehingga target yang telah ditetapkan pada triwulan ini dapat tercapai secara penuh.

Capaian sebesar 100% terhadap target triwulan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan perangkat daerah telah berjalan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi kepegawaian yang dilaksanakan mencakup berbagai proses penting dalam manajemen ASN meliputi proses pengusulan, pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, cuti, hingga pensiun pegawai. Hal ini didukung oleh peningkatan pemahaman unit

kerja terhadap regulasi kepegawaian serta peran aktif unit pengelola kepegawaian dalam memberikan asistensi dan monitoring.

10. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja “Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas” diarahkan untuk memastikan terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan perangkat daerah. Ruang lingkup administrasi umum meliputi pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, pengelolaan perlengkapan dan aset perkantoran, pelayanan administrasi perkantoran, serta dokumentasi kegiatan pemerintahan yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.

Pada triwulan ini, capaian kinerja diukur melalui indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan target sebesar 15%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi indikator mencapai 15%, sehingga target kinerja triwulan telah tercapai secara optimal (100% dari target). Capaian ini mengindikasikan bahwa mayoritas unit kerja telah mampu melaksanakan administrasi umum secara konsisten dan sesuai ketentuan.

11. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja “Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas” diarahkan untuk menjamin ketersediaan layanan pendukung yang andal, tepat guna, dan berkesinambungan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Jasa penunjang dimaksud mencakup layanan kebersihan, keamanan, transportasi operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta layanan teknis operasional lainnya yang memiliki peran strategis dalam menjaga efektivitas kinerja organisasi.

Pada triwulan ini, capaian kinerja diukur melalui indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan target sebesar 25%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi indikator mencapai 25%, sehingga target kinerja triwulan telah tercapai secara optimal (100% dari target yang ditetapkan).

Pencapaian ini menunjukkan bahwa layanan jasa penunjang telah diselenggarakan secara konsisten dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, adanya koordinasi yang baik antara pengelola kegiatan dengan penyedia jasa turut memperkuat efektivitas pelaksanaan layanan

penunjang, sehingga potensi kendala operasional dapat diminimalisir sejak dini.

12. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Pemeliharaan

Sasaran kinerja "Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Pemeliharaan" difokuskan untuk memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah yang digunakan dalam menunjang operasional perangkat daerah senantiasa berada dalam kondisi optimal, aman, dan siap pakai. Upaya ini dilaksanakan melalui sistem pemeliharaan yang terencana, terjadwal, dan berbasis kebutuhan riil, sehingga mampu menjaga keberlangsungan fungsi aset sekaligus menghindari kerusakan yang berdampak pada terganggunya kinerja organisasi.

Pada triwulan ini, capaian kinerja diukur melalui indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Sesuai dengan Rencana Pemeliharaan dengan target sebesar 25%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi indikator mencapai 25%, yang berarti target kinerja telah tercapai secara optimal (100% dari target yang ditetapkan).

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan aset daerah telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, baik dari sisi jadwal, jenis pemeliharaan, maupun standar teknis yang ditetapkan. Selain itu, penerapan prinsip pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib administrasi dan akuntabel turut memperkuat efektivitas kegiatan pemeliharaan, sehingga setiap aset dapat ditelusuri riwayat pemeliharaannya dan dikendalikan penggunaannya secara optimal.

13. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan" bertujuan untuk memastikan pemerataan distribusi guru serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagai bagian penting dalam mendukung perkembangan dan kesiapan belajar anak sejak dini.

Indikator pertama, Indeks Pemerataan Guru PAUD, mengukur seberapa merata distribusi guru PAUD di berbagai wilayah. Target yang ditetapkan adalah 0,25 dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,25, menandakan

pemerataan guru telah sesuai dengan sasaran. Hal ini menunjukkan adanya upaya efektif dalam menempatkan guru PAUD secara proporsional, sehingga akses pendidikan anak usia dini menjadi lebih merata di seluruh daerah.

Indikator kedua, Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Bersertifikat Pendidik, menilai kualitas sumber daya manusia di bidang PAUD melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Target yang ditetapkan adalah 40,35%, dan realisasi capaian sama yakni 40,35%, yang berarti kualitas pendidik telah meningkat sesuai target. Capaian ini didukung oleh program pelatihan dan sertifikasi yang sistematis, sehingga semakin banyak tenaga pendidik yang memenuhi standar profesionalisme yang ditetapkan.

Keberhasilan kedua indikator ini mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan para pendidik dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas tenaga pendidikan PAUD. Meskipun target telah tercapai, upaya peningkatan kualitas dan pemerataan secara berkelanjutan tetap menjadi fokus utama, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan tenaga pendidik bersertifikat.

14. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran ini menunjukkan fokus pada penguatan kapasitas dan mutu lembaga pendidikan, yang salah satunya diukur melalui status akreditasi. Akreditasi menjadi tolok ukur penting karena mencerminkan kelayakan lembaga dari aspek manajemen, sarana prasarana, tenaga pendidik, serta proses pembelajaran.

Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B. Indikator ini mengukur proporsi lembaga PAUD yang telah memenuhi standar mutu minimal dengan peringkat akreditasi B. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas kelembagaan PAUD di wilayah tersebut.

Target kinerja yang ditetapkan sebesar 72,16 persen, yang berarti diharapkan lebih dari dua pertiga dari total satuan PAUD telah memenuhi standar mutu minimal dengan memperoleh akreditasi peringkat B. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi capaian juga mencapai 72,16 persen, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas kelembagaan PAUD telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar satuan PAUD telah mampu memenuhi standar nasional pendidikan yang dipersyaratkan dalam proses akreditasi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Selain itu, adanya komitmen dari pengelola lembaga dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan juga menjadi faktor penting dalam pencapaian indikator ini.

15. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja "Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal" bertujuan untuk memastikan seluruh satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan menerapkan kurikulum nasional yang disertai dengan muatan lokal secara lengkap dan konsisten. Hal ini penting untuk menjaga relevansi pendidikan dengan karakteristik budaya dan kebutuhan masyarakat setempat, sekaligus memenuhi standar pendidikan nasional.

Pada indikator pertama, yaitu Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal, ditetapkan target sebesar 100%. Realisasi capaian juga mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh satuan PAUD telah mengimplementasikan kurikulum nasional yang dipadukan dengan muatan lokal secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, pada indikator kedua yaitu Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal, target yang ditetapkan juga sebesar 100% dan realisasi capaian mencapai 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan nonformal dan kesetaraan telah menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal secara optimal dalam proses pembelajaran.

Keberhasilan capaian pada kedua indikator tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kurikulum telah berjalan secara konsisten dan merata di seluruh satuan pendidikan terkait. Hal ini tidak terlepas dari dukungan pembinaan teknis, sosialisasi kebijakan kurikulum, serta pendampingan kepada tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan dalam

mengintegrasikan muatan lokal ke dalam kurikulum nasional. Selain itu, adanya komitmen dari satuan pendidikan dalam menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik peserta didik dan potensi daerah turut memperkuat keberhasilan ini.

16. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan" bertujuan untuk memperkuat pengelolaan administrasi dan keuangan di satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga tercipta transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Indikator keberhasilan diukur melalui Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang memiliki laporan administrasi dan keuangan sesuai ketentuan, dengan target capaian sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian mencapai 100%, sehingga target telah berhasil dicapai secara optimal.

Capaian ini mencerminkan upaya yang efektif dalam membina dan membimbing satuan PAUD dalam menyusun laporan administrasi dan keuangan yang tertib dan akurat. Dukungan berupa pelatihan, pendampingan teknis, serta penyediaan sistem pencatatan yang mudah digunakan menjadi faktor kunci keberhasilan ini.

17. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja "Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini" bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga mereka mendapatkan kesempatan belajar yang setara sejak usia dini.

Indikator keberhasilan diukur melalui Persentase Peserta Didik Tidak Mampu yang Bersekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan target capaian sebesar 15,76%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian indikator mencapai 15,76%, sehingga target yang telah ditetapkan berhasil tercapai.

Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam upaya pemberian akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang

mampu melalui berbagai program bantuan, seperti beasiswa, subsidi biaya pendidikan, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah bagi kelompok rentan. Dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam keberhasilan ini.

18. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja "Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini" bertujuan untuk menyesuaikan isi dan proses pembelajaran dengan karakteristik serta kebutuhan lokal, guna memperkaya pengalaman belajar anak sejak usia dini dan memperkuat identitas budaya daerah.

Indikator kinerja ini diukur melalui Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang Ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan, dengan target penetapan sebanyak 1 kurikulum selama periode pelaporan. Berdasarkan hasil pelaksanaan program, capaian realisasi menunjukkan bahwa 1 kurikulum muatan lokal telah berhasil disusun dan ditetapkan, sehingga target berhasil tercapai 100%.

Kurikulum muatan lokal ini dirancang dengan mempertimbangkan potensi, budaya, kearifan lokal, serta kebutuhan perkembangan anak di wilayah setempat. Proses penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk tenaga pendidik, pengawas, tokoh masyarakat, dan ahli kurikulum, guna memastikan kurikulum yang dihasilkan kontekstual, relevan, dan aplikatif.

Capaian ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mengembangkan pendidikan PAUD yang tidak hanya sesuai dengan standar nasional, tetapi juga menggali dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam pembelajaran.

19. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan" bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan lembaga pendidikan nonformal yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam aspek administrasi dan pengelolaan keuangan. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam menjamin keberlangsungan layanan pendidikan

nonformal/kesetaraan yang berkualitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara.

Indikator keberhasilan diukur melalui Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan, dengan target capaian sebesar 25%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian mencapai 25%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan tata kelola telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan hasil yang optimal.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa satuan pendidikan nonformal/kesetaraan telah mampu menyusun laporan administrasi dan keuangan secara tertib, sistematis, dan sesuai standar yang berlaku. Kualitas laporan yang dihasilkan tidak hanya ditandai dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga ketepatan pencatatan, kesesuaian dengan prinsip akuntansi sederhana, serta keterlacakan penggunaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

20. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja “Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan” diarahkan untuk memperluas akses layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu yang belum atau tidak dapat terlayani melalui jalur pendidikan formal. Sasaran ini menekankan pentingnya kehadiran pendidikan nonformal dan kesetaraan sebagai alternatif strategis dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga, khususnya anak-anak dan remaja dari keluarga rentan, agar tetap memperoleh kesempatan belajar yang setara, inklusif, dan berkelanjutan.

Indikator keberhasilan diukur melalui Persentase Peserta Didik Tidak Mampu yang Bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan target sebesar 2%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 2%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam menjangkau dan memfasilitasi peserta didik dari keluarga kurang

mampu telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan hasil yang optimal.

Capaian ini mencerminkan bahwa program perluasan akses pendidikan bagi kelompok tidak mampu telah terlaksana secara efektif dan tepat sasaran. Peserta didik yang sebelumnya berisiko tidak melanjutkan pendidikan atau mengalami putus sekolah telah berhasil difasilitasi untuk kembali memperoleh layanan pendidikan melalui jalur nonformal dan kesetaraan. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pendidikan di kalangan masyarakat kurang mampu, sekaligus memperkuat peran pendidikan nonformal sebagai solusi alternatif yang adaptif terhadap berbagai keterbatasan sosial dan ekonomi.

21. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan" bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan nonformal, khususnya pendidikan kesetaraan, guna menjawab kebutuhan masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara memadai.

Indikator pertama, yaitu Persentase Masyarakat yang Terlayani Pendidikan Kesetaraan, menilai seberapa besar cakupan layanan pendidikan kesetaraan di masyarakat. Target yang ditetapkan sebesar 20% berhasil dicapai dengan realisasi capaian yang sama yaitu 20%. Capaian ini menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan kesetaraan, yang merupakan alternatif penting dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang belum sempat atau tidak dapat mengikuti pendidikan formal.

Indikator kedua, Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan, mengukur jumlah satuan pendidikan berbasis pondok pesantren yang aktif memberikan layanan pendidikan kesetaraan. Target sebanyak 10 satuan pendidikan berhasil terealisasi penuh dengan capaian yang sama yaitu 10 satuan pendidikan. Hal ini menandakan adanya penguatan peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang turut berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan kesetaraan di wilayah tersebut.

Keberhasilan kedua indikator ini mencerminkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperluas jangkauan pendidikan nonformal, khususnya bagi mereka yang membutuhkan alternatif pendidikan di luar jalur formal.

22. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja "Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini" bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pendidikan anak usia dini melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional.

Indikator keberhasilan diukur melalui Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Ditingkatkan Kompetensinya, dengan target capaian sebesar 30,25%. Berdasarkan evaluasi, realisasi capaian indikator ini juga mencapai 30,25%, sehingga target berhasil dicapai secara optimal.

23. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan" bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan kesetaraan melalui pengembangan kompetensi secara menyeluruh.

Indikator keberhasilan diukur melalui Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Ditingkatkan Kompetensinya, dengan target capaian sebesar 25%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian indikator ini mencapai 25%, sehingga target berhasil dicapai secara optimal. Capaian yang sangat tinggi ini menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan sebagai salah satu faktor utama dalam peningkatan mutu pendidikan nonformal dan kesetaraan.

24. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan" bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan formal pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan memastikan mereka memiliki kualifikasi minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4).

Indikator keberhasilan diukur melalui Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Memiliki Kualifikasi Minimal S1/D4, dengan target capaian sebesar 52,8%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian mencapai 52,8%, sehingga target telah berhasil dicapai secara optimal.

Keberhasilan pencapaian target ini mencerminkan komitmen pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mendukung peningkatan kualifikasi formal tenaga pendidik melalui program pendidikan lanjut, beasiswa, serta pengakuan kompetensi.

25. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Sasaran "Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan" yang difokuskan pada pemerataan dan kecukupan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sasaran ini menjadi krusial karena ketersediaan dan distribusi tenaga kependidikan yang proporsional sangat menentukan kualitas layanan pendidikan, efektivitas pembinaan, serta keberlangsungan proses belajar mengajar di satuan pendidikan.

Indikator pertama yang digunakan adalah Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan target sebesar 1:1. Realisasi capaian menunjukkan angka 1:1 dengan tingkat capaian 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap satuan PAUD telah memiliki satu kepala sekolah atau pengelola yang bertanggung jawab penuh terhadap manajemen lembaga. Kondisi ini mencerminkan terpenuhinya kebutuhan kepemimpinan di tingkat satuan pendidikan, sehingga fungsi manajerial, pengawasan internal, serta pengambilan keputusan dapat berjalan secara optimal dan terarah.

Indikator kedua adalah Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan target sebesar 1:14,03. Realisasi capaian juga berada pada angka 1:14,03 dengan tingkat capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa distribusi pengawas sekolah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, di mana satu orang pengawas membina sekitar 14 satuan PAUD. Rasio ini mencerminkan keseimbangan

beban kerja pengawas sehingga pelaksanaan fungsi supervisi akademik dan manajerial dapat dilakukan secara efektif, termasuk dalam hal pembinaan mutu, pemantauan kinerja, serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan.

Secara keseluruhan, tercapainya kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memenuhi dan mendistribusikan tenaga kependidikan telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan yang berbasis data, penataan distribusi yang mempertimbangkan kondisi wilayah, serta koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan.

26. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan" diarahkan pada penurunan angka anak tidak sekolah (ATS) pada jenjang Sekolah Dasar (SD), sebagai upaya memperluas akses pendidikan dasar yang merata bagi seluruh anak usia sekolah.

Indikator keberhasilan diukur melalui Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada SD, dengan target penurunan sebesar 4,11%. Pada periode pelaporan, realisasi penurunan ATS mencapai 4,11%, sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Capaian sebesar 100% menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah. Hal ini menjadi bukti bahwa berbagai program dan kebijakan yang dijalankan, seperti pemberian bantuan pendidikan, kampanye kesadaran masyarakat, dan penguatan layanan pendidikan dasar, telah memberikan dampak positif yang nyata.

27. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan", difokuskan pada peningkatan mutu lembaga pendidikan melalui pemenuhan standar akreditasi. Akreditasi merupakan indikator penting dalam menilai kelayakan dan kualitas satuan pendidikan, karena mencakup berbagai aspek seperti manajemen kelembagaan, proses pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Indikator yang digunakan adalah Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B, dengan target capaian sebesar 74,3%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 74,3%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target

yang telah ditetapkan berhasil dicapai secara optimal sesuai dengan perencanaan.

Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah memenuhi standar mutu minimal yang ditetapkan dalam sistem akreditasi nasional, yaitu memperoleh peringkat sekurang-kurangnya B. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas kelembagaan yang cukup signifikan, baik dari sisi tata kelola, mutu layanan pendidikan, maupun kesiapan lembaga dalam memenuhi standar nasional pendidikan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti pelaksanaan pembinaan dan pendampingan akreditasi kepada satuan pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Selain itu, adanya komitmen dari pengelola satuan pendidikan untuk terus meningkatkan mutu layanan juga menjadi faktor penting dalam pencapaian indikator ini.

28. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja "Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal" bertujuan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum yang mengacu pada standar nasional sekaligus mengintegrasikan muatan lokal yang relevan dengan karakteristik daerah masing-masing.

Indikator keberhasilan diukur melalui Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal, dengan target sebesar 100%. Pada periode pelaporan, realisasi capaian mencapai 100%, namun capaian aktual bahkan melampaui target dengan angka sebesar 100%.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan telah menerapkan kurikulum sesuai ketentuan, sehingga proses pembelajaran tidak hanya mengikuti standar nasional tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai lokal yang memperkaya pendidikan dan memperkuat identitas budaya.

29. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran "Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan", yang berfokus pada peningkatan kompetensi serta distribusi tenaga pendidik secara merata guna mendukung mutu layanan pendidikan.

Sasaran ini memiliki peran strategis karena kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta pemerataan penempatannya di seluruh satuan pendidikan.

Indikator pertama yang digunakan adalah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi, dengan target sebesar 62,15%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 62,15%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memiliki sertifikasi profesional telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa tenaga pendidik telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, baik dari aspek pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian, sehingga diharapkan mampu memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas.

Indikator kedua adalah Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar, dengan target sebesar 0,87. Realisasi capaian juga mencapai 0,87 dengan tingkat capaian 100%. Nilai indeks ini mencerminkan tingkat pemerataan distribusi guru pada jenjang sekolah dasar, di mana semakin mendekati angka 1 menunjukkan distribusi yang semakin merata. Dengan capaian 0,87, dapat disimpulkan bahwa distribusi guru telah relatif merata antar wilayah atau satuan pendidikan, sehingga kesenjangan ketersediaan guru dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, tercapainya kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan program, seperti fasilitasi sertifikasi guru, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan, serta penataan distribusi guru berbasis kebutuhan dan kondisi wilayah.

30. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran “Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan” yang berfokus pada peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan di tingkat Sekolah Dasar. Tata kelola yang baik menjadi elemen penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran di satuan pendidikan.

Indikator yang digunakan adalah Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan, dengan target sebesar 25%. Namun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian baru mencapai 15%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 60% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa target belum tercapai secara optimal dan masih terdapat kesenjangan sebesar 10% yang perlu menjadi perhatian.

Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian satuan pendidikan telah mampu menyusun laporan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari aspek kelengkapan dokumen, ketepatan pencatatan, maupun kesesuaian dengan standar pelaporan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah satuan pendidikan yang belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, serta belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan.

31. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar” yang difokuskan pada terciptanya suasana belajar yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan di tingkat Sekolah Dasar. Lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif serta perkembangan karakter peserta didik.

Indikator pertama adalah Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar dengan target sebesar 78,69. Namun, realisasi capaian pada periode ini tercatat sebesar 0 dengan tingkat capaian 0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator tersebut belum dapat diukur atau belum terdapat data yang tersedia pada periode pelaporan. Hal ini dapat disebabkan oleh belum dilaksanakannya pengukuran, keterbatasan instrumen evaluasi, atau kendala dalam pengumpulan data di lapangan. Dengan demikian, diperlukan perhatian khusus untuk memastikan proses pengukuran dapat dilakukan pada periode berikutnya agar kondisi nyata terkait keamanan lingkungan sekolah dapat teridentifikasi secara akurat.

Indikator kedua adalah Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar dengan target sebesar 73,4. Realisasi capaian mencapai 61,21 dengan tingkat capaian sebesar 83,39%. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kebhinekaan di lingkungan sekolah sudah cukup baik, namun masih belum

sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, serta sikap inklusif antar warga sekolah telah mulai terbangun, meskipun masih perlu diperkuat melalui berbagai program pembinaan karakter dan penguatan budaya sekolah.

Indikator ketiga adalah Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar dengan target sebesar 64,48. Realisasi capaian berada pada angka 55,71 dengan tingkat capaian 86,40%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat inklusivitas di sekolah dasar sudah cukup baik, terutama dalam hal penerimaan terhadap peserta didik dengan latar belakang yang beragam. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang setara dalam proses pembelajaran tanpa adanya diskriminasi.

Secara keseluruhan, capaian pada sasaran ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan belajar di Sekolah Dasar sudah mulai berkembang ke arah yang lebih baik, khususnya dalam aspek kebhinekaan dan inklusivitas, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Sementara itu, belum tersedianya data pada indikator iklim keamanan menjadi catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti.

32. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Sasaran kinerja "Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar" bertujuan untuk memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan dasar melalui berbagai program pengembangan profesional yang terstruktur dan berkelanjutan.

Indikator capaian diukur melalui Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya, dengan target sebesar 20,1%, dan realisasi yang berhasil mencapai 20,1%, atau setara dengan 100% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan kompetensi telah dilaksanakan sesuai rencana dan menysasar kelompok sasaran yang tepat.

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan teknis, bimbingan teknis (bimtek), workshop kurikulum, pelatihan literasi-numerasi, serta penguatan pembelajaran berbasis teknologi. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik,

profesional, sosial, dan kepribadian pendidik, agar dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

33. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran “Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan” pada jenjang Sekolah Dasar, yang difokuskan pada keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kependidikan, khususnya kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ketersediaan dan distribusi yang proporsional menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas manajemen sekolah serta kualitas pembinaan dan pengawasan pendidikan.

Indikator pertama adalah Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan target sebesar 1:1, yang berarti setiap satuan pendidikan idealnya dipimpin oleh satu kepala sekolah definitif. Namun, realisasi capaian menunjukkan rasio sebesar 1:1,27 dengan tingkat capaian 59,74%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kepala sekolah belum optimal, di mana masih terdapat satu kepala sekolah yang harus menangani lebih dari satu satuan pendidikan. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas fungsi manajerial dan kepemimpinan di sekolah, seperti dalam pengelolaan administrasi, pembinaan tenaga pendidik, serta pengambilan keputusan strategis.

Indikator kedua adalah Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan target sebesar 1:10,66. Realisasi capaian menunjukkan rasio sebesar 1:16,22 dengan tingkat capaian 92,71%. Meskipun capaian kinerja relatif tinggi, rasio tersebut menunjukkan bahwa beban kerja pengawas masih cukup besar, di mana satu orang pengawas harus membina lebih banyak satuan pendidikan dibandingkan standar yang ditetapkan. Kondisi ini dapat berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial, termasuk dalam hal pembinaan mutu dan evaluasi kinerja sekolah.

Secara keseluruhan, capaian pada sasaran ini menunjukkan bahwa pemenuhan dan distribusi tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar belum sepenuhnya ideal, terutama pada pemenuhan kepala sekolah yang masih menjadi tantangan utama. Sementara itu, untuk pengawas sekolah, meskipun capaian mendekati target, masih diperlukan upaya penyesuaian agar beban kerja lebih proporsional.

34. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja “Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan” diarahkan untuk menjamin bahwa seluruh guru dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4). Pemenuhan kualifikasi ini menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, karena berkaitan langsung dengan penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dalam proses pembelajaran.

Indikator keberhasilan diukur melalui Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang SD yang Memiliki Kualifikasi Minimal S1/D4, dengan target sebesar 95,02%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian mencapai 93,44%, atau setara dengan 98,34% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mendekati optimal, dengan selisih yang relatif kecil. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang Sekolah Dasar telah memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.

35. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan" merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS).

Indikator capaian kinerja diukur melalui Persentase Penurunan ATS pada Jenjang SMP, dengan target penurunan sebesar 5,27%. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, realisasi penurunan ATS mencapai 5,27%, atau 100% capaian dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dalam mendorong partisipasi pendidikan telah menunjukkan hasil yang efektif. Strategi yang dilakukan mencakup sosialisasi pentingnya pendidikan, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, program kejar paket, serta peningkatan peran serta masyarakat melalui pendidikan berbasis komunitas.

36. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja “Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan” diarahkan untuk memperkuat mutu penyelenggaraan pendidikan melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan secara menyeluruh oleh setiap satuan pendidikan. Penguatan kelembagaan ini mencakup aspek tata kelola, kualitas proses pembelajaran, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sistem penilaian yang terstandar. Dengan kelembagaan yang kuat, satuan pendidikan diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu, konsisten, dan berkelanjutan.

Capaian kinerja diukur melalui indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B, dengan target sebesar 85,53%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 85,53%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, secara kinerja target telah terpenuhi secara optimal sesuai dengan perencanaan.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah memenuhi standar mutu minimal yang ditetapkan dalam sistem akreditasi nasional. Satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B umumnya telah memenuhi kriteria kelayakan pada berbagai komponen utama, seperti penerapan kurikulum yang sesuai standar, ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik, pengelolaan manajemen sekolah yang tertib, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, aspek proses pembelajaran dan sistem evaluasi juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

37. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja "Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal" bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan telah melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik kurikulum nasional sebagai standar pendidikan dasar dan menengah, maupun muatan lokal sebagai penguatan karakter dan kearifan lokal.

Pada triwulan ini, indikator kinerja diukur melalui Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal dengan target sebesar 100%. Hasil realisasi menunjukkan capaian 100%, yang berarti

seluruh satuan pendidikan telah melaksanakan kurikulum nasional dan mengintegrasikan muatan lokal dalam proses pembelajaran.

Capaian ini mencerminkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam memastikan bahwa proses belajar mengajar berlangsung sesuai regulasi, serta responsif terhadap potensi dan kebutuhan daerah. Kurikulum muatan lokal yang diterapkan mencakup berbagai aspek, seperti budaya, lingkungan, kearifan lokal, hingga keterampilan hidup, yang diintegrasikan dalam pembelajaran agar relevan dengan konteks sosial peserta didik.

38. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran “Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan” pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang difokuskan pada peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui sertifikasi serta pemerataan distribusi guru antar satuan pendidikan.

Indikator pertama adalah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik dengan target sebesar 40%. Namun, pada periode pelaporan ini realisasi capaian tercatat sebesar 0%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat data capaian atau belum dilaksanakannya pengukuran terhadap indikator tersebut pada periode ini. Hal ini dapat disebabkan oleh keterlambatan pelaporan, belum tersedianya data valid, atau belum dilaksanakannya program sertifikasi dalam kurun waktu pelaporan. Akibatnya, capaian terhadap peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui sertifikasi belum dapat dinilai secara akurat.

Indikator kedua adalah Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama dengan target sebesar 0,2. Realisasi capaian juga tercatat sebesar 0 dengan tingkat capaian 0%. Sama halnya dengan indikator pertama, kondisi ini mengindikasikan bahwa belum tersedia data atau belum dilakukan pengukuran terhadap tingkat pemerataan guru pada jenjang SMP dalam periode ini. Padahal, indeks pemerataan guru merupakan indikator penting untuk melihat keseimbangan distribusi tenaga pendidik antar sekolah dan wilayah.

Secara keseluruhan, capaian pada kedua indikator menunjukkan bahwa pengukuran kinerja belum berjalan optimal, sehingga belum dapat

memberikan gambaran riil terkait kondisi kualitas dan pemerataan tenaga pendidik pada jenjang SMP. Hal ini menjadi catatan penting, karena tanpa data yang akurat dan terukur, proses evaluasi serta pengambilan kebijakan akan sulit dilakukan secara tepat sasaran.

39. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan" bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan profesional di tingkat satuan pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Indikator capaian diukur melalui Persentase Satuan Pendidikan SMP dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan, dengan target sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaporan dan verifikasi, seluruh satuan pendidikan di jenjang SMP telah memenuhi standar pelaporan administrasi dan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga capaian indikator ini adalah 100%, atau tercapai sepenuhnya.

Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola sekolah di tingkat SMP telah dijalankan dengan baik, mencakup penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan program kerja dan penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan. Keberhasilan ini juga menjadi cerminan dari meningkatnya kapasitas kepala sekolah dan bendahara sekolah dalam mengelola anggaran serta dokumen administrasi pendidikan secara tertib, tepat waktu, dan akurat.

40. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Sasaran Kinerja "Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama", yang difokuskan pada penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal yang relevan dengan kebutuhan daerah serta selaras dengan kurikulum nasional. Pengembangan muatan lokal memiliki peran strategis dalam memperkaya pembelajaran dengan nilai-nilai kearifan lokal, potensi daerah, serta karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.

Indikator yang digunakan adalah Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, dengan target sebesar 1 kurikulum. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 1 kurikulum, sehingga tingkat capaian kinerja

berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dicapai secara optimal sesuai dengan perencanaan.

Capaian ini mengindikasikan bahwa proses pengembangan kurikulum muatan lokal telah dilaksanakan secara efektif, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan daerah, perumusan materi, hingga penetapan kurikulum yang siap diimplementasikan di satuan pendidikan. Kurikulum yang dihasilkan diharapkan mampu mengakomodasi potensi lokal, seperti budaya, keterampilan khas daerah, maupun nilai-nilai kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan ditanamkan kepada peserta didik.

41. Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Sasaran Kinerja “Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama”, yang berfokus pada peningkatan kualitas hasil belajar serta pengembangan potensi peserta didik baik di bidang akademik maupun nonakademik. Sasaran ini menjadi penting karena prestasi peserta didik mencerminkan keberhasilan proses pembelajaran sekaligus efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Indikator yang digunakan adalah Persentase Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik, dengan target sebesar 10%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 10%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dicapai secara optimal sesuai dengan perencanaan.

Capaian ini mengindikasikan bahwa sejumlah peserta didik telah berhasil menunjukkan prestasi yang menonjol, baik dalam bidang akademik seperti olimpiade, lomba mata pelajaran, maupun dalam bidang nonakademik seperti olahraga, seni, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Keberhasilan ini mencerminkan adanya proses pembelajaran yang efektif serta dukungan pembinaan yang terarah dalam mengembangkan bakat dan minat peserta didik.

42. Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Sasaran Kinerja “Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama”, yang diarahkan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berakhlak baik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, disiplin,

tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pengembangan karakter menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan karena berperan dalam membentuk kepribadian dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator yang digunakan adalah Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik, dengan target sebesar 15%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 15%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dicapai secara optimal sesuai dengan perencanaan.

Capaian ini mengindikasikan bahwa sejumlah satuan pendidikan telah berhasil menerapkan program penguatan pendidikan karakter secara efektif, sehingga mampu mencapai kategori nilai karakter yang baik. Keberhasilan ini tercermin dari terbentuknya budaya sekolah yang positif, seperti peningkatan kedisiplinan peserta didik, sikap saling menghargai, kepedulian terhadap lingkungan, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan yang mendukung pembentukan karakter.

43. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan" bertujuan untuk memperkuat kapasitas profesional guru dan tenaga kependidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), guna menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan bermutu.

Indikator keberhasilan diukur melalui Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP yang Meningkatkan Kompetensinya, dengan target sebesar 25%. Hasil realisasi menunjukkan angka yang sama, yakni 25%, sehingga capaian indikator ini mencapai 100% dari target.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kompetensi telah dilaksanakan secara optimal, baik melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, program komunitas belajar (PKB), maupun kegiatan pengembangan profesional lainnya. Program peningkatan kompetensi ini mencakup berbagai aspek, seperti penguatan pedagogik, penguasaan teknologi pembelajaran, implementasi kurikulum, serta penguatan karakter dan nilai-nilai kebhinekaan.

44. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja “Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan” pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang difokuskan pada terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan secara proporsional serta terdistribusi secara merata untuk mendukung kualitas layanan pendidikan.

Indikator pertama adalah Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan target sebesar 1:1. Realisasi capaian menunjukkan rasio 1:1 dengan tingkat capaian 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh satuan pendidikan SMP telah memiliki kepala sekolah definitif sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini sangat mendukung efektivitas tata kelola sekolah, karena setiap satuan pendidikan memiliki pemimpin yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan manajerial, pengambilan keputusan, serta pembinaan tenaga pendidik.

Indikator kedua adalah Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan target sebesar 1:7,6. Realisasi capaian menunjukkan rasio sebesar 1:11,84 dengan tingkat capaian 94,10%. Meskipun capaian kinerja tergolong tinggi, rasio ini menunjukkan bahwa satu orang pengawas masih menangani jumlah sekolah yang lebih banyak dibandingkan standar yang ditetapkan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi intensitas dan kualitas supervisi, baik dalam pembinaan akademik maupun manajerial, sehingga perlu adanya penyesuaian untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan.

Indikator ketiga adalah Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama dengan target sebesar 0,69. Realisasi capaian juga mencapai 0,69 dengan tingkat capaian 100%. Nilai indeks ini menunjukkan bahwa distribusi guru pada jenjang SMP telah berjalan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan. Semakin mendekati angka 1, distribusi guru semakin seimbang, sehingga kesenjangan ketersediaan tenaga pendidik antar sekolah dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, capaian pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, khususnya dalam pemenuhan kepala sekolah dan pemerataan distribusi guru yang telah mencapai target secara optimal. Sementara itu, pada aspek pengawasan masih diperlukan upaya peningkatan agar rasio pengawas terhadap satuan pendidikan dapat lebih ideal.

45. Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Sasaran kinerja “Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama”, yang diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh guru dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4). Pemenuhan kualifikasi ini merupakan salah satu indikator utama dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik serta kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Indikator yang digunakan adalah Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama, dengan target sebesar 95,43%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 95,43%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100,00%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan berhasil dicapai secara optimal sesuai dengan perencanaan.

Capaian ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMP telah memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat profesionalisme tenaga pendidik, yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengelolaan kelas yang lebih efektif, serta kemampuan dalam menyusun dan melaksanakan kurikulum secara optimal.

46. Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Sasaran kinerja “Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas”, yang difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) guna mendukung proses belajar mengajar yang efektif, aman, dan berkualitas.

Indikator pertama adalah Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan target sebesar 78,32%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 78,32%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana pembelajaran telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Ketersediaan sarana pembelajaran seperti buku, media pembelajaran, alat peraga, serta perlengkapan pendukung lainnya telah memenuhi standar yang ditentukan dan mampu menunjang proses pembelajaran secara lebih efektif.

Selanjutnya, indikator kedua yaitu Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) memiliki target sebesar 67,3%. Realisasi capaian juga mencapai 67,3%,

dengan tingkat capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan prasarana pembelajaran, seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya, telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Secara keseluruhan, kedua indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, di mana seluruh target yang ditetapkan telah terpenuhi secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan telah berjalan efektif dan tepat sasaran. Keberhasilan ini tidak terlepas dari perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta pelaksanaan pembangunan dan pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

47. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran”, yang diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar memiliki fasilitas pembelajaran yang lengkap dan dalam kondisi baik guna mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas.

Indikator pertama adalah Persentase satuan pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dengan target sebesar 60,37%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 60,37%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target pemenuhan sarana telah tercapai secara optimal. Ketersediaan sarana pembelajaran yang lengkap dan dalam kondisi baik, seperti buku, alat peraga, media pembelajaran, serta perlengkapan pendukung lainnya, memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran proses pembelajaran serta meningkatkan efektivitas interaksi antara guru dan peserta didik.

Indikator kedua adalah Persentase satuan pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik dengan target sebesar 41,16%. Realisasi capaian juga mencapai 41,16% dengan tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan prasarana pembelajaran, seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, fasilitas sanitasi, serta sarana pendukung lainnya, telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian pada kedua indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana seluruh target yang direncanakan telah terpenuhi secara optimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak telah berjalan efektif dan tepat sasaran. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan kebutuhan yang baik, pengalokasian anggaran yang memadai, serta pelaksanaan pengadaan dan pembangunan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

48. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran”, yang bertujuan untuk memastikan bahwa satuan PAUD memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai, lengkap, dan dalam kondisi baik guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Indikator pertama adalah Persentase satuan pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dengan target sebesar 19,96%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian baru mencapai 3%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 15,03% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana pembelajaran pada PAUD masih sangat terbatas. Sarana yang dimaksud meliputi alat permainan edukatif, media pembelajaran, buku, serta perlengkapan pendukung lainnya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Rendahnya capaian ini mengindikasikan masih banyak satuan PAUD yang belum memiliki sarana yang lengkap dan layak.

Indikator kedua adalah Persentase satuan pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik dengan target sebesar 22,4%. Realisasi capaian mencapai 5% dengan tingkat capaian sebesar 22,32%. Meskipun capaian ini sedikit lebih baik dibandingkan indikator sarana, namun masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan prasarana seperti ruang belajar yang layak, area bermain, fasilitas sanitasi, dan lingkungan belajar yang aman masih belum memadai di sebagian besar satuan PAUD.

Secara keseluruhan, capaian pada kedua indikator ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Keterbatasan ini dapat

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, belum meratanya perhatian terhadap PAUD, serta tingginya kebutuhan fasilitas yang harus dipenuhi di berbagai wilayah.

49. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran”, yang diarahkan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan nonformal dan kesetaraan memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai, lengkap, dan dalam kondisi baik guna mendukung proses pembelajaran yang efektif dan inklusif.

Indikator pertama adalah Persentase satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dengan target sebesar 25%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian mencapai 7,5%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 30% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana pembelajaran masih belum optimal. Sarana yang dimaksud mencakup bahan ajar, media pembelajaran, alat bantu pendidikan, serta perlengkapan pendukung lainnya yang diperlukan dalam kegiatan belajar. Rendahnya capaian ini mengindikasikan bahwa masih banyak satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang belum memiliki sarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran secara maksimal.

Indikator kedua adalah Persentase satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik dengan target sebesar 24%. Realisasi capaian mencapai 10%, dengan tingkat capaian sebesar 41,67%. Meskipun capaian ini lebih tinggi dibandingkan indikator sarana, namun masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan prasarana seperti ruang belajar, fasilitas pendukung, serta lingkungan belajar yang layak masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, capaian pada kedua indikator menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana pada pendidikan nonformal/kesetaraan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan anggaran, kondisi lembaga yang beragam, serta belum meratanya perhatian terhadap pendidikan nonformal menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya capaian ini. Selain itu, karakteristik satuan pendidikan nonformal yang fleksibel dan tersebar di berbagai wilayah juga menjadi tantangan dalam pemenuhan fasilitas yang sesuai standar.

50. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja “Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran”, yang diarahkan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan pada jenjang SMP memiliki fasilitas pembelajaran yang lengkap, layak, dan dalam kondisi baik guna mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas.

Indikator pertama adalah Persentase satuan pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dengan target sebesar 75,94%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 75,94%, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana pembelajaran telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Ketersediaan sarana seperti buku, media pembelajaran, alat peraga, serta perlengkapan pendukung lainnya telah memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif.

Indikator kedua adalah Persentase satuan pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik dengan target sebesar 51,39%. Realisasi capaian juga mencapai 51,39% dengan tingkat capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan prasarana pembelajaran, seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya, telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian pada kedua indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana seluruh target yang telah direncanakan berhasil dicapai secara optimal. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP telah berjalan efektif dan tepat sasaran. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan kebutuhan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta pelaksanaan pengadaan dan pembangunan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

A.2 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

1. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Keberhasilan sasaran kinerja “Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan” tidak terlepas dari beberapa faktor baik faktor penghambat ataupun pendukung di antaranya sebagai berikut :

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 – 6

Faktor Pendorong:

- a. Program pemerintah terkait PAUD dan wajib belajar 1 tahun prasekolah
Kebijakan pemerintah mengenai penguatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah menjadi dorongan utama dalam meningkatkan partisipasi anak usia 5–6 tahun pada layanan pendidikan. Program ini memberikan arah kebijakan yang jelas bagi pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta masyarakat untuk memastikan anak memperoleh stimulasi pendidikan sebelum memasuki jenjang SD. Selain itu, dukungan berupa bantuan operasional, pembinaan kelembagaan, dan regulasi teknis turut memperkuat penyelenggaraan layanan PAUD.
- b. Peran aktif Bunda PAUD, PKK, dan kader posyandu
Keterlibatan Bunda PAUD, organisasi PKK, dan kader posyandu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan usia dini. Melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan keluarga, dan edukasi kepada orang tua, informasi mengenai manfaat PAUD dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan lingkungan keluarga. Sinergi lintas sektor ini juga mendukung pendataan anak usia dini serta mendorong anak untuk mengikuti layanan PAUD sebelum masuk SD.
- c. Dukungan pemerintah desa terhadap layanan PAUD
Pemerintah desa yang memberikan dukungan melalui alokasi dana desa, penyediaan sarana prasarana, maupun dukungan operasional lembaga PAUD menjadi faktor penting dalam pengembangan layanan pendidikan usia dini. Dukungan tersebut membantu keberlangsungan kegiatan pembelajaran, pemenuhan fasilitas dasar, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan PAUD, khususnya di wilayah pedesaan.
- d. Sosialisasi transisi PAUD ke SD
Pelaksanaan sosialisasi mengenai transisi PAUD ke SD yang menyenangkan membantu meningkatkan pemahaman orang tua dan sekolah tentang pentingnya kesiapan anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Program ini mendorong adanya kesinambungan

layanan pendidikan antara PAUD dan SD sehingga anak memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangannya.

Faktor Penghambat:

- a. Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan usia dini (usia 5–6 tahun)

Sebagian orang tua masih beranggapan bahwa pendidikan formal baru penting ketika anak memasuki SD. Kondisi ini menyebabkan anak usia 5–6 tahun belum seluruhnya mengikuti layanan PAUD atau TK. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat PAUD terhadap perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan kesiapan belajar anak menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi.

- b. Sebaran layanan PAUD/TK belum merata di beberapa desa

Masih terdapat wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan PAUD/TK, terutama di desa terpencil atau wilayah dengan jumlah penduduk sedikit. Kondisi ini menyebabkan sebagian anak kesulitan memperoleh layanan pendidikan usia dini karena jarak tempuh yang jauh dan keterbatasan sarana transportasi.

- c. Data anak usia 5–6 tahun belum sepenuhnya akurat (sinkronisasi Dukcapil & Dapodik)

Ketidaksesuaian data antara sistem kependudukan dan data pendidikan menyebabkan perencanaan program, penyaluran bantuan, dan pemetaan kebutuhan layanan PAUD belum optimal. Data yang belum sinkron juga menyulitkan identifikasi anak yang belum terlayani pendidikan usia dini.

Solusi Alternatif:

- a. Melaksanakan sosialisasi pentingnya PAUD pada kegiatan awal tahun melalui posyandu, PKK, dan pertemuan desa

Sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan masyarakat yang sudah rutin dilaksanakan pada awal tahun, seperti kegiatan posyandu, pertemuan PKK, dan forum desa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan usia dini bagi perkembangan anak usia 5–6 tahun serta kesiapan memasuki jenjang SD. Dengan pendekatan langsung kepada masyarakat, informasi dapat lebih mudah diterima dan menjangkau keluarga yang belum menyekolahkan anaknya di PAUD.

- b. Menyebarluaskan media edukasi berupa leaflet, banner, dan informasi media sosial terkait manfaat PAUD bagi kesiapan anak masuk SD

Penyebaran media informasi dilakukan untuk mendukung sosialisasi secara lebih luas dan berkelanjutan. Materi edukasi berisi manfaat PAUD terhadap perkembangan karakter, kemampuan sosial, emosional, dan kesiapan belajar anak. Pemanfaatan media sosial juga membantu penyampaian informasi secara cepat kepada masyarakat, khususnya orang tua usia produktif.

- c. Mengidentifikasi data ganda atau data anak yang belum masuk dalam Dapodik sebagai dasar perbaikan data pada triwulan berikutnya

Identifikasi dilakukan agar data peserta didik lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program, penyaluran bantuan, serta evaluasi capaian partisipasi PAUD. Hasil identifikasi menjadi bahan tindak lanjut perbaikan data secara bertahap.

2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15

Faktor Pendorong:

- a. Dukungan dana BOS dan bantuan sosial pendidikan (PIP, dll)

Adanya dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta bantuan sosial pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik. Bantuan tersebut mendukung operasional sekolah, pemenuhan kebutuhan belajar siswa, serta membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan dasar. Dukungan pembiayaan ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga partisipasi sekolah anak usia 7–15 tahun.

- b. Peran aktif sekolah, pengawas, dan pemerintah desa

Keterlibatan aktif sekolah, pengawas pendidikan, dan pemerintah desa membantu memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap keberlangsungan pendidikan anak usia sekolah. Sekolah bersama pemerintah desa dapat melakukan pendekatan kepada orang tua maupun peserta didik yang berisiko putus sekolah sehingga permasalahan pendidikan dapat lebih cepat ditindaklanjuti.

- c. Ketersediaan SD dan SMP relatif mencukupi

Jumlah satuan pendidikan SD dan SMP yang relatif memadai membantu meningkatkan akses layanan pendidikan dasar bagi masyarakat. Ketersediaan sekolah yang tersebar di berbagai wilayah

memudahkan peserta didik memperoleh layanan pendidikan dan mengurangi hambatan jarak tempuh menuju sekolah.

Faktor Penghambat:

- a. Data anak usia 7–15 tahun belum sepenuhnya sinkron (Dapodik, Dukcapil, dan data desa)

Perbedaan data antara Dapodik, Dukcapil, dan data desa menyebabkan identifikasi anak usia sekolah belum sepenuhnya akurat. Kondisi ini berdampak pada perencanaan program, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), dan penyaluran bantuan pendidikan yang belum optimal.

- b. Masih terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS)

Masih adanya anak usia sekolah yang belum terdaftar atau tidak melanjutkan pendidikan menjadi hambatan dalam peningkatan partisipasi pendidikan dasar. ATS dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan keluarga, perpindahan domisili, maupun rendahnya motivasi belajar.

- c. Faktor ekonomi keluarga (anak membantu orang tua)

Sebagian anak usia sekolah terlibat membantu pekerjaan orang tua sehingga waktu dan perhatian terhadap pendidikan menjadi berkurang. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas juga memengaruhi kemampuan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.

- d. Perpindahan penduduk yang belum terdata

Mobilitas penduduk yang cukup tinggi menyebabkan perubahan data anak usia sekolah belum seluruhnya tercatat dengan baik. Akibatnya terdapat anak yang belum teridentifikasi status sekolahnya atau belum tercatat pada satuan pendidikan di wilayah tempat tinggal baru.

Solusi Alternatif:

- a. Melaksanakan koordinasi awal pemutakhiran data anak usia sekolah antara Dinas Pendidikan, Dukcapil, pemerintah desa, dan satuan pendidikan

Koordinasi dilakukan untuk menyamakan dan memperbaiki data anak usia 7–15 tahun sebagai dasar perencanaan program pendidikan. Kegiatan ini difokuskan pada identifikasi perbedaan data antar sistem pendataan serta penyiapan langkah verifikasi di lapangan.

- b. Melakukan verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) bersama sekolah dan pemerintah desa

Verifikasi dilakukan untuk memastikan kondisi riil ATS, termasuk penyebab anak tidak bersekolah dan lokasi keberadaannya. Pendataan awal ini menjadi dasar penyusunan langkah penanganan dan pendekatan kepada keluarga peserta didik.

- c. Mengoptimalkan sosialisasi pentingnya pendidikan dasar kepada orang tua dan masyarakat

Sosialisasi dilakukan melalui sekolah, pemerintah desa, dan kegiatan masyarakat guna meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi masa depan anak. Kegiatan ini juga menjadi sarana penyampaian informasi terkait bantuan pendidikan yang tersedia.

- d. Mengidentifikasi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang berpotensi membutuhkan bantuan pendidikan

Identifikasi dilakukan oleh sekolah bersama pemerintah desa untuk memastikan peserta didik yang membutuhkan bantuan dapat diusulkan dalam program bantuan pendidikan seperti PIP maupun bantuan daerah lainnya.

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan

Faktor Pendorong:

- a. Program pemerintah untuk penuntasan wajib belajar 12 tahun

Kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun menjadi dasar penguatan layanan pendidikan, termasuk melalui jalur pendidikan kesetaraan. Program ini mendorong pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal. Dukungan kebijakan tersebut membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak maupun masyarakat usia sekolah yang putus sekolah.

- b. Fleksibilitas waktu belajar pada pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan memiliki sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dibanding pendidikan formal, baik dari sisi waktu maupun metode belajar. Kondisi ini memudahkan peserta didik yang bekerja, membantu orang tua, atau memiliki keterbatasan waktu untuk tetap memperoleh layanan pendidikan. Fleksibilitas tersebut dapat meningkatkan minat belajar dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti sekolah formal secara reguler.

- c. Dukungan dari PKBM dan lembaga nonformal

Peran aktif Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga pendidikan nonformal membantu memperluas akses layanan pendidikan kesetaraan. PKBM menjadi sarana penting dalam menjangkau masyarakat putus sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang lebih dekat dengan lingkungan masyarakat.

d. Adanya bantuan operasional pendidikan kesetaraan

Bantuan operasional pendidikan kesetaraan membantu mendukung kegiatan pembelajaran, penyediaan sarana dasar, serta keberlangsungan operasional lembaga penyelenggara. Dukungan pembiayaan tersebut membantu PKBM dan lembaga nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Faktor Penghambat:

a. Rendahnya minat masyarakat mengikuti pendidikan kesetaraan

Sebagian masyarakat masih belum memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan. Faktor ekonomi, kesibukan bekerja, serta kurangnya pemahaman mengenai manfaat ijazah kesetaraan menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat.

b. Stigma bahwa jalur kesetaraan kurang diminati dibanding sekolah formal

Pendidikan kesetaraan masih dipandang sebagai pilihan kedua dibanding sekolah formal. Stigma tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa kurang percaya diri atau kurang tertarik mengikuti program kesetaraan meskipun memiliki kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan.

c. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7–18 tahun belum sepenuhnya akurat

Ketidaksesuaian data ATS antara sumber pendataan menyebabkan sasaran layanan pendidikan kesetaraan belum sepenuhnya tepat. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penjangkauan peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan nonformal.

e. Keterbatasan jumlah PKBM/lembaga penyelenggara kesetaraan di beberapa wilayah

Beberapa wilayah masih memiliki keterbatasan akses terhadap PKBM atau lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengikuti pembelajaran sehingga memengaruhi minat dan keberlanjutan belajar.

Solusi Alternatif:

- a. Melaksanakan sosialisasi pendidikan kesetaraan kepada masyarakat dan orang tua

Sosialisasi dilakukan melalui pemerintah desa, sekolah, PKBM, dan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari penuntasan wajib belajar 12 tahun. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan informasi mengenai manfaat ijazah kesetaraan bagi pendidikan lanjutan maupun dunia kerja.

- b. Mengoptimalkan peran PKBM dan lembaga nonformal dalam penjangkauan calon peserta didik

PKBM didorong untuk melakukan pendekatan aktif kepada masyarakat dan anak putus sekolah melalui pendataan lingkungan sekitar, koordinasi dengan pemerintah desa, serta kunjungan langsung kepada calon peserta didik yang berpotensi mengikuti program kesetaraan.

- c. Melakukan verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7–18 tahun

Verifikasi data dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan, pemerintah desa, satuan pendidikan, dan PKBM untuk memastikan data ATS lebih akurat. Langkah ini bertujuan agar sasaran layanan pendidikan kesetaraan dapat ditetapkan secara lebih tepat.

- d. Melakukan pemetaan wilayah yang belum terjangkau layanan pendidikan kesetaraan

Pemetaan dilakukan untuk mengetahui daerah yang masih minim akses terhadap PKBM atau layanan pendidikan nonformal. Hasil pemetaan menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pengembangan layanan pendidikan kesetaraan pada triwulan berikutnya.

4) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini

Faktor Pendorong:

- a. Program PAUD dari pemerintah daerah

Adanya program pemerintah daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan layanan pendidikan usia dini. Program tersebut meliputi pembinaan lembaga PAUD, dukungan operasional, peningkatan kompetensi pendidik, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Dukungan kebijakan daerah membantu memperkuat akses dan kualitas layanan PAUD di berbagai wilayah.

b. Dukungan pemerintah desa dalam penyelenggaraan PAUD

Pemerintah desa turut mendukung penyelenggaraan PAUD melalui bantuan sarana prasarana, dukungan operasional, maupun pemanfaatan fasilitas desa untuk kegiatan pembelajaran PAUD. Dukungan tersebut membantu memperluas akses layanan pendidikan usia dini, khususnya di wilayah pedesaan.

c. Sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini

Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat PAUD terhadap perkembangan anak. Kegiatan sosialisasi juga mendorong orang tua untuk mulai menyekolahkan anak sejak usia dini guna mendukung kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar.

Faktor Penghambat:

a. Masih terdapat anak usia PAUD yang belum terlayani di lembaga PAUD

Sebagian anak usia 3–6 tahun belum mengikuti layanan PAUD karena keterbatasan akses, kondisi ekonomi keluarga, atau belum tersedianya lembaga PAUD di wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan belum optimalnya cakupan layanan pendidikan usia dini.

b. Kesadaran orang tua terhadap PAUD masih bervariasi

Sebagian orang tua masih menganggap PAUD belum menjadi kebutuhan utama sebelum anak masuk SD. Rendahnya pemahaman mengenai pentingnya stimulasi dan pendidikan usia dini memengaruhi tingkat partisipasi anak dalam layanan PAUD.

c. Keterbatasan jumlah dan kualitas pendidik PAUD di beberapa wilayah

Beberapa wilayah masih mengalami kekurangan tenaga pendidik PAUD, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas layanan pembelajaran dan pendampingan perkembangan anak usia dini.

Solusi Alternatif:

a. Mengoptimalkan sosialisasi pentingnya PAUD kepada orang tua dan masyarakat

Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan posyandu, PKK, pertemuan desa, dan media informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai manfaat PAUD terhadap perkembangan dan kesiapan belajar anak.

- b. Mendorong koordinasi dengan pemerintah desa terkait dukungan penyelenggaraan PAUD

Koordinasi dilakukan untuk memperkuat dukungan desa dalam penyediaan sarana, fasilitas belajar, maupun dukungan operasional kegiatan PAUD sehingga akses layanan pendidikan usia dini dapat lebih merata.

- c. Melaksanakan pendataan tenaga pendidik PAUD berdasarkan jumlah dan kualifikasi

Pendataan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan tenaga pendidik di setiap wilayah serta menjadi dasar dalam penyusunan program pembinaan dan peningkatan kompetensi guru PAUD.

5) Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar

Faktor Pendorong:

- a. Dukungan dana BOS untuk operasional sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membantu sekolah dasar dalam memenuhi kebutuhan operasional pembelajaran, pemeliharaan sarana prasarana, serta penyediaan layanan pendidikan bagi peserta didik. Dukungan dana BOS juga membantu mengurangi beban biaya pendidikan sehingga akses pendidikan dasar bagi anak usia 7–12 tahun dapat lebih terjangkau.

- b. Ketersediaan sekolah dasar yang relatif merata

Sebaran sekolah dasar yang relatif merata di berbagai wilayah mendukung kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat. Ketersediaan sekolah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal membantu mengurangi hambatan jarak tempuh dan meningkatkan peluang anak usia sekolah dasar untuk memperoleh layanan pendidikan.

- c. Peran aktif kepala sekolah dan perangkat desa

Kepala sekolah dan perangkat desa memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi pendidikan dasar melalui pemantauan anak usia sekolah, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi terkait peserta didik yang belum bersekolah atau berisiko putus sekolah. Kolaborasi tersebut membantu memperkuat pengawasan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Faktor Penghambat:

a. Masih terdapat anak usia SD yang belum terdaftar di sekolah

Sebagian anak usia sekolah dasar masih belum terdaftar di satuan pendidikan karena faktor ekonomi, perpindahan domisili, maupun rendahnya perhatian keluarga terhadap pendidikan. Hal ini memengaruhi capaian partisipasi pendidikan dasar.

b. Perpindahan penduduk yang belum terdata

Mobilitas penduduk yang cukup tinggi menyebabkan perubahan data anak usia sekolah belum seluruhnya tercatat secara cepat dan akurat. Akibatnya terdapat anak yang belum terpantau status pendidikannya setelah berpindah wilayah.

c. Kesadaran sebagian orang tua terhadap pendidikan dasar masih rendah

Sebagian masyarakat masih belum memiliki kesadaran penuh mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi masa depan anak. Kondisi ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan anak usia sekolah dasar.

Solusi Alternatif:

a. Mengoptimalkan sosialisasi pentingnya pendidikan dasar kepada masyarakat dan orang tua

Sosialisasi dilakukan melalui sekolah, pemerintah desa, dan kegiatan masyarakat guna meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan dasar serta kewajiban menyekolahkan anak usia SD.

b. Melaksanakan pemantauan awal terhadap anak usia SD yang belum terdaftar atau berisiko tidak melanjutkan sekolah

Pemantauan dilakukan oleh sekolah bersama pemerintah desa untuk mengidentifikasi penyebab anak belum bersekolah sehingga dapat dilakukan pendekatan dan pendampingan secara lebih cepat.

c. Meningkatkan koordinasi pelaporan perpindahan peserta didik antarwilayah dan antar sekolah

Koordinasi dilakukan agar data peserta didik yang berpindah domisili dapat segera diperbarui sehingga status pendidikan anak tetap terpantau dan tidak menimbulkan data anak tidak sekolah.

6) Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama

Faktor Pendorong:

a. Dukungan dana BOS dan bantuan sosial pendidikan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan sosial pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) membantu mendukung keberlangsungan pendidikan peserta didik pada jenjang SMP. Dukungan tersebut membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional pembelajaran serta meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu sehingga peserta didik dapat tetap melanjutkan pendidikan.

b. Ketersediaan SMP negeri dan swasta

Tersedianya SMP negeri dan swasta di berbagai wilayah memberikan alternatif pilihan pendidikan bagi masyarakat. Keberadaan sekolah negeri dan swasta membantu memperluas akses layanan pendidikan menengah pertama serta mendukung peningkatan angka partisipasi sekolah usia 13–15 tahun.

c. Peran aktif sekolah dan pemerintah desa

Sekolah dan pemerintah desa berperan aktif dalam memantau keberlanjutan pendidikan lulusan SD, melakukan pendekatan kepada keluarga peserta didik, serta membantu menyosialisasikan pentingnya pendidikan menengah pertama. Kolaborasi tersebut membantu mendorong anak usia sekolah agar tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Faktor Penghambat:

a. Data lulusan SD yang belum sepenuhnya terlacak melanjutkan ke SMP

Belum optimalnya pelacakan data lulusan SD menyebabkan masih terdapat peserta didik yang belum teridentifikasi status kelanjutan pendidikannya. Kondisi ini menyulitkan pemetaan anak yang melanjutkan sekolah maupun yang berpotensi menjadi Anak Tidak Sekolah (ATS).

b. Masih terdapat anak usia 13–15 tahun yang tidak melanjutkan sekolah

Sebagian anak usia SMP tidak melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi, lingkungan keluarga, rendahnya motivasi belajar, maupun kondisi sosial tertentu. Hal ini berdampak pada capaian partisipasi pendidikan menengah pertama.

c. Faktor ekonomi keluarga

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas menyebabkan sebagian anak membantu pekerjaan orang tua atau mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti transportasi, perlengkapan sekolah, dan biaya pendukung lainnya.

Solusi Alternatif:

- a. Melaksanakan koordinasi awal pelacakan lulusan SD bersama sekolah, pemerintah desa, dan operator pendidikan

Koordinasi dilakukan untuk memastikan data lulusan SD yang melanjutkan ke SMP dapat terdata dengan lebih baik. Kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi peserta didik yang belum terdaftar di jenjang SMP.
- b. Melakukan verifikasi dan validasi data anak usia 13–15 tahun yang belum melanjutkan sekolah

Verifikasi dilakukan bersama sekolah dan pemerintah desa untuk mengetahui kondisi riil anak usia SMP yang belum bersekolah serta faktor penyebabnya sebagai dasar tindak lanjut penanganan.
- c. Mengoptimalkan sosialisasi pentingnya pendidikan menengah pertama kepada orang tua dan masyarakat

Sosialisasi dilakukan melalui sekolah, desa, dan kegiatan masyarakat guna meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMP sebagai bagian dari wajib belajar.
- d. Mengidentifikasi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang berpotensi membutuhkan bantuan pendidikan

Sekolah bersama pemerintah desa melakukan pendataan awal terhadap peserta didik rentan putus sekolah agar dapat diusulkan dalam program bantuan pendidikan seperti PIP maupun bantuan daerah lainnya.

7) Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini

Faktor Pendorong:

- a. Peran aktif Bunda PAUD dan kader PKK

Bunda PAUD dan kader PKK memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini. Melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, posyandu, dan pertemuan warga, informasi mengenai manfaat PAUD dapat disampaikan secara langsung kepada orang tua sehingga mendorong partisipasi anak usia dini dalam layanan pendidikan.
- b. Adanya lembaga PAUD nonformal yang berkembang di masyarakat

Berkembangnya lembaga PAUD nonformal di lingkungan masyarakat membantu memperluas akses layanan pendidikan usia dini, khususnya

di wilayah yang belum memiliki layanan PAUD formal. Kehadiran lembaga nonformal tersebut memberikan alternatif layanan pendidikan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

c. Sosialisasi pentingnya pendidikan usia dini mulai meningkat

Pelaksanaan sosialisasi yang semakin aktif oleh pemerintah daerah, satuan PAUD, dan organisasi masyarakat membantu meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya stimulasi dan pendidikan usia dini. Kondisi ini turut mendorong peningkatan minat masyarakat untuk mengikutsertakan anak pada layanan PAUD.

Faktor Penghambat:

a. Masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya PAUD

Sebagian orang tua masih menganggap PAUD belum menjadi kebutuhan utama sebelum anak memasuki jenjang SD. Rendahnya pemahaman mengenai manfaat PAUD terhadap perkembangan karakter, kemampuan sosial, emosional, dan kesiapan belajar anak menyebabkan partisipasi PAUD belum optimal.

b. Sebaran lembaga PAUD belum merata di beberapa desa

Masih terdapat desa atau wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan PAUD karena jumlah lembaga yang belum memadai. Kondisi ini menyebabkan sebagian anak usia dini belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal.

c. Keterbatasan tenaga pendidik PAUD berkualifikasi

Beberapa lembaga PAUD masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi pendidikan. Kondisi ini berdampak pada kualitas layanan pembelajaran dan pendampingan perkembangan anak usia dini.

Solusi Alternatif:

a. Melakukan pemetaan wilayah yang belum memiliki atau masih kekurangan layanan PAUD

Pemetaan dilakukan untuk mengetahui desa yang akses layanan PAUD-nya masih terbatas sehingga dapat menjadi dasar perencanaan pengembangan layanan PAUD pada triwulan berikutnya.

b. Melakukan verifikasi dan validasi data anak usia PAUD melalui pendataan lapangan

Pendataan dilakukan bersama pemerintah desa, kader PKK, dan satuan PAUD guna memastikan kondisi riil anak usia dini yang sudah maupun belum mengikuti layanan PAUD.

- c. Melaksanakan pendataan tenaga pendidik PAUD berdasarkan jumlah dan kualifikasi

Pendataan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing wilayah serta menjadi dasar penyusunan program pembinaan dan peningkatan kompetensi guru PAUD.

8) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar

Faktor Pendorong:

- a. Program wajib belajar 6 tahun

Kebijakan wajib belajar 6 tahun menjadi dasar dalam mendorong seluruh anak usia sekolah dasar memperoleh akses pendidikan. Program ini memperkuat komitmen pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan anak usia 7–12 tahun dapat mengikuti pendidikan dasar secara merata.

- b. Peran aktif sekolah, pengawas, dan pemerintah desa

Sekolah, pengawas pendidikan, dan pemerintah desa berperan aktif dalam memantau keberadaan anak usia sekolah dasar, melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan, serta membantu menjangkau anak yang belum bersekolah atau berisiko putus sekolah.

Faktor Penghambat:

- a. Ketidaksiesuaian usia masuk sekolah (terlambat/lebih awal)

Masih terdapat anak yang masuk sekolah tidak sesuai usia ideal sehingga memengaruhi akurasi data partisipasi pendidikan dasar. Kondisi ini juga berdampak pada kesiapan belajar anak dan proses pembelajaran di sekolah.

- b. Faktor sosial ekonomi keluarga

Kondisi sosial ekonomi keluarga yang terbatas menyebabkan sebagian orang tua belum mampu memenuhi kebutuhan pendukung pendidikan anak atau belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama keluarga.

Solusi Alternatif:

- a. Melakukan identifikasi usia peserta didik baru agar sesuai ketentuan usia masuk sekolah dasar

Identifikasi dilakukan pada proses pendataan peserta didik baru untuk memastikan kesesuaian usia masuk sekolah sehingga data pendidikan dasar dapat lebih tertib dan akurat.

- b. Mengidentifikasi peserta didik dari keluarga rentan yang membutuhkan dukungan bantuan pendidikan

Sekolah bersama pemerintah desa melakukan pendataan awal terhadap peserta didik dari keluarga kurang mampu agar dapat diusulkan menerima bantuan pendidikan dan mencegah risiko anak tidak bersekolah.

9) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama

Faktor Pendorong:

- a. Program wajib belajar 9 tahun

Kebijakan wajib belajar 9 tahun menjadi dasar dalam mendorong seluruh anak usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP. Program ini memperkuat komitmen pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan menengah pertama.

- b. Dukungan dana BOS dan bantuan sosial pendidikan (PIP)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) membantu meringankan beban biaya pendidikan peserta didik serta mendukung kebutuhan operasional sekolah. Dukungan tersebut membantu menjaga keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Faktor Penghambat:

- a. Masih terdapat anak usia SMP yang tidak melanjutkan dari SD

Sebagian lulusan SD belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena faktor ekonomi, rendahnya motivasi belajar, kondisi keluarga, atau lingkungan sosial yang kurang mendukung pendidikan.

- b. Faktor ekonomi keluarga (anak bekerja)

Kondisi ekonomi keluarga menyebabkan sebagian anak membantu pekerjaan orang tua atau bekerja sehingga pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Hal ini berdampak pada rendahnya keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMP.

- c. Perpindahan penduduk yang belum terdata

Mobilitas penduduk yang cukup tinggi menyebabkan perubahan data anak usia sekolah belum seluruhnya tercatat dengan baik. Akibatnya

terdapat anak yang belum terpantau status pendidikannya setelah berpindah wilayah.

Solusi Alternatif:

- a. Melakukan verifikasi dan validasi data lulusan SD yang belum melanjutkan ke SMP

Pendataan dilakukan bersama sekolah dan pemerintah desa untuk mengetahui kondisi riil anak usia SMP yang belum melanjutkan pendidikan serta faktor penyebabnya.

- b. Melaksanakan pemantauan awal terhadap anak usia SMP yang berisiko putus sekolah

Pemantauan dilakukan terhadap peserta didik dengan tingkat kehadiran rendah, kondisi ekonomi rentan, atau permasalahan sosial lainnya agar dapat segera dilakukan pendekatan dan pendampingan.

- c. Mengidentifikasi peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk usulan bantuan pendidikan

Sekolah bersama pemerintah desa melakukan pendataan awal terhadap peserta didik yang membutuhkan bantuan pendidikan agar dapat diusulkan menerima Program Indonesia Pintar (PIP) maupun bantuan pendidikan lainnya.

- d. Meningkatkan koordinasi pelaporan perpindahan peserta didik antarwilayah dan antar sekolah

Koordinasi dilakukan agar perubahan data peserta didik yang berpindah domisili dapat segera diperbarui sehingga status pendidikan anak tetap terpantau dan tidak menimbulkan data anak tidak sekolah baru.

2. Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

Sasaran kinerja “Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan” dengan indikator kinerja Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan memiliki beberapa faktor dalam mencapai target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung

- a. Dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Banjar

Pemerintah Kabupaten Banjar memberikan dukungan melalui kebijakan daerah yang mendorong peningkatan layanan pendidikan, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dukungan ini tercermin dalam penganggaran, penetapan prioritas program, serta penguatan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan.

d. Komitmen pimpinan dan jajaran Dinas Pendidikan

Pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan capaian indikator pendidikan, khususnya pemenuhan SPM. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi internal, monitoring berkala, serta upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan pendidikan.

c. Koordinasi awal dengan pengawas sekolah

Telah dilakukan koordinasi awal dengan pengawas sekolah sebagai perpanjangan tangan dinas di lapangan. Peran pengawas sangat strategis dalam memastikan pelaksanaan kebijakan, pembinaan satuan pendidikan, serta pengumpulan data SPM secara lebih terarah dan sistematis.

Faktor Penghambat

a. Rapor Pendidikan Tahun 2026 belum dirilis

Belum tersedianya Rapor Pendidikan Tahun 2026 menyebabkan indikator capaian belum dapat disajikan secara resmi dan terstandar. Hal ini berdampak pada keterbatasan dalam melakukan pengukuran kinerja berbasis data terkini.

b. Pemahaman indikator SPM belum merata

Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman di kalangan satuan pendidikan terkait definisi operasional, metode pengukuran, dan pelaporan indikator SPM. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penyajian data.

c. Validitas data SPM belum optimal

Data SPM yang bersumber dari satuan pendidikan (PAUD, SD, SMP) belum seluruhnya valid dan terverifikasi secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pengelola data serta belum optimalnya proses pemutakhiran data di tingkat satuan pendidikan.

Solusi Alternatif

a. Penggunaan data sementara (baseline)

Menggunakan data capaian tahun sebelumnya atau data internal sebagai acuan sementara dalam penyusunan laporan kinerja, dengan tetap mencantumkan keterangan bahwa data akan diperbarui setelah Rapor Pendidikan dirilis.

b. Penguatan sosialisasi dan bimbingan teknis SPM

Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara terstruktur kepada satuan pendidikan terkait indikator SPM, guna menyamakan pemahaman dan meningkatkan kualitas pelaporan data.

c. Peningkatan peran pengawas sekolah

Mengoptimalkan peran pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan, verifikasi, dan validasi data SPM di satuan pendidikan, sehingga kualitas data yang dihimpun lebih akurat.

d. Verifikasi dan validasi data secara berjenjang

Menerapkan mekanisme verifikasi dan validasi data secara berjenjang di tingkat sekolah dan dinas, termasuk melalui monitoring rutin.

e. Pemanfaatan data internal dan sistem pendukung

Mengoptimalkan penggunaan data dari Dapodik dan sumber internal lainnya sebagai bahan analisis sementara, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

f. Penguatan koordinasi lintas unit kerja

Meningkatkan koordinasi antar bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar serta dengan instansi terkait untuk mempercepat konsolidasi dan ketersediaan data awal.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target sasaran kinerja “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” di pengaruhi beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor pendukung, di antaranya sebagai berikut:

Faktor Pendukung

a. Komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas kinerja

Pimpinan perangkat daerah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penguatan implementasi SAKIP. Hal ini tercermin dari arahan strategis, pengawasan

terhadap capaian kinerja, serta dorongan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan.

b. Dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) tersusun dan selaras

Dokumen perencanaan telah disusun secara sistematis dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga terdapat keselarasan antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.

c. Implementasi SAKIP mulai konsisten (perencanaan–pelaporan)

Penerapan SAKIP menunjukkan tren yang semakin konsisten, khususnya dalam keterkaitan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelaporan kinerja, sehingga mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas.

d. Ketersediaan indikator kinerja pada program dan kegiatan

Setiap program dan kegiatan telah dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur capaian, sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara rutin, baik melalui rapat internal maupun evaluasi berkala, sehingga memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Faktor Penghambat

a. Capaian kinerja baru diketahui pada akhir tahun (TW IV)

Sebagian indikator kinerja bersifat kumulatif sehingga capaian optimalnya baru dapat diukur pada akhir tahun anggaran. Hal ini membatasi kemampuan dalam melakukan evaluasi dini dan pengambilan keputusan secara cepat.

b. Kualitas indikator kinerja belum sepenuhnya berbasis outcome

Indikator kinerja yang digunakan masih didominasi oleh output, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan hasil (outcome) atau dampak dari pelaksanaan program.

c. Keterkaitan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan belum optimal

Masih terdapat ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan, alokasi anggaran, dan pelaporan kinerja, yang berpotensi mengurangi efektivitas pencapaian sasaran.

d. Data kinerja belum akurat dan belum terintegrasi

Ketersediaan data kinerja masih menghadapi kendala dalam hal akurasi, kelengkapan, dan integrasi antar bidang, sehingga mempengaruhi kualitas pelaporan.

e. Pemanfaatan hasil evaluasi belum maksimal

Hasil monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pengambilan kebijakan.

f. Kapasitas SDM dalam penyusunan SAKIP masih terbatas

Sebagian SDM belum memiliki pemahaman teknis yang memadai dalam penyusunan dokumen SAKIP, terutama dalam perumusan indikator dan analisis kinerja.

g. Konsistensi pelaporan antar bidang belum merata

Terdapat perbedaan tingkat konsistensi dalam pengisian dan pelaporan kinerja antar bidang, sehingga mempengaruhi keseragaman dan kualitas data.

Solusi Alternatif

1. Pengembangan indikator triwulanan

Menyusun indikator antara atau indikator triwulanan untuk memantau progres capaian kinerja sebelum akhir tahun, sehingga evaluasi dapat dilakukan lebih dini.

b. Penyempurnaan indikator berbasis outcome

Melakukan reviu dan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada outcome dan dampak, termasuk penyusunan cascading kinerja yang lebih jelas.

c. Penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran

Meningkatkan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan melalui forum perencanaan dan reviu internal secara berkala.

d. Pengembangan sistem data kinerja terintegrasi

Mendorong penggunaan sistem informasi kinerja yang terintegrasi antar bidang untuk meningkatkan akurasi, konsistensi, dan kemudahan akses data.

e. Optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi

Menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar utama dalam penyusunan perencanaan berikutnya, termasuk penetapan langkah perbaikan yang terukur.

f. Peningkatan kapasitas SDM

Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait penyusunan SAKIP, khususnya dalam perumusan indikator kinerja dan analisis capaian.

g. Standarisasi mekanisme pelaporan kinerja

Menyusun pedoman dan format baku pelaporan kinerja yang berlaku untuk seluruh bidang, disertai dengan penguatan fungsi verifikasi internal.

4. Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah

Sasaran kinerja “Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan memiliki beberapa faktor dalam mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Faktor Penghambat

a. Capaian kinerja baru optimal pada akhir tahun (Triwulan IV)

Sebagian indikator kinerja bersifat kumulatif sehingga realisasi capaian baru dapat diketahui secara utuh pada akhir tahun anggaran. Kondisi ini membatasi ruang evaluasi dini pada Triwulan I.

b. Kepatuhan terhadap SOP belum konsisten

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang/unit belum seragam, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan dan kualitas layanan.

c. Kualitas perencanaan dan pelaporan belum seragam

Masih terdapat variasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja antar bidang, baik dari sisi substansi maupun ketepatan indikator.

d. Data pendidikan belum sepenuhnya valid dan terintegrasi

Ketersediaan data masih menghadapi kendala dalam hal validitas, kelengkapan, serta integrasi antar sistem dan antar bidang, sehingga mempengaruhi kualitas analisis kinerja.

e. Keterbatasan SDM pada fungsi perencanaan, evaluasi, dan pengawasan

Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani fungsi perencanaan, evaluasi, dan pengawasan masih terbatas, sehingga berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tugas.

f. Pengendalian internal (SPIP) belum optimal

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum berjalan secara menyeluruh dan konsisten, khususnya dalam pengendalian risiko dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Faktor Pendukung

a. Komitmen pimpinan terhadap tata kelola pendidikan yang akuntabel

Pimpinan menunjukkan komitmen dalam mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel, termasuk penguatan fungsi perencanaan, pelaporan, dan pengawasan.

b. Ketersediaan SOP layanan

Telah tersedia SOP pada berbagai layanan utama (perencanaan, BOS, kepegawaian, dan pengawasan) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Implementasi SAKIP dan SPIP mulai berjalan

Penerapan SAKIP dan SPIP di lingkungan dinas telah berjalan dan menjadi dasar dalam peningkatan akuntabilitas serta pengendalian internal.

d. Koordinasi aktif dengan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan

Koordinasi yang intensif dengan satuan pendidikan dan pihak terkait mendukung kelancaran pelaksanaan program dan pengumpulan data.

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program

Kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan secara berkala sebagai sarana pengendalian dan perbaikan kinerja.

Solusi Alternatif

a. Penetapan indikator triwulanan

Menyusun target antara untuk setiap indikator kinerja guna mengukur progres awal, sehingga evaluasi tidak hanya menunggu capaian akhir tahun.

b. Penguatan kepatuhan terhadap SOP

Melakukan sosialisasi ulang SOP kepada seluruh bidang/unit serta menerapkan checklist kepatuhan pada pelaksanaan kegiatan di Triwulan I.

c. Penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaporan

Melaksanakan reviu internal awal tahun terhadap Renja, PK, dan indikator kinerja untuk memastikan keselarasan dan keseragaman antar bidang.

d. Validasi awal dan konsolidasi data

Melakukan verifikasi dan validasi data pada awal tahun melalui rapat koordinasi dan uji petik, serta menetapkan satu sumber data sebagai acuan.

e. Peningkatan kapasitas SDM secara cepat

Melaksanakan bimbingan teknis singkat terkait SAKIP, SPIP, dan pengelolaan data bagi pengelola program dan operator di Triwulan I.

f. Penguatan implementasi SPIP berbasis risiko

Mengidentifikasi risiko utama pada awal tahun dan menetapkan langkah mitigasi sederhana sebagai bagian dari pengendalian internal.

g. Optimalisasi monitoring dini

Melaksanakan monitoring bulanan pada Triwulan I untuk mendeteksi kendala sejak awal dan memastikan tindak lanjut cepat.

h. Penguatan koordinasi lintas bidang dan satuan pendidikan

Melakukan rapat koordinasi rutin pada awal tahun guna memastikan kesiapan pelaksanaan program, keseragaman pemahaman, dan percepatan penyediaan data.

5. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan

Keberhasilan dalam mencapai sasaran kinerja Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang saling bersinergi.

Faktor Pendukung:

a. Ketersediaan regulasi perencanaan dan penganggaran yang jelas

Regulasi terkait perencanaan dan penganggaran, seperti RKPD, Renstra, dan Renja, telah tersedia dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Komitmen pimpinan terhadap perencanaan berbasis kinerja

Dukungan dan komitmen pimpinan dalam mendorong implementasi perencanaan berbasis kinerja menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas kinerja organisasi.

c. Implementasi SAKIP yang mulai konsisten

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan tren yang semakin baik, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

d. Koordinasi antar bidang yang cukup baik

Koordinasi antar bidang dalam penyusunan program dan kegiatan telah berjalan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

e. Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu

Dokumen perencanaan dan pelaporan telah disusun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sehingga mendukung proses administrasi dan pengambilan keputusan.

Faktor Penghambat

a. Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan belum optimal

Masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan (Renja), penganggaran (DPA), dan pelaporan kinerja, sehingga berdampak pada kurang selarasnya pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan.

b. Kualitas penyusunan indikator kinerja (output dan outcome) masih belum memadai

Indikator kinerja yang disusun belum sepenuhnya memenuhi prinsip terukur dan relevan, sehingga menyulitkan dalam pengukuran capaian kinerja secara akurat.

c. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran

Beberapa kegiatan belum terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan, yang berimplikasi pada rendahnya realisasi anggaran pada awal tahun.

d. Data pendukung perencanaan belum valid dan terintegrasi

Ketersediaan data yang belum seragam dan belum terverifikasi secara menyeluruh menyebabkan perencanaan belum sepenuhnya berbasis data yang akurat.

e. Kapasitas SDM perencana dan evaluator masih terbatas

Kompetensi sumber daya manusia dalam bidang perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja masih perlu ditingkatkan guna mendukung implementasi perencanaan berbasis kinerja.

f. Hasil evaluasi kinerja belum dimanfaatkan secara optimal

Evaluasi kinerja yang telah dilakukan belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam perbaikan program dan kegiatan, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja.

Solusi Alternatif:

- a. Peningkatan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
Melalui pelaksanaan reviu internal dan koordinasi lintas bidang guna memastikan keselarasan antara program, kegiatan, indikator, dan anggaran.
- b. Perbaikan kualitas indikator kinerja
Dengan melakukan reviu dan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan program.
- c. Optimalisasi pengendalian pelaksanaan anggaran
Melalui monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan secara berkala serta penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan.
- d. Peningkatan kualitas dan integrasi data perencanaan
Dengan melakukan validasi data, penetapan sumber data yang jelas, serta penyusunan format data yang terstandar.
- e. Peningkatan kapasitas SDM
Melalui pelatihan, pendampingan, dan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) di bidang perencanaan dan evaluasi kinerja.
- f. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan
Dengan mendorong penggunaan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan dan perbaikan program/kegiatan secara berkelanjutan.

6. Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penyusunan dokumen SPIP berjalan secara terkoordinir dan melibatkan seluruh pihak yang relevan guna menghasilkan dokumen yang komprehensif dan sesuai ketentuan.

Faktor Pendorong:

- a. Komitmen pimpinan terhadap penguatan SPIP
Dukungan pimpinan dalam mendorong penerapan pengendalian intern menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas SPIP.
- b. Tersedianya pedoman dan regulasi SPIP yang jelas
Keberadaan regulasi menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem pengendalian intern di lingkungan organisasi.
- c. Peran APIP dalam pembinaan dan asistensi

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) aktif memberikan pembinaan dan pendampingan dalam penerapan SPIP.

d. Adanya tim/struktur pengelola SPIP

Keberadaan tim SPIP mendukung koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengendalian intern secara lebih terarah.

e. Koordinasi antar bidang dalam penyusunan dokumen

Koordinasi yang telah berjalan menjadi modal awal dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen SPIP.

f. Dukungan sistem administrasi dan pelaporan internal

Sistem administrasi yang tersedia mendukung proses dokumentasi dan pelaporan SPIP.

Faktor Penghambat:

a. Pemahaman SDM terhadap SPIP masih terbatas

Sebagian aparatur belum memahami secara menyeluruh konsep, tujuan, dan implementasi SPIP, sehingga pelaksanaannya belum berjalan optimal di seluruh unit kerja.

b. Penyusunan dokumen SPIP belum seragam antar bidang

Terdapat perbedaan format, substansi, dan kedalaman dokumen SPIP antar bidang, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan pengendalian intern.

c. Koordinasi lintas unit belum optimal

Pelaksanaan SPIP belum didukung oleh koordinasi yang efektif antar unit, sehingga integrasi pengendalian intern belum berjalan secara menyeluruh.

d. Identifikasi risiko belum komprehensif

Proses identifikasi dan pemetaan risiko belum mencakup seluruh potensi risiko strategis dan operasional yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

e. Dokumen SPIP belum diperbarui secara berkala

Beberapa dokumen pengendalian intern belum dilakukan pembaruan sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi.

f. Keterbatasan waktu dan SDM pengelola SPIP

Pengelolaan SPIP masih menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah maupun alokasi waktu, sehingga pelaksanaannya belum maksimal.

Solusi Alternatif:

a. Peningkatan pemahaman SDM terkait SPIP

Melalui pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan coaching clinic secara internal guna meningkatkan kapasitas aparatur dalam implementasi SPIP.

b. Standarisasi penyusunan dokumen SPIP

Dengan menyusun dan menerapkan format/template dokumen SPIP yang seragam sebagai acuan seluruh bidang.

c. Penguatan koordinasi lintas unit kerja

Melalui rapat koordinasi rutin dan pembentukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antar unit.

d. Penyempurnaan proses identifikasi risiko

Dengan melakukan reviu dan pemetaan ulang risiko secara lebih komprehensif, terutama pada kegiatan prioritas dan strategis.

e. Pembaruan dokumen SPIP secara berkala

Melalui penjadwalan reviu dan pembaruan dokumen sesuai kebutuhan organisasi dan dinamika pelaksanaan program.

f. Optimalisasi peran tim SPIP dan pemanfaatan SDM yang ada

Dengan pembagian tugas yang jelas, penetapan penanggung jawab, serta pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif.

7. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Dalam pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah pada Triwulan I, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan, yaitu:

Faktor Penghambat:

a. Keterlambatan pembayaran TPP dan honorarium pengelola keuangan

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Januari serta honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, KPA, dan PPTK

mengalami keterlambatan dan baru dapat direalisasikan pada bulan Februari. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya anggaran pada awal tahun anggaran, sehingga berdampak pada tertundanya hak keuangan pegawai.

b. Data kepegawaian (PNS dan PPPK) yang belum mutakhir

Data pegawai yang belum diperbarui secara berkala menyebabkan ketidaksesuaian dalam pembayaran gaji dan tunjangan, yang berimplikasi pada terjadinya pengembalian belanja (retur) dan perlunya penyesuaian administrasi keuangan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan administrasi keuangan pada Triwulan I adalah sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

a. Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah secara tepat waktu

Penyusunan laporan keuangan dapat dilaksanakan dengan baik didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan.

b. Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana anggaran kas (RAK)

Kegiatan belanja, khususnya belanja makanan dan minuman rapat, telah dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran kas dan dapat direalisasikan pada bulan Januari, menunjukkan adanya perencanaan kas yang cukup baik.

Sebagai langkah perbaikan atas kendala yang dihadapi, pada Triwulan I telah dan akan dilakukan upaya sebagai berikut:

Solusi Alternatif

a. Percepatan proses penetapan dan ketersediaan anggaran

Melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait guna memastikan dokumen anggaran dapat segera ditetapkan dan digunakan pada awal tahun, sehingga pembayaran hak pegawai tidak mengalami keterlambatan.

b. Penyusunan perencanaan kas yang lebih akurat

Mengoptimalkan penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) agar lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan riil, terutama untuk belanja pegawai dan honorarium.

c. Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala

Melakukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian untuk memastikan data PNS dan PPPK selalu diperbarui sebelum proses pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan.

d. Penerapan mekanisme verifikasi data sebelum pembayaran

Melakukan pengecekan dan validasi data secara berlapis guna meminimalisir kesalahan pembayaran dan pengembalian belanja.

e. Penguatan koordinasi antar unit pengelola keuangan dan kepegawaian

Meningkatkan sinergi antara bendahara, PPTK, dan pengelola kepegawaian dalam rangka memastikan kelancaran administrasi keuangan.

f. Optimalisasi pemanfaatan SDM yang ada

Memaksimalkan peran dan fungsi SDM pengelola keuangan dalam mendukung ketepatan dan ketertiban administrasi keuangan.

8. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Triwulan I, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi kegiatan, sebagai berikut:

Faktor Penghambat

a. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan belanja operasional

Kegiatan belanja makanan dan minuman rapat yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret mengalami keterlambatan dan baru terealisasi pada bulan April. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, yang dapat berdampak pada keterlambatan dukungan operasional kegiatan.

b. Keterlambatan pengumpulan data dari satuan pendidikan

Pengumpulan data pendukung pengelolaan BMD dari sebagian satuan pendidikan (TK, SD, dan SMP) belum sepenuhnya tepat waktu. Hal ini menyebabkan proses administrasi, pencatatan, dan pelaporan aset menjadi terhambat.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pengelolaan BMD pada Triwulan I antara lain:

Faktor Pendukung

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai

Dukungan SDM yang kompeten dalam pengelolaan BMD mendorong pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif dan terarah.

b. Pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Kas (RAK)

Beberapa kegiatan belanja, seperti pengadaan alat tulis kantor, kertas dan cover, benda pos, serta bahan komputer, telah dilaksanakan sesuai dengan RAK pada bulan Maret, menunjukkan adanya perencanaan kas yang cukup baik.

c. Pengumpulan data sebagian satuan pendidikan sesuai jadwal

Sebagian satuan pendidikan telah menyampaikan data sesuai jadwal yang ditetapkan, sehingga tetap mendukung proses pengelolaan BMD secara bertahap.

Sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi, pada Triwulan I telah dan akan dilakukan upaya sebagai berikut:

Solusi Alternatif

a. Peningkatan kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan

Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan RAK yang telah ditetapkan, serta menetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan kegiatan.

b. Penguatan koordinasi dengan satuan pendidikan

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak TK, SD, dan SMP melalui pemberian pemberitahuan jadwal, pengingat (reminder), dan pendampingan dalam penyampaian data.

c. Penetapan batas waktu dan sanksi administratif

Menetapkan deadline yang tegas dalam pengumpulan data serta mendorong kepatuhan melalui mekanisme pengendalian internal.

e. Penyederhanaan dan standarisasi format pengumpulan data

Menyusun format pelaporan data yang lebih sederhana dan seragam agar memudahkan satuan pendidikan dalam menyampaikan data secara tepat waktu.

f. Pemanfaatan teknologi informasi

Menggunakan media berbasis digital (misalnya spreadsheet bersama atau aplikasi sederhana) untuk mempercepat proses pengumpulan dan rekapitulasi data.

g. Optimalisasi peran SDM pengelola BMD

Memaksimalkan peran petugas pengelola BMD dalam melakukan monitoring, verifikasi, dan asistensi kepada unit/satuan pendidikan.

9. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi kepegawaian mulai dari pengelolaan data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, mutasi, hingga pensiun—dapat berjalan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Faktor Pendorong:

a. Tersedianya regulasi dan pedoman kepegawaian yang jelas

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah memiliki dasar hukum dan pedoman teknis dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di seluruh unit kerja dan satuan pendidikan.

b. Komitmen pimpinan dalam mendukung tertib administrasi kepegawaian

Adanya dukungan dan arahan dari pimpinan dalam meningkatkan disiplin serta tertib administrasi kepegawaian, termasuk mendorong percepatan penyampaian data dan penyelesaian dokumen kepegawaian.

c. Ketersediaan sistem informasi kepegawaian dan pendataan pendidikan

Telah tersedia beberapa aplikasi/sistem pendukung (seperti sistem informasi kepegawaian dan pendataan guru/tenaga kependidikan) yang dapat digunakan untuk mengelola data secara lebih efektif dan terpusat.

d. Koordinasi yang cukup baik antara dinas dan satuan pendidikan

Hubungan koordinasi antara bidang di dinas dengan sekolah (TK, SD, SMP) berjalan cukup baik melalui rapat, surat edaran, maupun komunikasi langsung, sehingga memudahkan penyampaian informasi dan kebijakan.

e. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan administrasi kepegawaian

Dukungan anggaran memungkinkan pelaksanaan kegiatan seperti rapat koordinasi, sosialisasi, serta pengelolaan administrasi kepegawaian secara berkelanjutan.

f. Adanya pembinaan dan sosialisasi kepada satuan pendidikan

Kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, dan sosialisasi terkait aturan kepegawaian secara berkala membantu meningkatkan pemahaman pengelola administrasi di tingkat sekolah.

Faktor Penghambat:

- a. Kepatuhan terhadap SOP administrasi kepegawaian belum merata di bidang-bidang

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, pelaksanaan SOP administrasi kepegawaian belum berjalan seragam, khususnya pada satuan pendidikan (TK, SD, dan SMP). Masih terdapat perbedaan dalam pemahaman dan penerapan prosedur, seperti dalam pengusulan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, serta kelengkapan dokumen kepegawaian, sehingga menghambat tertib administrasi.

- b. Keterlambatan penyampaian data kepegawaian dari satuan pendidikan dan bidang terkait

Penyampaian data kepegawaian dari sekolah-sekolah maupun bidang di lingkungan dinas sering mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah satuan pendidikan yang harus dikoordinasikan serta keterbatasan mekanisme pelaporan yang belum sepenuhnya berbasis digital, sehingga berdampak pada keterlambatan pengolahan data dan penyusunan laporan.

- c. Data kepegawaian belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi

Data kepegawaian guru dan tenaga kependidikan masih ditemukan belum diperbarui secara berkala, serta belum sepenuhnya terintegrasi antara data di tingkat sekolah dengan data di dinas. Kondisi ini menyulitkan dalam penyajian data yang akurat, terutama dalam perencanaan kebutuhan pegawai dan pelaporan kinerja.

- d. Keterbatasan SDM pengelola administrasi kepegawaian

Jumlah dan kompetensi SDM yang menangani administrasi kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar masih terbatas, terutama dalam mengelola data dari banyaknya satuan pendidikan. Hal ini menyebabkan beban kerja menjadi tinggi dan berdampak pada lambatnya penyelesaian administrasi.

- e. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian belum optimal

Penggunaan sistem informasi kepegawaian (seperti aplikasi kepegawaian atau pendataan guru) belum dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh satuan pendidikan. Masih terdapat sekolah yang melakukan pengelolaan data secara manual atau belum rutin melakukan pembaruan data pada sistem, sehingga menghambat integrasi dan akurasi data kepegawaian.

Solusi Alternatif:

a. Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek)

Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada operator sekolah dan pengelola kepegawaian terkait SOP dan regulasi terbaru, agar pemahaman dan penerapan prosedur menjadi seragam.

b. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi (monev) berkala

Melakukan pengawasan rutin terhadap kepatuhan unit kerja dan satuan pendidikan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, termasuk evaluasi ketepatan waktu dan kelengkapan data.

c. Optimalisasi penggunaan sistem informasi kepegawaian

Mendorong seluruh satuan pendidikan untuk memanfaatkan sistem/aplikasi secara maksimal, termasuk melakukan pembaruan data secara berkala dan real-time.

d. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kepegawaian

Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis, workshop, atau kegiatan peningkatan kompetensi guna mendukung profesionalisme dalam pengelolaan administrasi.

e. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data secara berkala

Melakukan verifikasi dan validasi data kepegawaian secara rutin antara dinas dan satuan pendidikan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data.

10. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan administrasi, seperti surat-menyurat, pengarsipan, pengelolaan barang, dan kegiatan pendukung lainnya dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Faktor Pendorong:

a. Tersedianya regulasi dan pedoman administrasi umum

Adanya aturan dan standar kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan administrasi.

b. Dukungan pimpinan

Pimpinan memberikan arahan dan dukungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi.

c. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

Fasilitas seperti peralatan kantor, jaringan internet, dan ruang kerja mendukung pelaksanaan tugas administrasi.

d. Adanya anggaran operasional

Anggaran mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi umum, termasuk kebutuhan ATK dan layanan perkantoran.

e. Koordinasi internal yang cukup baik

Hubungan kerja antar bidang dan staf cukup mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi.

Faktor Penghambat:

a. Keterlambatan penyampaian dokumen administrasi

Beberapa bidang dan satuan pendidikan belum menyampaikan dokumen secara tepat waktu, sehingga menghambat proses administrasi.

b. Pengelolaan arsip belum optimal

Sistem kearsipan belum tertata secara menyeluruh, masih terdapat dokumen yang belum terdokumentasi dengan baik atau belum terdigitalisasi.

c. Keterbatasan SDM administrasi umum

Jumlah dan kompetensi tenaga administrasi masih terbatas dibandingkan dengan beban kerja yang cukup tinggi.

d. Pemanfaatan teknologi administrasi belum maksimal

Penggunaan aplikasi persuratan dan kearsipan digital belum merata, sehingga masih banyak proses dilakukan secara manual.

f. Koordinasi antar bidang belum sepenuhnya efektif

Masih terdapat kendala komunikasi yang menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan administrasi.

Solusi Alternatif:

a. Peningkatan ketepatan waktu penyampaian dokumen

Menetapkan jadwal dan mekanisme pengendalian dalam pengumpulan dan distribusi dokumen administrasi.

b. Penataan dan digitalisasi arsip

Melakukan pembenahan sistem kearsipan serta mendorong penggunaan arsip digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dokumen.

c. Peningkatan kapasitas SDM administrasi

Melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi tenaga administrasi.

d. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi

Mendorong pemanfaatan aplikasi persuratan dan administrasi berbasis digital secara menyeluruh.

e. Peningkatan koordinasi dan komunikasi

Memperkuat komunikasi antar unit kerja melalui rapat rutin dan media komunikasi lainnya.

f. Monitoring dan evaluasi berkala

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

11. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan jasa penunjang yang mendukung pelayanan umum di perangkat daerah dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan berkesinambungan. Jasa penunjang seperti layanan kebersihan, keamanan, pemeliharaan fasilitas, hingga dukungan logistik memainkan peran vital dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung kelancaran operasional pelayanan publik.

Faktor Pendorong:

a. Ketersediaan anggaran yang memadai pada awal tahun

Dukungan APBD yang telah ditetapkan memungkinkan pelaksanaan jasa penunjang (ATK, jasa kebersihan, keamanan, listrik, air, dll.) dapat mulai direalisasikan sejak Triwulan I.

b. Adanya regulasi dan pedoman kerja yang jelas

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan pengadaan barang/jasa menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga lebih terarah dan sesuai ketentuan.

c. Komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang baik

Dukungan pimpinan serta koordinasi antar bidang/subbagian mempercepat proses pelaksanaan kegiatan penunjang.

d. Pemanfaatan sistem informasi

Membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan sehingga lebih transparan dan akuntabel.

e. Ketersediaan penyedia jasa yang kompeten

Penyedia jasa yang berpengalaman mendukung kualitas layanan penunjang yang diberikan.

Faktor Penghambat:

a. Proses administrasi dan pengadaan yang memerlukan waktu

Tahapan pengadaan (perencanaan, verifikasi, kontrak) menyebabkan beberapa kegiatan belum optimal terealisasi di awal tahun.

b. Keterlambatan penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

Revisi atau penyesuaian kegiatan berdampak pada tertundanya pelaksanaan jasa penunjang.

c. Keterbatasan SDM pengelola kegiatan

Beban kerja yang tinggi serta keterbatasan jumlah/kompetensi SDM mempengaruhi kecepatan pelaksanaan.

d. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan

Perencanaan yang kurang rinci menyebabkan adanya penyesuaian di tengah pelaksanaan.

e. Kendala teknis operasional

Keterlambatan distribusi barang/jasa, gangguan layanan atau keterlambatan penyedia jasa.

Solusi Alternatif:

a. Percepatan proses pengadaan dan administrasi

Menyusun jadwal pengadaan lebih awal serta melakukan persiapan dokumen sejak sebelum tahun anggaran berjalan.

b. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan

Melakukan identifikasi kebutuhan secara lebih detail dan realistis agar meminimalisir revisi di tengah tahun.

c. Penguatan kapasitas SDM

Melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, serta pemanfaatan sistem informasi.

d. Optimalisasi koordinasi dan monitoring

Melakukan rapat koordinasi rutin dan monitoring berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai target.

e. Peningkatan manajemen penyedia jasa

Melakukan seleksi penyedia yang kredibel serta evaluasi kinerja penyedia secara berkala.

12. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan

Sasaran kinerja "Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan" bertujuan

memastikan bahwa seluruh barang milik daerah yang mendukung operasional perangkat daerah dirawat dan dipelihara secara tepat waktu dan terencana. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi, kualitas, dan umur manfaat aset tersebut sehingga dapat mendukung kelancaran pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pelaksanaan pemeliharaan yang terjadwal sesuai rencana membantu mencegah kerusakan yang lebih parah dan mengurangi biaya perbaikan yang tidak terduga. Selain itu, pemeliharaan yang terorganisir dengan baik juga memperpanjang masa pakai barang milik daerah dan mendukung keberlangsungan kegiatan perangkat daerah.

Faktor Pendorong:

a. Perencanaan Pemeliharaan yang Matang:

Penyusunan rencana pemeliharaan yang terstruktur dan berdasarkan data kondisi barang secara periodik memungkinkan pelaksanaan pemeliharaan berjalan sesuai jadwal.

b. Komitmen dan Kesadaran Pengelola Aset:

Tingginya kesadaran dan komitmen petugas pengelola barang milik daerah dalam menjalankan pemeliharaan rutin meningkatkan efektivitas pelaksanaan.

c. Ketersediaan Anggaran:

Dukungan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan memastikan tersedianya sumber daya untuk pelaksanaan pemeliharaan sesuai kebutuhan.

d. Sistem Monitoring dan Evaluasi:

Adanya mekanisme monitoring yang konsisten dan evaluasi berkala memudahkan pengendalian pelaksanaan dan perbaikan proses pemeliharaan.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia:

Kekurangan tenaga teknis yang kompeten untuk melakukan pemeliharaan dapat menghambat kelancaran proses pemeliharaan.

b. Keterbatasan Anggaran:

Jika anggaran dialokasikan terbatas atau mengalami penundaan, pelaksanaan pemeliharaan bisa terganggu dan tidak sesuai jadwal.

c. Pengelolaan Data Aset yang Kurang Akurat:

Ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data kondisi dan jumlah barang milik daerah menyulitkan perencanaan dan prioritas pemeliharaan.

d. Kendala Teknis dan Logistik:

Sulitnya pengadaan suku cadang atau bahan pendukung pemeliharaan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan.

Solusi Alternatif :

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia adalah melalui peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan teknis pemeliharaan dan pengelolaan aset secara berkala. Selain itu, dilakukan optimalisasi pembagian tugas dan fungsi agar beban kerja lebih merata dan efektif. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, dimanfaatkan tenaga pihak ketiga (outsourcing). Di sisi lain, organisasi juga mendorong penerapan multi-skilling pegawai sehingga satu pegawai mampu menangani lebih dari satu jenis pekerjaan teknis.

b. Keterbatasan Anggaran

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, dilakukan penyusunan skala prioritas pemeliharaan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap layanan. Upaya efisiensi belanja juga diterapkan tanpa mengurangi kualitas output, seperti melalui pengadaan terpusat dan pemanfaatan barang yang masih layak. Selain itu, perencanaan anggaran dioptimalkan sejak awal tahun untuk menghindari kekurangan di tengah pelaksanaan. Apabila diperlukan, dilakukan usulan pergeseran atau penambahan anggaran pada perubahan anggaran (APBD-P).

c. Pengelolaan Data Aset yang Kurang Akurat

Untuk mengatasi permasalahan data aset yang kurang akurat, dilakukan pendataan ulang (inventarisasi) secara berkala guna memastikan validitas data. Pemanfaatan aplikasi pengelolaan barang milik daerah juga dioptimalkan agar data lebih terintegrasi dan mudah diperbarui. Selain itu, koordinasi antar unit kerja dalam pelaporan kondisi dan penggunaan aset ditingkatkan, serta ditetapkan standar pelaporan dan pembaruan data yang konsisten dan terjadwal.

d. Kendala Teknis dan Logistik

Dalam mengatasi kendala teknis dan logistik, dilakukan perencanaan kebutuhan suku cadang dan bahan pendukung secara lebih matang dan

antisipatif. Kerja sama dengan penyedia yang memiliki ketersediaan stok memadai dan waktu pengiriman yang cepat juga ditingkatkan. Selain itu, disediakan stok cadangan (buffer) untuk kebutuhan mendesak. Monitoring terhadap proses pengadaan dan distribusi dilakukan secara berkala agar potensi keterlambatan dapat diantisipasi sejak dini.

13. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja "Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan" dengan indikator Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik mencerminkan upaya peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penyediaan guru yang tidak hanya berkualifikasi, tetapi juga terdistribusi secara adil di seluruh satuan pendidikan. Kualitas tenaga pendidik menjadi fondasi penting dalam menjamin proses pembelajaran yang efektif dan merata.

Selama triwulan ini, terdapat perkembangan positif dalam hal peningkatan kualitas guru, di antaranya terlihat dari semakin banyaknya guru yang berhasil menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG), khususnya melalui skema piloting yang difasilitasi pemerintah. Selain itu, penempatan guru hasil rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ke sekolah tujuan masing-masing juga telah membantu memperbaiki distribusi guru, terutama di daerah yang sebelumnya mengalami kekurangan.

1) Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Faktor Pendorong:

a. Adanya kebijakan pemerintah terkait pemerataan distribusi guru

Kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah mengenai penataan dan pemerataan guru menjadi landasan dalam mengurangi kesenjangan distribusi tenaga pendidik. Regulasi ini memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melakukan penempatan, pemindahan, maupun pengangkatan guru sesuai kebutuhan wilayah.

b. Komitmen pemerintah daerah dalam penataan dan penempatan tenaga pendidik

Dukungan pemerintah daerah terlihat dari upaya aktif dalam merencanakan dan melaksanakan distribusi guru, termasuk penugasan ke wilayah yang masih kekurangan. Komitmen ini mempercepat proses pemerataan serta memastikan setiap satuan pendidikan memiliki tenaga pendidik yang memadai.

c. Tersedianya data kebutuhan guru melalui sistem pendataan pendidikan

Ketersediaan data melalui sistem pendataan memungkinkan identifikasi kebutuhan guru secara lebih terukur, baik dari segi jumlah maupun sebarannya. Data ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penataan guru sehingga lebih tepat sasaran.

d. Dukungan koordinasi antar bidang dalam pemetaan kebutuhan guru

Koordinasi yang baik antar bidang mendukung sinkronisasi data dan kebijakan. Dengan adanya komunikasi yang efektif, proses pemetaan kebutuhan guru dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

Faktor Penghambat:

a. Distribusi guru yang belum merata antar wilayah

Masih terdapat ketimpangan jumlah guru antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran atau terpencil, sehingga beberapa satuan pendidikan mengalami kelebihan guru sementara yang lain kekurangan.

b. Keterbatasan jumlah guru pada daerah tertentu

Ketersediaan guru yang terbatas, khususnya pada jenjang PAUD, menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah secara merata.

c. Minimnya minat guru untuk ditempatkan di wilayah terpencil

Faktor aksesibilitas, fasilitas, dan kondisi geografis menjadi alasan rendahnya minat guru untuk bertugas di daerah terpencil, sehingga memperlambat upaya pemerataan.

d. Data kebutuhan guru yang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir

Data yang belum diperbarui secara berkala menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan perencanaan, sehingga kebijakan distribusi belum optimal.

Solusi Alternatif:

a. Penataan dan Redistribusi Tenaga Pendidik

Penataan dan redistribusi guru dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di setiap wilayah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan jumlah guru antar satuan pendidikan, sehingga distribusi tenaga pendidik menjadi lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

b. Pemanfaatan Data yang Akurat dan Mutakhir

Pemanfaatan data yang terus diperbarui menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penempatan guru. Dengan data yang akurat, proses perencanaan dan pelaksanaan redistribusi dapat dilakukan

secara lebih tepat sasaran, serta meminimalisir kesalahan dalam penempatan tenaga pendidik.

c. Pemberian Insentif dan Afirmasi

Pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau bentuk afirmasi, seperti tambahan tunjangan, kemudahan fasilitas, atau penghargaan tertentu bagi guru yang bersedia ditempatkan di wilayah kekurangan tenaga pendidik, khususnya daerah terpencil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi guru dalam mendukung pemerataan.

d. Pemutakhiran Data Secara Berkala

Pemutakhiran data kebutuhan guru dilakukan secara rutin melalui koordinasi dengan satuan pendidikan dan pemanfaatan sistem pendataan. Dengan pembaruan data yang konsisten, kebijakan yang diambil menjadi lebih akurat, responsif terhadap kondisi lapangan, dan berkelanjutan dalam mendukung pemerataan tenaga pendidik.

2) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik

Faktor Pendorong:

a. Adanya program sertifikasi pendidik dari pemerintah pusat

Program sertifikasi menjadi instrumen utama dalam peningkatan profesionalisme guru. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi pendidik untuk memperoleh pengakuan kompetensi sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

b. Tersedianya kegiatan peningkatan kompetensi seperti diklat dan bimtek

Kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta bimbingan teknis (bimtek) membantu guru dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai syarat mengikuti sertifikasi.

c. Tingginya motivasi pendidik untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi

Kesadaran dan kemauan guru untuk berkembang menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan jumlah pendidik yang tersertifikasi.

d. Dukungan informasi melalui sistem pendataan pendidikan

Sistem informasi pendidikan memudahkan pendidik dalam mengakses informasi terkait persyaratan, jadwal, dan proses sertifikasi, sehingga meningkatkan partisipasi.

Faktor Penghambat:

a. Masih rendahnya jumlah guru yang memenuhi syarat sertifikasi

Tidak semua guru memenuhi persyaratan administratif maupun akademik, seperti kualifikasi pendidikan minimal atau masa kerja.

b. Keterbatasan kuota program sertifikasi dan pelatihan

Kuota yang terbatas menyebabkan tidak semua guru dapat mengikuti sertifikasi atau pelatihan dalam waktu bersamaan.

c. Kendala akses informasi dan lokasi bagi sebagian pendidik

Pendidik di wilayah tertentu mengalami keterbatasan akses terhadap informasi maupun lokasi pelatihan, sehingga menghambat partisipasi.

e. Keterbatasan anggaran untuk pembinaan dan fasilitasi sertifikasi

Dukungan anggaran yang terbatas berdampak pada terbatasnya jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi yang dapat diberikan kepada pendidik.

Solusi Alternatif:

a. Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi

Upaya dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi pendidik agar dapat memenuhi persyaratan sertifikasi melalui pendampingan administrasi dan akademik. Pendampingan ini mencakup bantuan dalam penyusunan dokumen, pemenuhan kualifikasi pendidikan, serta bimbingan teknis terkait proses sertifikasi.

b. Perluasan Akses Pelatihan dan Sertifikasi

Dilakukan perluasan akses pelatihan melalui penyelenggaraan kegiatan baik secara luring (tatap muka) maupun daring (online), sehingga dapat menjangkau lebih banyak pendidik, termasuk yang berada di wilayah terpencil.

c. Optimalisasi Penggunaan Anggaran

Pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada peningkatan jumlah guru bersertifikat, serta melakukan efisiensi agar cakupan program dapat diperluas.

d. Peningkatan Diseminasi Informasi Sertifikasi

Penyebaran informasi terkait sertifikasi ditingkatkan melalui berbagai media dan sistem informasi pendidikan agar dapat diakses secara merata oleh seluruh pendidik, sehingga tidak ada guru yang tertinggal informasi.

14. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang

terakreditasi minimal B dalam mencapai target yang sudah ditentukan memiliki beberapa faktor baik faktor penghambat maupun faktor yang mendukung.

Faktor Pendorong:

- a. Dukungan dana APBD dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan akreditasi PAUD

Alokasi anggaran daerah memungkinkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimtek, dan pendampingan yang membantu satuan PAUD dalam memahami dan mempersiapkan akreditasi.

- b. Penguatan peran pengawas TK, penilik PAUD, PKG PAUD, dan organisasi mitra (ormit)

Peran aktif pengawas, penilik, kelompok kerja, serta organisasi mitra sangat membantu dalam pembinaan, monitoring, dan pendampingan satuan PAUD untuk memenuhi 8 SNP secara bertahap.

Faktor Penghambat:

- a. Kurangnya kesadaran satuan PAUD tentang pentingnya akreditasi

Sebagian pengelola satuan PAUD masih memandang akreditasi sebagai beban administratif, bukan sebagai upaya peningkatan mutu. Hal ini menyebabkan rendahnya inisiatif lembaga untuk mempersiapkan diri mengikuti proses akreditasi.

- b. Dokumen 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) belum tersusun dan terdokumentasi dengan baik

Banyak satuan PAUD belum memiliki dokumen yang lengkap dan tertata sesuai dengan 8 SNP, baik dari sisi administrasi maupun implementasi. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam pemenuhan persyaratan akreditasi.

- c. Kurangnya kemampuan IT PTK PAUD dalam menggunakan aplikasi SISPENA

Keterbatasan kemampuan teknologi informasi pada pendidik dan tenaga kependidikan menyebabkan kesulitan dalam penginputan data dan pengelolaan dokumen akreditasi melalui aplikasi SISPENA.

Solusi Alternatif :

- a. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Akreditasi

Dilakukan sosialisasi secara intensif kepada satuan PAUD mengenai pentingnya akreditasi sebagai indikator mutu lembaga. Kegiatan ini dapat berupa seminar, workshop, dan sharing best practice dari lembaga yang telah terakreditasi, sehingga mendorong perubahan pola pikir pengelola.

b. Pendampingan Penyusunan Dokumen 8 SNP

Dinas pendidikan bersama pengawas dan penilik melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan dan penataan dokumen sesuai 8 SNP. Pendampingan dilakukan secara bertahap dan terjadwal agar setiap satuan PAUD mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan.

c. Peningkatan Kompetensi IT PTK dalam Penggunaan SISPENA

Dilaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi SISPENA bagi pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara langsung maupun daring. Selain itu, disediakan panduan teknis sederhana dan layanan bantuan (helpdesk) untuk mempermudah proses penginputan data.

d. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran dan Peran Stakeholder

Penggunaan dana APBD difokuskan pada kegiatan prioritas seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan akreditasi. Selain itu, penguatan sinergi dengan pengawas, penilik, PKG, dan organisasi mitra terus ditingkatkan agar pembinaan dapat menjangkau seluruh satuan PAUD secara merata dan berkelanjutan.

15. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja "Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal" bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan dapat menerapkan kurikulum secara konsisten, baik kurikulum nasional yang berlaku secara umum, maupun kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kearifan lokal masing-masing daerah.

1) Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Faktor Pendorong:

a. Tersedianya informasi online terkait kebijakan terbaru dari Kementerian Dikdasmen

Akses terhadap informasi digital memungkinkan pendidik memperoleh pembaruan kebijakan, panduan kurikulum, serta referensi pembelajaran secara lebih cepat dan luas.

b. Tersedianya buku kurikulum muatan lokal yang sesuai kebutuhan

Buku kurikulum muatan lokal menjadi pedoman praktis bagi pendidik dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam pembelajaran, sehingga lebih relevan dengan konteks peserta didik.

c. Adanya pengembangan kapasitas pendidik melalui PKG dan Gugus PAUD

Kegiatan dalam PKG dan Gugus PAUD menjadi wadah berbagi praktik baik, diskusi, dan peningkatan kompetensi antar pendidik secara kolaboratif.

Faktor Penghambat:

- a. Keterbatasan pemahaman dan kompetensi pendidik terhadap implementasi kurikulum nasional dan muatan lokal

Sebagian pendidik PAUD belum sepenuhnya memahami konsep, struktur, serta strategi implementasi kurikulum nasional maupun muatan lokal. Hal ini berdampak pada belum optimalnya perencanaan pembelajaran, pelaksanaan di kelas, serta penilaian hasil belajar yang sesuai dengan standar.

- b. Keterbatasan akses pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pendidik PAUD

Kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan masih belum merata, baik karena keterbatasan kuota, lokasi, maupun jadwal kegiatan. Akibatnya, tidak semua pendidik memperoleh pembaruan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan.

Solusi Alternatif :

- a. Peningkatan Kompetensi Pendidik dalam Implementasi Kurikulum

Dilakukan pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis secara berkala yang fokus pada pemahaman kurikulum nasional dan muatan lokal. Kegiatan ini diarahkan pada praktik langsung, seperti penyusunan RPP/Modul Ajar, strategi pembelajaran, dan penilaian.

- b. Perluasan Akses Pelatihan dan Pendampingan Berkelanjutan

Memperluas jangkauan pelatihan melalui kombinasi metode luring dan daring agar lebih banyak pendidik dapat terlibat. Selain itu, pendampingan berkelanjutan dilakukan melalui pengawas, penilik, serta forum PKG dan Gugus PAUD.

- c. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Belajar Digital

Mendorong pendidik untuk memanfaatkan platform online sebagai sumber belajar mandiri, termasuk modul, video pembelajaran, dan panduan kebijakan terbaru, sehingga peningkatan kompetensi dapat dilakukan secara fleksibel.

- d. Penguatan Peran PKG dan Gugus PAUD

Mengoptimalkan fungsi PKG dan Gugus sebagai pusat belajar bersama melalui kegiatan rutin seperti diskusi, lesson study, dan berbagi

praktik baik, sehingga terjadi peningkatan kapasitas secara kolektif dan berkelanjutan.

2) Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Faktor Pendorong:

a. Adanya komunitas belajar tutor pendidikan kesetaraan sebagai wadah belajar dan berbagi

Keberadaan komunitas belajar tutor menjadi sarana yang efektif untuk berbagi pengalaman, praktik baik, dan peningkatan kapasitas antar tutor. Melalui forum ini, tutor dapat saling mendiskusikan strategi pembelajaran, termasuk integrasi muatan lokal, sehingga mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara kolaboratif.

Faktor Penghambat:

a. Belum optimalnya implementasi kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan nonformal

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal pada pendidikan nonformal masih belum berjalan optimal karena keterbatasan pemahaman tutor terhadap konsep dan penerapannya dalam pembelajaran. Selain itu, belum tersedianya panduan teknis yang seragam, keterbatasan bahan ajar, serta kurangnya integrasi muatan lokal ke dalam perencanaan pembelajaran menjadi kendala. Kondisi ini menyebabkan muatan lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bagian dari penguatan konteks dan relevansi pembelajaran bagi warga belajar.

Solusi Alternatif :

a. Peningkatan Pemahaman Tutor terhadap Kurikulum Muatan Lokal

Dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi tutor pendidikan nonformal terkait konsep dan implementasi kurikulum muatan lokal. Kegiatan ini difokuskan pada praktik penyusunan rencana pembelajaran serta integrasi muatan lokal dalam proses belajar.

b. Penyusunan dan Penyediaan Panduan Teknis serta Bahan Ajar

Mengembangkan panduan implementasi kurikulum muatan lokal yang sederhana dan aplikatif, serta menyediakan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan daerah, sehingga memudahkan tutor dalam pelaksanaan di lapangan.

c. Optimalisasi Peran Komunitas Belajar Tutor

Memanfaatkan komunitas belajar sebagai wadah rutin untuk diskusi, berbagi praktik baik, dan pemecahan masalah terkait implementasi kurikulum muatan lokal, sehingga terjadi peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

d. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan nonformal, guna memastikan implementasi berjalan sesuai tujuan serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

16. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja “Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan” mencerminkan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, khususnya di tingkat satuan PAUD, dalam aspek administrasi dan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Tata kelola yang baik menjadi fondasi penting bagi terciptanya layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Selama periode pelaporan ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mencapai target.

Faktor Pendorong:

a. Tersedianya regulasi dan petunjuk teknis yang jelas

Adanya regulasi dan juknis menjadi pedoman dalam pengelolaan serta pelaporan administrasi dan keuangan, sehingga memberikan arah yang jelas bagi satuan PAUD dalam menjalankan tugasnya.

b. Adanya pengembangan kapasitas melalui PKG dan Gugus PAUD

Forum PKG dan Gugus PAUD menjadi wadah pembelajaran bersama bagi PTK untuk meningkatkan kompetensi, termasuk dalam aspek administrasi dan pengelolaan keuangan.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan kapasitas SDM PTK PAUD

Sebagian pendidik dan tenaga kependidikan PAUD masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan keterampilan terkait pengelolaan administrasi serta keuangan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penyusunan laporan, pencatatan keuangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

b. Keterbatasan bimbingan teknis dan pendampingan secara berkala

Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan belum dilakukan secara rutin dan merata, sehingga PTK PAUD belum memperoleh dukungan yang cukup dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi dan keuangan secara berkelanjutan.

Solusi Alternatif:

a. Peningkatan Kapasitas SDM PTK PAUD

Dilakukan pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis yang berfokus pada pengelolaan administrasi dan keuangan, termasuk penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. Kegiatan ini dirancang praktis dan aplikatif agar mudah dipahami dan diterapkan oleh PTK PAUD.

b. Penguatan Pendampingan Berkelanjutan

Dilaksanakan pendampingan secara rutin dan terjadwal melalui pengawas, penilik, maupun tim teknis dari dinas pendidikan. Pendampingan ini bertujuan memberikan asistensi langsung dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi di lapangan.

c. Penyederhanaan dan Standarisasi Sistem Administrasi

Menyusun format administrasi dan pelaporan keuangan yang lebih sederhana dan mudah digunakan, sehingga meminimalisir kesalahan serta mempermudah PTK dalam melaksanakan tugas administrasi sesuai ketentuan.

17. Meningkatkan Kesempatan Pendidikan Bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memperluas akses layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka memperoleh hak pendidikan sejak dini tanpa terkendala faktor ekonomi. Peningkatan akses pendidikan PAUD ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Adapun faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian target sasaran ini Adalah:

Faktor Pendorong:

a. Adanya kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 13 tahun

Kebijakan ini mendorong peningkatan akses pendidikan sejak usia dini hingga pendidikan menengah, sehingga memperkuat pentingnya PAUD sebagai fondasi awal.

b. Dukungan anggaran APBD untuk biaya personil dan perlengkapan peserta didik PAUD

Dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah membantu meringankan beban orang tua, sehingga mendorong peningkatan akses dan partisipasi anak dalam PAUD.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan kondisi sosial ekonomi keluarga

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas menyebabkan orang tua lebih memprioritaskan kebutuhan dasar dibandingkan pendidikan anak usia dini. Biaya tidak langsung seperti transportasi, perlengkapan, dan waktu juga menjadi pertimbangan sehingga PAUD belum menjadi pilihan utama.

b. Rendahnya pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai pentingnya PAUD

Sebagian orang tua belum memahami manfaat PAUD dalam mendukung tumbuh kembang anak, baik dari aspek kognitif, sosial, maupun emosional. Hal ini menyebabkan rendahnya minat untuk menyekolahkan anak sejak usia dini.

c. Ketidaksesuaian data sosial ekonomi pada sistem pendataan (DTSEN)

Data yang belum akurat atau belum diperbarui mengakibatkan penyaluran bantuan pendidikan tidak tepat sasaran. Dampaknya, anak dari keluarga yang seharusnya menerima bantuan belum terfasilitasi, sehingga menghambat peningkatan angka partisipasi.

Solusi Alternatif:

a. Pemberian Bantuan dan Subsidi Pendidikan yang Tepat Sasaran

Untuk mengatasi keterbatasan ekonomi keluarga, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemberian bantuan biaya pendidikan, perlengkapan, maupun subsidi lainnya yang difokuskan pada keluarga kurang mampu. Program ini perlu disertai mekanisme seleksi yang tepat agar benar-benar menjangkau sasaran prioritas.

b. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi kepada Orang Tua

Dilakukan sosialisasi secara masif mengenai pentingnya PAUD melalui berbagai media dan kegiatan di masyarakat, seperti pertemuan wali murid, posyandu, maupun kegiatan desa. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran orang tua tentang manfaat PAUD bagi perkembangan anak.

c. Perbaikan dan Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi (DTSEN)

Dilakukan validasi dan pemutakhiran data secara berkala melalui koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan satuan pendidikan. Dengan data yang akurat, penyaluran bantuan pendidikan dapat lebih tepat

sasaran sehingga mendukung peningkatan partisipasi anak dari keluarga kurang mampu.

d. Penguatan Sinergi Antar Program dan Stakeholder

Mengintegrasikan program pendidikan dengan program perlindungan sosial lainnya, serta meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar intervensi yang dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan partisipasi PAUD.

18. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk mendorong satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar tidak hanya melaksanakan kurikulum nasional, tetapi juga mengembangkan dan menerapkan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan potensi daerah, budaya setempat, dan kebutuhan perkembangan anak.

Faktor Pendorong:

a. Adanya potensi sumber daya lokal (budaya, bahasa, lingkungan, kearifan lokal)

Keberagaman potensi lokal menjadi modal utama dalam penyusunan kurikulum muatan lokal yang kontekstual, menarik, dan relevan bagi peserta didik PAUD. Hal ini mendukung pembelajaran yang lebih bermakna serta memperkuat identitas lokal sejak dini.

b. Tersedianya Buku Kurikulum Muatan Lokal yang sesuai kebutuhan

Ketersediaan buku ini menjadi acuan awal bagi pendidik dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum muatan lokal, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan pemahaman dan mempermudah proses adaptasi di satuan pendidikan.

Faktor Penghambat:

a. Terbatasnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam penyusunan kurikulum muatan lokal

Kondisi ini menyebabkan proses perumusan kurikulum muatan lokal PAUD belum optimal, baik dari sisi kualitas substansi maupun kesesuaian dengan karakteristik daerah. Guru cenderung belum memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan potensi lokal ke dalam struktur kurikulum secara sistematis dan berkelanjutan.

b. Terbatasnya dukungan anggaran untuk pengembangan kurikulum dan pelatihan pendidik

Keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya pelaksanaan kegiatan seperti workshop, bimbingan teknis, serta pengembangan bahan ajar muatan lokal. Hal ini berimplikasi pada lambatnya peningkatan kapasitas pendidik dan kurangnya inovasi dalam pengembangan kurikulum.

Solusi Alternatif:

a. Peningkatan kompetensi pendidik secara bertahap dan kolaboratif

Dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, workshop, atau komunitas belajar (KKG/PKG) dengan memanfaatkan narasumber lokal maupun praktisi pendidikan. Selain itu, dapat dilakukan pendampingan teknis (mentoring) dalam penyusunan kurikulum muatan lokal.

b. Optimalisasi sumber daya yang tersedia dengan pendekatan kemitraan

Mengundang pihak terkait seperti akademisi, budayawan, dan praktisi lokal untuk terlibat dalam pengembangan kurikulum tanpa ketergantungan penuh pada anggaran pemerintah.

c. Pemanfaatan buku kurikulum sebagai panduan dasar yang dikembangkan secara kontekstual

Buku yang tersedia dapat dijadikan referensi utama, kemudian disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal masing-masing wilayah/satuan pendidikan agar lebih aplikatif.

19. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen satuan pendidikan nonformal/kesetaraan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor Pendorong:

a. Adanya tim pendamping BOSP yang membimbing SPNF

Keberadaan tim pendamping menjadi faktor penting dalam membantu satuan pendidikan menyelesaikan pelaporan, baik melalui konsultasi teknis, asistensi langsung, maupun fasilitasi pemahaman terhadap aplikasi dan ketentuan pelaporan. Pendampingan ini mempercepat proses penyesuaian dan mengurangi kesalahan dalam penyusunan laporan.

Faktor Penghambat:

- a. Keterlambatan satuan pendidikan dalam menyelesaikan pelaporan BOSP tahun sebelumnya

Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi dan penyaluran BOSP pada tahun berjalan menjadi terhambat. Keterlambatan umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis pelaporan, kurangnya ketertiban administrasi, serta belum optimalnya pengelolaan waktu oleh satuan pendidikan nonformal/kesetaraan (SPNF). Dampaknya, perencanaan program dan realisasi kegiatan pada Triwulan I tidak dapat berjalan maksimal karena masih bergantung pada penyelesaian administrasi tahun sebelumnya.

Solusi Alternatif:

- a. Percepatan penyelesaian pelaporan melalui pendampingan intensif

Melaksanakan pendampingan secara lebih terfokus (klinik laporan/BOSP) kepada satuan pendidikan yang belum menyelesaikan laporan, dengan prioritas pada SPNF yang mengalami keterlambatan.

- b. Penyusunan jadwal dan target penyelesaian yang terukur

Menetapkan timeline yang jelas disertai monitoring berkala (mingguan) agar progres penyelesaian laporan dapat dikendalikan dan segera ditindaklanjuti jika terjadi kendala.

- c. Pemanfaatan tim pendamping secara optimal

Mengoptimalkan peran tim pendamping BOSP untuk memberikan asistensi teknis, termasuk penyederhanaan langkah-langkah pelaporan dan pemberian contoh format yang benar.

20. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu

Sasaran kinerja ini berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu pada jenjang pendidikan nonformal, khususnya program kesetaraan. Melalui perluasan kesempatan belajar, diharapkan angka putus sekolah dapat ditekan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang layak menjadi lebih merata.

Faktor Pendorong:

- a. Adanya Alokasi Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kemendikdasmen:

Bantuan PIP sangat membantu peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan kesetaraan tanpa terbebani biaya, sehingga mendorong partisipasi dan keberlanjutan pendidikan mereka.

Faktor Penghambat:

d. Keterlambatan Peserta Didik dalam Aktivasi Rekening PIP:

Banyak peserta didik mengalami keterlambatan dalam proses aktivasi rekening bank sebagai syarat pencairan dana bantuan PIP, yang berdampak pada tertundanya pemanfaatan bantuan untuk mendukung kebutuhan pendidikan.

Solusi Alternatif:

a. Percepatan aktivasi rekening melalui pendampingan langsung

Satuan pendidikan bersama tim pendamping melakukan fasilitasi kolektif (pendampingan massal) ke bank bagi peserta didik penerima PIP, sehingga proses aktivasi rekening dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.

b. Penyederhanaan alur informasi dan persyaratan

Menyusun panduan singkat (leaflet/infografis) terkait tahapan aktivasi rekening PIP, termasuk dokumen yang harus disiapkan, agar peserta didik tidak mengalami kebingungan atau kesalahan administrasi.

c. Penguatan koordinasi dengan pihak perbankan

Menjalin kerja sama aktif dengan bank penyalur untuk membuka layanan khusus atau jadwal layanan kolektif bagi peserta didik kesetaraan, sehingga proses aktivasi dapat diprioritaskan.

d. Peningkatan sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua

Melakukan sosialisasi intensif terkait pentingnya aktivasi rekening PIP secara tepat waktu serta manfaat bantuan untuk mendukung keberlanjutan pendidikan.

21. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memperluas layanan pendidikan nonformal, khususnya program kesetaraan, sebagai alternatif pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, termasuk santri di pondok pesantren. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan menjadi solusi strategis untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan pada kelompok masyarakat usia sekolah yang belum tersentuh layanan pendidikan formal.

1) Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan

Faktor Pendorong:

- a. Adanya Program Tuntas Banjar sebagai penanganan anak tidak sekolah
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjangkau anak tidak sekolah melalui pendataan, intervensi, dan fasilitasi akses pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan. Program ini juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Faktor Penghambat:

- a. Masih adanya persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan umum tidak penting
Sebagian masyarakat, khususnya pada kelompok dengan kondisi sosial ekonomi tertentu, masih memandang pendidikan (termasuk pendidikan kesetaraan) bukan sebagai kebutuhan utama. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor budaya, kebiasaan turun-temurun, serta tuntutan ekonomi yang mendorong anak untuk bekerja lebih awal. Dampaknya, partisipasi pendidikan menjadi rendah, angka putus sekolah meningkat, serta minat untuk mengikuti program pendidikan nonformal/kesetaraan masih terbatas.

Solusi Alternatif:

- a. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
Melakukan kampanye secara intensif mengenai pentingnya pendidikan, baik formal maupun kesetaraan, melalui pendekatan persuasif berbasis komunitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
- b. Pemanfaatan Program Tuntas Banjar secara optimal
Mengintegrasikan kegiatan sosialisasi, pendataan anak tidak sekolah, serta fasilitasi masuk ke program kesetaraan dalam satu alur intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan.
- c. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas
Melakukan kunjungan langsung (door to door) kepada keluarga yang anaknya tidak bersekolah untuk memberikan pemahaman dan solusi yang sesuai dengan kondisi mereka.

2) Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan

Faktor Pendorong:

- a. Adanya keinginan sebagian ponpes untuk melaksanakan pendidikan kesetaraan

Sebagian ponpes menunjukkan komitmen dan minat untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi santri. Hal ini menjadi modal awal yang kuat untuk mendorong perluasan akses pendidikan kesetaraan melalui pendekatan berbasis keagamaan dan komunitas.

Faktor Penghambat:

- a. Tidak semua pondok pesantren (ponpes) yang dipetakan menindaklanjuti hasil pemetaan

Meskipun telah dilakukan pemetaan potensi dan kebutuhan, tidak seluruh ponpes menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, seperti penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap manfaat program, kekhawatiran terhadap beban administrasi, keterbatasan SDM pengelola, serta belum adanya kesiapan sarana dan prasarana. Dampaknya, potensi pengembangan layanan pendidikan kesetaraan di lingkungan ponpes belum optimal.

Solusi Alternatif:

- a. Pendekatan persuasif dan advokasi kepada ponpes

Melakukan sosialisasi secara intensif terkait manfaat pendidikan kesetaraan, baik dari sisi peningkatan kualitas lulusan maupun pengakuan ijazah, dengan melibatkan tokoh agama atau pimpinan ponpes yang sudah berhasil.

- b. Pendampingan teknis secara berkelanjutan

Memberikan bimbingan teknis terkait proses penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, mulai dari perizinan, kurikulum, hingga administrasi, guna mengurangi kekhawatiran terhadap beban pengelolaan.

- c. Penyederhanaan prosedur dan dukungan administrasi

Memfasilitasi kemudahan dalam proses perizinan dan pelaporan, termasuk menyediakan format atau template yang mudah digunakan oleh pengelola ponpes.

22. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUD. Kompetensi yang baik sangat diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan.

Faktor Pendorong:

- a. Hidupnya komunitas belajar di tingkat satuan pendidikan maupun antar sekolah (seperti IGTKI-HIMPAUDI dan Gugus PAUD)

Keberadaan komunitas belajar menjadi wadah efektif untuk berbagi praktik baik, diskusi, serta peningkatan kompetensi secara kolaboratif. Komunitas ini juga mampu mendorong semangat kebersamaan dan saling memotivasi antar pendidik dalam mengembangkan diri.

Faktor Penghambat:

- a. Rendahnya motivasi dan budaya belajar mandiri pada sebagian pendidik

Sebagian pendidik merasa bahwa pengalaman mengajar yang telah dimiliki selama bertahun-tahun sudah cukup, sehingga kurang terdorong untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Kondisi ini berdampak pada stagnasi kualitas pembelajaran, minimnya inovasi metode mengajar, serta kurangnya adaptasi terhadap perkembangan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, budaya belajar mandiri yang belum terbentuk menyebabkan rendahnya partisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional.

Solusi Alternatif::

- a. Optimalisasi peran komunitas belajar sebagai motor peningkatan kompetensi

Mengaktifkan forum IGTKI-HIMPAUDI dan Gugus PAUD sebagai ruang rutin untuk berbagi praktik baik, diskusi pembelajaran, dan pengembangan kurikulum secara kolaboratif.

- b. Penerapan pendekatan peer learning dan mentoring

Mendorong pendidik yang lebih aktif dan inovatif untuk menjadi mentor bagi rekan sejawat, sehingga terjadi transfer pengetahuan dan peningkatan motivasi secara alami.

- c. Pemberian stimulus motivasi dan apresiasi

Memberikan penghargaan atau pengakuan kepada pendidik yang aktif mengikuti pengembangan kompetensi, sebagai upaya membangun budaya belajar dan kompetisi positif.

23. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan nonformal/kesetaraan menjadi bagian penting dalam upaya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Guru dan tenaga kependidikan yang kompeten mampu memberikan layanan pembelajaran yang relevan, bermakna, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat belajar.

Faktor Pendorong:

a. Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jalur Kesetaraan

Penerapan Kurikulum Merdeka mendorong transformasi pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Adanya modul ajar, proyek penguatan profil pelajar, serta asesmen formatif memberikan kerangka yang lebih terstruktur sekaligus adaptif, sehingga dapat membantu tutor dalam mengelola pembelajaran meskipun dengan keterbatasan waktu.

Faktor Penghambat:

a. Fenomena “Double Job” (Beban Kerja Ganda)

Banyak tutor pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) merangkap pekerjaan sebagai guru honorer di sekolah formal atau memiliki pekerjaan lain di sektor berbeda. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan waktu dan energi untuk fokus pada tugas sebagai tutor, seperti perencanaan pembelajaran, penyusunan modul, pelaksanaan asesmen, serta pelaporan. Dampaknya, kualitas implementasi pembelajaran—termasuk penerapan kurikulum—menjadi kurang optimal, terutama pada awal tahun (Triwulan I) saat penyesuaian program sedang berlangsung.

Solusi Alternatif:

a. Penyesuaian beban kerja dan penjadwalan yang fleksibel

Mengatur jadwal pembelajaran secara lebih adaptif (kelas malam/akhir pekan atau sistem blok) agar selaras dengan ketersediaan waktu tutor yang memiliki pekerjaan ganda.

b. Pemanfaatan perangkat ajar Kurikulum Merdeka secara praktis

Menggunakan modul ajar yang sudah tersedia sebagai acuan utama, sehingga tutor tidak perlu menyusun dari nol dan dapat menghemat waktu dalam perencanaan pembelajaran.

c. Penguatan pembelajaran kolaboratif antar tutor

Mendorong kerja sama antar tutor dalam satu PKBM/SKB atau antar satuan untuk berbagi perangkat ajar, materi, dan strategi pembelajaran guna mengurangi beban individu.

d. Pelaksanaan bimtek singkat dan terfokus

Menyelenggarakan pelatihan teknis yang ringkas dan aplikatif terkait Kurikulum Merdeka (modul ajar, proyek, asesmen formatif) yang dapat langsung diterapkan tanpa menyita banyak waktu.

24. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan kualifikasi pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan upaya strategis dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu. Pendidik dengan kualifikasi minimal S1/D4 diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran yang profesional, inovatif, dan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Faktor Pendorong:

a. Semakin banyaknya perguruan tinggi yang membuka Program Studi PG-PAUD (termasuk sistem PJJ)

Ketersediaan program studi PG-PAUD yang semakin luas, baik melalui perkuliahan tatap muka maupun Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) seperti di Universitas Terbuka, memberikan alternatif akses pendidikan yang lebih fleksibel dari sisi waktu, lokasi, dan biaya. Hal ini menjadi peluang bagi guru PAUD untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama.

Faktor Penghambat:

a. Faktor finansial sebagai penghambat utama peningkatan kualifikasi pendidik PAUD

Sebagian besar guru PAUD, khususnya di lembaga swasta/kelompok bermain di wilayah desa, masih menerima honorarium relatif rendah (bahkan di bawah UMR). Kondisi ini membuat kemampuan untuk membiayai pendidikan lanjutan (S1 PG-PAUD) secara mandiri menjadi sangat terbatas. Dampaknya, peningkatan kualifikasi akademik pendidik

berjalan lambat, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap mutu layanan PAUD.

Solusi Alternatif:

a. Fasilitasi akses beasiswa dan bantuan pendidikan

Menginventarisasi guru PAUD yang belum berkualifikasi S1, kemudian memfasilitasi pengajuan bantuan seperti beasiswa pemerintah daerah, program pusat, atau skema bantuan dari mitra.

b. Pendampingan dan sosialisasi intensif

Melakukan sosialisasi terkait peluang kuliah (jalur, biaya, beasiswa) serta pendampingan proses pendaftaran agar guru PAUD lebih siap dan termotivasi.

25. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja ini bertujuan mewujudkan ketersediaan serta pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan sesuai kebutuhan pada setiap satuan pendidikan, sehingga mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan yang efektif, merata, dan berkeadilan.

1) Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Faktor Pendorong:

a. Sinergi dengan organisasi profesi (HIMPAUDI & IGTKI)

Organisasi profesi berperan aktif dalam memetakan potensi calon pemimpin di tingkat gugus serta mendorong guru-guru senior yang memiliki kapasitas kepemimpinan untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Melalui forum komunikasi yang rutin, proses identifikasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas calon kepala sekolah dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Semangat kolektif ini menjadi kekuatan dalam menjaga keberlangsungan kepemimpinan di satuan PAUD.

Faktor Penghambat:

a. Fenomena aging population (penuaan) pada Kepala Sekolah TK Negeri

Banyaknya Kepala Sekolah TK Negeri di Kabupaten Banjar yang memasuki masa pensiun dalam waktu berdekatan menyebabkan kekosongan jabatan secara simultan. Kondisi ini menimbulkan gangguan

pada kesinambungan kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan satuan pendidikan. Selain itu, belum semua guru memiliki kesiapan administratif maupun kompetensi kepemimpinan untuk segera mengisi jabatan yang ditinggalkan, sehingga proses pengisian jabatan membutuhkan waktu.

Solusi Alternatif:

a. Penunjukan pelaksana tugas (Plt) secara cepat dan terukur

Mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah dengan penunjukan Plt dari guru senior atau pengelola yang memenuhi kriteria minimal, guna memastikan operasional satuan pendidikan tetap berjalan.

b. Percepatan pemetaan dan penetapan calon kepala sekolah

Berkoordinasi dengan HIMPAUDI dan IGTKI untuk mengidentifikasi dan menetapkan daftar calon potensial yang siap diusulkan, berdasarkan kompetensi dan kelengkapan administrasi.

c. Pendampingan pemenuhan persyaratan administratif

Memberikan fasilitasi kepada calon kepala sekolah dalam melengkapi dokumen, sertifikasi, dan kualifikasi yang dibutuhkan agar proses pengangkatan dapat dipercepat.

2) Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Faktor Pendorong:

a. Sinergi dengan Penilik dan Pengurus Gugus PAUD

Kolaborasi antara pengawas sekolah, penilik PAUD, dan pengurus gugus/PKG menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlangsungan pembinaan. Peran penilik dan gugus membantu menjangkau satuan pendidikan secara lebih dekat, melakukan pendampingan rutin, serta menjadi perpanjangan tangan pengawas dalam pelaksanaan monitoring dan pembinaan di tingkat lapangan..

Faktor Penghambat:

a. Berkurangnya jumlah pengawas akibat pensiun tidak diimbangi rekrutmen baru

Kabupaten Banjar mengalami kondisi banyaknya pengawas sekolah yang memasuki masa purna tugas secara bersamaan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, proses rekrutmen atau pengangkatan

pengawas baru dari ASN yang memenuhi kualifikasi belum berjalan optimal. Dampaknya, pengawas yang tersisa harus menangani jumlah satuan PAUD yang sangat banyak dengan cakupan wilayah yang luas, sehingga terjadi overload beban kerja. Kondisi ini berpotensi menurunkan intensitas pembinaan, kualitas supervisi, serta efektivitas monitoring dan evaluasi di lapangan, khususnya pada awal tahun (Triwulan I) saat banyak program mulai berjalan.

Solusi Alternatif:

a. Optimalisasi pembagian wilayah binaan secara proporsional

Melakukan penataan ulang wilayah kerja pengawas dengan mempertimbangkan jumlah satuan dan jarak geografis, sehingga beban kerja dapat lebih seimbang.

b. Pelaksanaan pembinaan kolektif melalui gugus/PKG

Mengadakan pertemuan pembinaan secara kelompok di tingkat gugus untuk menjangkau lebih banyak satuan pendidikan sekaligus dalam satu waktu.

c. Inventarisasi dan penyiapan calon pengawas potensial

Mengidentifikasi ASN atau tenaga pendidik yang memenuhi syarat untuk dipersiapkan sebagai calon pengawas, sebagai langkah awal regenerasi.

26. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung akses pendidikan, terutama dalam menurunkan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Peningkatan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Faktor Pendorong:

a. Adanya instruksi Kepala Dinas untuk pendataan berkala oleh operator Dapodik

Instruksi ini menjadi landasan kuat dalam memperbaiki kualitas data ATS melalui pembaruan dan pemutakhiran secara rutin. Keterlibatan operator Dapodik memungkinkan proses pengumpulan dan verifikasi data dilakukan lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga membuka peluang perbaikan akurasi data.

Faktor Penghambat:

a. Data ATS pada web masih bersifat gelondongan (belum terfilter)

Data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang ditampilkan pada sistem masih berupa data mentah tanpa pemilahan berdasarkan kriteria usia, khususnya batas usia prioritas (≤ 17 tahun). Akibatnya, data yang muncul masih mencakup usia di atas 17 tahun sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam perencanaan program, penentuan sasaran intervensi, serta pengukuran capaian kinerja. Kondisi ini juga menyulitkan proses validasi dan penajaman target penanganan ATS pada Triwulan I.

Solusi Alternatif:

a. Penyaringan (filtering) data ATS berbasis kriteria prioritas

Melakukan pemilahan data berdasarkan usia (misalnya ≤ 17 tahun), status sekolah, dan variabel penting lainnya untuk menghasilkan data sasaran yang lebih akurat dan siap intervensi.

b. Validasi dan verifikasi data secara berjenjang

Mengoptimalkan peran operator Dapodik di tingkat satuan pendidikan/desa untuk melakukan pengecekan ulang data ATS, sehingga data yang digunakan benar-benar valid.

c. Penguatan koordinasi lintas pihak

Melibatkan pemerintah desa/kelurahan, satuan pendidikan, dan pihak terkait dalam proses pemutakhiran data agar cakupan dan akurasi data ATS lebih optimal.

27. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan satuan pendidikan yang tertata, profesional, dan akuntabel melalui penguatan tata kelola, pemenuhan standar kelembagaan, serta peningkatan kapasitas manajerial, sehingga mampu menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu, efektif, dan berkelanjutan.

Faktor Pendorong:

a. Dukungan Dinas Pendidikan dalam peningkatan akreditasi

Dinas Pendidikan telah memberikan dukungan melalui fasilitasi pemenuhan struktur pendidik dan tenaga kependidikan serta penyediaan sarana dan prasarana. Dukungan ini menjadi faktor penting dalam membantu satuan pendidikan mempersiapkan diri menghadapi proses

akreditasi ulang, baik dari sisi administrasi maupun pemenuhan standar nasional pendidikan.

Faktor Penghambat:

- a. Satuan pendidikan masih dalam tahap evaluasi ulang menjelang berakhirnya masa akreditasi

Sejumlah satuan pendidikan berada pada fase evaluasi ulang karena masa berlaku akreditasi akan segera berakhir. Pada tahap ini, banyak satuan pendidikan belum sepenuhnya siap dalam memenuhi instrumen akreditasi, baik dari aspek dokumen administrasi, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, maupun sarana dan prasarana. Kondisi ini berpotensi menghambat proses reakreditasi tepat waktu serta dapat mempengaruhi capaian mutu kelembagaan jika tidak segera ditindaklanjuti.

Solusi Alternatif:

- a. Percepatan identifikasi kesiapan satuan pendidikan

Melakukan pemetaan cepat terhadap satuan pendidikan yang masa akreditasinya akan berakhir, termasuk mengidentifikasi kekurangan pada setiap standar akreditasi.

- b. Pendampingan intensif penyusunan dokumen akreditasi

Memberikan bimbingan teknis dan asistensi langsung dalam penyusunan dan kelengkapan dokumen akreditasi agar sesuai dengan instrumen yang berlaku.

- c. Penguatan koordinasi antara satuan pendidikan dan dinas

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara berkala untuk memantau progres kesiapan dan mengatasi kendala secara cepat.

28. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan dapat menerapkan Kurikulum Nasional secara konsisten serta mengembangkan muatan lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Kurikulum Nasional memberikan standar minimal kompetensi yang harus dicapai, sementara muatan lokal memberi ruang bagi sekolah untuk memperkenalkan kearifan lokal, budaya, dan kondisi sosial masyarakat sekitar.

Faktor Pendorong:

a. Inisiasi penyusunan kurikulum muatan lokal oleh Seksi Kurikulum Bidang SD

Seksi kurikulum telah mulai melakukan langkah awal strategis melalui pembentukan tim penyusun kurikulum muatan lokal. Tahapan ini menjadi fondasi penting dalam memastikan kurikulum yang disusun memiliki arah yang jelas, terstruktur, serta sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Kesiapan tim ini juga menjadi modal dalam mempercepat penyusunan dokumen kurikulum sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Faktor Penghambat:

a. Penerapan kurikulum nasional dan muatan lokal baru dilaksanakan pada tahun ajaran baru

Implementasi kurikulum baru, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal, dijadwalkan mulai pada tahun ajaran baru sehingga pada Triwulan I belum dapat diimplementasikan secara penuh di satuan pendidikan. Kondisi ini menyebabkan capaian kinerja terkait implementasi kurikulum belum terlihat pada awal tahun, serta masih terbatas pada tahap persiapan seperti penyusunan dokumen, perangkat ajar, dan kesiapan SDM. Selain itu, belum meratanya pemahaman pendidik terhadap kurikulum baru juga menjadi tantangan dalam percepatan implementasi.

Solusi Alternatif:

a. Percepatan penyusunan dokumen kurikulum muatan lokal

Mengoptimalkan kinerja tim penyusun untuk menyelesaikan draft kurikulum, termasuk struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan perangkat ajar dasar sebelum tahun ajaran baru.

b. Peningkatan kapasitas pendidik melalui sosialisasi dan bimtek awal

Melaksanakan sosialisasi konsep kurikulum baru dan pelatihan singkat agar guru memiliki pemahaman awal sebelum implementasi.

c. Penguatan koordinasi tim penyusun dan satuan pendidikan

Menjalin komunikasi aktif antara tim kurikulum dan sekolah untuk memastikan kebutuhan lapangan terakomodasi dalam penyusunan kurikulum.

29. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Upaya meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan merupakan prioritas dalam rangka menjamin layanan pendidikan yang merata dan bermutu di seluruh satuan pendidikan.

Pemerataan tidak hanya mencakup distribusi guru secara kuantitas, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas guru melalui pengembangan profesionalisme dan kualifikasi akademik.

1) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik

Faktor Pendorong:

- a. Adanya kebijakan nasional terkait kewajiban sertifikasi pendidik
Kebijakan ini menjadi dorongan kuat bagi guru untuk mengikuti PPG sebagai standar profesionalisme, sehingga meningkatkan motivasi untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
- b. Pemanfaatan sistem pendataan dan manajemen (Dapodik dan SIMPKB)
Keberadaan sistem digital memudahkan proses pendataan, pendaftaran, serta pemantauan status keikutsertaan guru dalam PPG, sehingga proses menjadi lebih terstruktur dan transparan.

Faktor Penghambat:

- a. Tingginya beban tugas mengajar dan administrasi
Guru menghadapi beban kerja yang cukup tinggi, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun administrasi (perencanaan, penilaian, pelaporan), sehingga waktu untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi atau kurang optimalnya keterlibatan guru dalam proses PPG.
- b. Tingkat kelulusan PPG yang belum optimal
Sebagian guru belum berhasil lulus PPG pada percobaan pertama, sehingga harus mengulang atau tertunda dalam memperoleh sertifikat pendidik. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kesiapan akademik, kurangnya pemahaman terhadap materi ujian, serta minimnya pendampingan.

Solusi Alternatif:

- a. Penyesuaian beban kerja dan pembagian tugas
Mengoptimalkan pembagian tugas di satuan pendidikan agar guru yang mengikuti PPG mendapatkan kelonggaran waktu, misalnya melalui redistribusi jam mengajar atau dukungan administratif.
- b. Pelaksanaan pendampingan belajar (coaching clinic)
Menyelenggarakan bimbingan teknis atau klinik belajar bagi guru peserta PPG, khususnya pada materi yang sering menjadi kendala, guna meningkatkan kesiapan dan tingkat kelulusan.

c. Pemanfaatan komunitas belajar dan KKG

Mengaktifkan forum guru sebagai wadah diskusi dan berbagi pengalaman antar peserta PPG, sehingga dapat saling mendukung dalam proses belajar.

2) Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar

Faktor Pendorong:

a. Perencanaan kebutuhan guru berbasis data yang akurat (didukung Dapodik)

Pemanfaatan data seperti jumlah peserta didik, rasio guru-murid, dan kondisi geografis memungkinkan perencanaan distribusi guru yang lebih tepat sasaran. Sistem Dapodik membantu menyediakan data terkini (real-time) sehingga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerataan tenaga pendidik.

Faktor Penghambat:

a. Kekurangan guru di wilayah terpencil dan perbatasan

Wilayah terpencil/perbatasan menghadapi keterbatasan akses transportasi, minimnya fasilitas pendukung, serta kondisi lingkungan yang menantang. Hal ini menyebabkan minat guru untuk ditempatkan di wilayah tersebut relatif rendah dibandingkan daerah perkotaan. Dampaknya, terjadi ketimpangan distribusi guru, beban mengajar yang tidak seimbang, serta berpotensi menurunkan kualitas layanan pendidikan di wilayah tersebut.

Solusi Alternatif:

a. Pemetaan prioritas kebutuhan guru berbasis data

Mengoptimalkan data Dapodik untuk mengidentifikasi wilayah yang mengalami kekurangan guru secara signifikan, sehingga intervensi dapat difokuskan pada daerah prioritas.

b. Penugasan sementara/redistribusi guru

Melakukan penataan ulang distribusi guru secara sementara (misalnya penugasan tambahan atau rotasi terbatas) untuk menutup kekurangan mendesak di wilayah terpencil.

c. Pemberian insentif dan motivasi khusus

Mengupayakan pemberian insentif tambahan atau penghargaan bagi guru yang bersedia bertugas di daerah terpencil/perbatasan, sebagai daya tarik awal.

30. Meningkatkan Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola dan manajemen satuan pendidikan jenjang SD yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penguatan perencanaan, pengelolaan sumber daya, administrasi sekolah, serta peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Faktor Pendorong:

- a. Para pendamping pengelolaan Dana BOS telah memberikan teguran dan pembinaan berupa penundaan pencairan dana apabila laporan penggunaan anggaran belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut mendorong satuan pendidikan untuk lebih tertib administrasi, meningkatkan ketelitian dalam penyusunan SPJ, serta mempercepat perbaikan dokumen agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Faktor Penghambat:

- a. Masih banyak satuan pendidikan yang belum sesuai dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pada tahun sebelumnya.

Ketidaksesuaian tersebut meliputi kelengkapan dokumen, kesalahan penginputan, ketidaksesuaian bukti belanja dengan laporan, keterlambatan penyampaian laporan, serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan dan pelaporan Dana BOS. Kondisi ini menyebabkan proses verifikasi menjadi lebih lama dan berpotensi menghambat pencairan dana pada tahap berikutnya.

Solusi Alternatif:

- a. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Berkala

Mengadakan pelatihan dan pendampingan rutin kepada bendahara, operator, dan kepala sekolah terkait tata cara penyusunan SPJ yang benar sesuai juknis Dana BOS.

- b. Penyediaan Format dan Contoh SPJ Standar

Menyusun dan membagikan template SPJ beserta contoh pengisian yang sesuai ketentuan agar satuan pendidikan memiliki acuan yang seragam.

c. Peningkatan Pendampingan dan Monitoring

Pendamping BOS melakukan monitoring berkala serta pemeriksaan awal terhadap dokumen SPJ sebelum diajukan, sehingga kesalahan dapat diperbaiki lebih cepat.

31. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Belajar

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, sehat, inklusif, dan mendukung proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, serta prestasi peserta didik.

1) Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar

Faktor Pendorong:

a. Adanya evaluasi terhadap hasil Rapor Pendidikan

Satuan pendidikan telah melakukan evaluasi terhadap hasil Rapor Pendidikan sebagai bahan identifikasi kelemahan dan perbaikan mutu layanan pendidikan. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran, lingkungan belajar, dan kesiapan peserta didik menghadapi ANBK.

Faktor Penghambat:

a. Nilai berdasarkan Rapor Pendidikan

Nilai diperoleh dari Rapor Pendidikan yang penilaiannya berdasarkan hasil survei peserta sampling pada saat pelaksanaan ANBK. Kondisi ini menyebabkan hasil capaian sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, kesiapan, dan partisipasi peserta didik yang menjadi sampel. Selain itu, masih terdapat peserta didik yang kurang memahami pentingnya pengisian survei secara objektif dan optimal, sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di satuan pendidikan.

Solusi Alternatif:

a. Peningkatan Pemahaman Peserta Didik tentang ANBK dan Survei

Memberikan sosialisasi kepada peserta didik mengenai tujuan, manfaat, dan pentingnya pengisian survei lingkungan belajar secara jujur dan bertanggung jawab.

b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Belajar

Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung partisipasi aktif peserta didik sehingga berdampak positif terhadap hasil survei.

c. Evaluasi Berkala terhadap Hasil Rapor Pendidikan

Melakukan analisis dan tindak lanjut terhadap indikator-indikator dalam Rapor Pendidikan guna mengetahui aspek yang masih perlu ditingkatkan.

2) Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar

Faktor Pendorong:

b. Adanya evaluasi terhadap hasil Rapor Pendidikan

Satuan pendidikan telah melakukan evaluasi terhadap hasil Rapor Pendidikan sebagai dasar dalam mengidentifikasi kelemahan dan menentukan langkah perbaikan mutu pendidikan, khususnya pada aspek pembelajaran, lingkungan belajar, serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi ANBK.

Faktor Penghambat:

b. Nilai berdasarkan Rapor Pendidikan

Nilai diperoleh dari Rapor Pendidikan yang penilaiannya berdasarkan hasil survei peserta sampling pada saat pelaksanaan ANBK. Hal ini menyebabkan capaian nilai sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan, pemahaman, dan partisipasi peserta didik yang menjadi sampel. Selain itu, masih terdapat peserta didik yang belum memahami pentingnya pelaksanaan survei dan pengisian instrumen secara objektif, sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata satuan pendidikan.

Solusi Alternatif:

a. Melaksanakan Sosialisasi ANBK dan Rapor Pendidikan

Memberikan pemahaman kepada guru dan peserta didik mengenai tujuan ANBK, mekanisme survei, serta pentingnya pengisian instrumen secara objektif dan bertanggung jawab.

b. Melakukan Analisis Awal Rapor Pendidikan

Mengidentifikasi indikator-indikator yang masih rendah sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pada semester berjalan.

3) Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar

Faktor Pendorong:

a. Evaluasi hasil Rapor Pendidikan

Satuan pendidikan telah melakukan evaluasi terhadap hasil Rapor Pendidikan tahun sebelumnya melalui rapat koordinasi bersama kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis indikator-indikator yang masih rendah, terutama pada aspek literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar.

b. Adanya dukungan dari semua pihak

Adanya komitmen dari warga sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, dukungan pendampingan dari pengawas dan tim manajemen sekolah, serta kesiapan guru dalam menyusun program tindak lanjut menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan capaian Rapor Pendidikan pada tahun berjalan.

Faktor Penghambat:

a. Nilai hanya di dapat dari Rapor Pendidikan

Nilai capaian diperoleh dari hasil Rapor Pendidikan yang penilaiannya bersumber dari survei peserta didik sampling pada saat pelaksanaan ANBK. Dalam pelaksanaannya, hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan akademik, kondisi psikologis, tingkat pemahaman peserta didik terhadap instrumen survei, serta kemampuan literasi dan numerasi peserta sampling. Selain itu, masih terdapat peserta didik yang menganggap survei dan ANBK hanya sebagai formalitas sehingga kurang maksimal dalam mengerjakan soal maupun mengisi survei lingkungan belajar dan karakter.

b. Adanya keterbatasan waktu dalam pendampingan

Keterbatasan waktu pembinaan, kurangnya pembiasaan penggunaan aplikasi berbasis komputer, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi rapor pendidikan pada tahun sebelumnya juga menjadi kendala dalam peningkatan capaian nilai. Akibatnya, hasil rapor pendidikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi dan potensi satuan pendidikan secara menyeluruh.

Solusi Alternatif:

a. Melaksanakan Analisis Mendalam terhadap Rapor Pendidikan

Pada awal triwulan, sekolah melakukan identifikasi dan pemetaan indikator yang masih rendah untuk menentukan prioritas perbaikan program pembelajaran dan lingkungan belajar.

b. Mengadakan Sosialisasi ANBK kepada Guru dan Peserta Didik

Memberikan pemahaman terkait tujuan, manfaat, serta pentingnya ANBK dan survei lingkungan belajar agar peserta didik lebih serius dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

c. Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif

Sekolah meningkatkan kenyamanan, kedisiplinan, dan budaya positif di lingkungan sekolah agar peserta didik lebih termotivasi dalam belajar dan mengikuti kegiatan asesmen.

32. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Sasaran kinerja ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik pendidik serta tenaga kependidikan (PTK) di jenjang Sekolah Dasar guna mendukung tercapainya pembelajaran yang berkualitas. Kompetensi guru dan tenaga kependidikan merupakan faktor kunci dalam menjamin mutu layanan pendidikan dan pencapaian hasil belajar siswa.

Faktor Pendorong Capaian

a. Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Awal Tahun

Pada Triwulan I, peningkatan kompetensi PTK didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengembangan profesional seperti workshop, rapat koordinasi, komunitas belajar, dan pelatihan awal semester yang difasilitasi oleh sekolah maupun dinas pendidikan.

b. Dukungan Kepala Sekolah dan Pengawas

Kepala sekolah dan pengawas telah memberikan arahan, supervisi akademik, dan motivasi kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara aktif.

c. Aktivasi Komunitas Belajar Guru

Kegiatan MGMP, KKG, dan komunitas belajar mulai dilaksanakan kembali pada awal tahun sebagai wadah berbagi praktik baik dan diskusi terkait implementasi pembelajaran.

Faktor Penghambat Capaian

a. Belum Meratanya Partisipasi Guru dalam Pelatihan

Masih terdapat guru yang belum aktif mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi karena keterbatasan waktu dan penyesuaian tugas pada awal semester.

b. Tingginya Beban Administratif Awal Tahun

Pada Triwulan I, guru masih fokus pada penyusunan perangkat pembelajaran, administrasi kelas, dan pelaporan awal semester sehingga waktu pengembangan diri menjadi terbatas.

c. Monitoring Pengembangan Kompetensi Belum Optimal

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keterlibatan guru dalam pelatihan dan dampaknya terhadap pembelajaran masih belum berjalan maksimal pada awal tahun.

Solusi Alternatif:

a. Melaksanakan Pelatihan dan Pendampingan Internal Sekolah

Sekolah melaksanakan pelatihan sederhana, diskusi kelompok, dan berbagi praktik baik antar guru untuk meningkatkan kompetensi secara bertahap.

b. Menyusun Jadwal Pengembangan Kompetensi yang Terencana

Sekolah mengatur jadwal kegiatan pelatihan dan komunitas belajar agar tidak berbenturan dengan tugas administrasi guru pada awal semester.

c. Mengaktifkan Komunitas Belajar Guru

Mengoptimalkan kegiatan MGMP, KKG, dan komunitas belajar sebagai wadah kolaborasi, diskusi, dan peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan.

d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi

Melakukan pemantauan berkala terhadap keterlibatan guru dalam kegiatan pengembangan kompetensi serta tindak lanjut penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas.

33. Meningkatkan Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan pendidik serta tenaga kependidikan (PTK) yang kompeten di seluruh satuan pendidikan dasar, agar proses pembelajaran dan manajemen sekolah dapat berjalan secara optimal. Pemenuhan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas menjadi aspek penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah.

1) Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Faktor Pendorong Capaian

a. Pemanfaatan Data Dapodik

Penggunaan Dapodik membantu dalam memperoleh data jumlah sekolah, kondisi kepala sekolah, dan kebutuhan tenaga kepemimpinan secara lebih akurat dan terintegrasi.

b. Koordinasi Antarinstansi

Adanya koordinasi antara dinas pendidikan, pengawas sekolah, BKPSDM, dan satuan pendidikan membantu mempercepat proses identifikasi kebutuhan dan penanganan kekosongan jabatan kepala sekolah.

c. Dukungan Monitoring dari Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah turut berperan dalam memberikan laporan kondisi lapangan dan kebutuhan kepala sekolah sehingga proses penataan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

Faktor Penghambat Capaian

a. Keterbatasan Sumber Daya Calon Kepala Sekolah

Jumlah guru yang memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi untuk diangkat menjadi kepala sekolah masih terbatas. Hal ini menyebabkan proses pemenuhan kebutuhan kepala sekolah belum dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh satuan pendidikan SD.

b. Proses Rekrutmen dan Penetapan Membutuhkan Waktu

Pelaksanaan seleksi, pengusulan, verifikasi berkas, hingga penetapan kepala sekolah memerlukan tahapan administrasi dan koordinasi lintas instansi yang cukup panjang sehingga pemenuhan jabatan belum dapat dilakukan secara cepat.

c. Distribusi Kepala Sekolah Belum Merata

Masih terdapat sekolah yang mengalami kekurangan kepala sekolah definitif, terutama pada wilayah tertentu, sementara di beberapa wilayah lain terjadi kelebihan atau ketidakseimbangan distribusi tenaga kepemimpinan sekolah.

d. Adanya Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah

Kekosongan jabatan terjadi akibat kepala sekolah memasuki masa pensiun, mutasi, rotasi jabatan, atau berakhirnya masa tugas sehingga beberapa sekolah sementara dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).

e. Penyesuaian Kebijakan dan Regulasi

Perubahan atau penyesuaian kebijakan terkait pengangkatan kepala sekolah memengaruhi proses penataan dan pemenuhan kebutuhan kepala sekolah pada awal tahun berjalan.

Solusi Alternatif:

a. Melakukan Pemutakhiran Data Secara Berkala

Melakukan pembaruan data melalui Dapodik agar kebutuhan kepala sekolah dapat dipetakan secara akurat dan cepat.

b. Melaksanakan Pemetaan Kebutuhan Kepala Sekolah

Mengidentifikasi sekolah yang mengalami kekosongan kepala sekolah serta menentukan prioritas pemenuhan berdasarkan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.

c. Mengoptimalkan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt)

Menunjuk Plt kepala sekolah pada sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif agar pelaksanaan administrasi dan layanan pendidikan tetap berjalan dengan baik.

2) Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Faktor Pendorong Capaian

a. Adanya Kebijakan Pemenuhan Rasio Pengawas

Pemerintah pusat dan daerah terus mendorong pemenuhan rasio ideal pengawas terhadap sekolah binaan melalui kebijakan penataan dan penguatan pengawasan pendidikan.

b. Dukungan Program Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan program pembinaan pendidikan dari dinas terkait membantu memperkuat peran pengawas dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan manajemen sekolah.

Faktor Penghambat Capaian

a. Jumlah Pengawas Sekolah Masih Terbatas

Jumlah pengawas yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya satuan pendidikan yang harus dibina dan diawasi. Kondisi ini menyebabkan beban kerja pengawas menjadi cukup tinggi dalam melaksanakan tugas pembinaan, monitoring, supervisi, dan evaluasi di sekolah.

b. Tingginya Beban Administratif Pengawas

Selain melaksanakan pembinaan akademik dan manajerial, pengawas juga memiliki tugas administrasi dan pelaporan yang cukup

banyak sehingga waktu kunjungan dan pendampingan ke sekolah menjadi terbatas.

c. Adanya Pengawas yang Memasuki Masa Pensiun

Beberapa pengawas memasuki masa pensiun atau mengalami mutasi jabatan sehingga menyebabkan kekurangan tenaga pengawas pada sejumlah wilayah binaan.

Solusi Alternatif:

a. Melakukan Pemetaan Kebutuhan Pengawas

Melakukan identifikasi jumlah sekolah binaan dan kebutuhan pengawas pada setiap wilayah untuk menentukan prioritas penataan dan distribusi pengawas secara lebih merata.

b. Mengoptimalkan Supervisi Berbasis Daring

Memanfaatkan teknologi komunikasi dan platform digital untuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi sekolah binaan secara berkala.

34. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Sekolah Dasar untuk memastikan bahwa seluruh pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, sehingga mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.

Faktor Pendorong Capaian

a. Kewajiban Kualifikasi Minimal S1/D4

Adanya ketentuan standar nasional pendidikan yang mewajibkan guru memiliki kualifikasi minimal S1/D4 menjadi dorongan utama bagi satuan pendidikan dan guru untuk meningkatkan jenjang pendidikan sesuai regulasi yang berlaku.

b. Dukungan Izin Belajar dan Tugas Belajar

Pemerintah daerah dan satuan pendidikan memberikan fasilitas berupa izin belajar atau tugas belajar bagi guru yang ingin melanjutkan pendidikan, sehingga membuka peluang peningkatan kualifikasi secara lebih terarah.

c. Kesadaran Peningkatan Profesionalisme

Semakin meningkatnya kesadaran guru terhadap pentingnya kualifikasi pendidikan dalam menunjang profesionalisme dan kualitas pembelajaran di kelas.

Faktor Penghambat Capaian

a. Beban Tugas Mengajar dan Administrasi yang Tinggi

Pada Triwulan I, guru masih dihadapkan pada beban kerja yang cukup tinggi, baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun penyusunan perangkat administrasi. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan waktu bagi guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan ke jenjang S1/D4 atau S2 karena fokus utama masih pada pemenuhan tugas pokok di sekolah.

b. Kondisi Usia Mendekati Masa Pensiun

Sebagian guru yang sudah mendekati masa pensiun cenderung tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan efektivitas waktu, biaya, serta masa kerja yang tersisa sehingga minat untuk melanjutkan studi menjadi rendah.

c. Keterbatasan Waktu dan Kesempatan Studi

Tidak semua guru memiliki fleksibilitas waktu untuk mengikuti perkuliahan, terutama bagi yang bertugas di sekolah dengan jam mengajar padat atau berada di wilayah dengan akses pendidikan tinggi yang terbatas.

Solusi Alternatif:

a. Pengaturan Beban Kerja Guru

Sekolah melakukan penataan ulang pembagian tugas mengajar dan administrasi agar guru yang sedang atau akan melanjutkan pendidikan memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mengikuti perkuliahan.

b. Sosialisasi Pentingnya Kualifikasi Pendidikan

Melaksanakan sosialisasi kepada guru terkait pentingnya memiliki kualifikasi minimal S1/D4 serta dampaknya terhadap karier dan mutu pembelajaran.

c. Optimalisasi Program Izin Belajar dan Tugas Belajar

Mendorong guru yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan fasilitas izin belajar atau tugas belajar yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

35. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan, khususnya dalam memastikan anak-anak usia sekolah mengikuti pendidikan formal. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang merata dan inklusif.

Faktor Pendorong

a. Koordinasi Lintas Bidang Pendidikan

Adanya koordinasi dengan bidang Pembinaan SD serta bidang PNF/Kesetaraan membantu dalam penanganan anak tidak sekolah (ATS) dan penguatan layanan pendidikan formal maupun nonformal.

b. Program Wajib Belajar 9 Tahun

Program wajib belajar 9 tahun mendorong seluruh anak untuk menempuh pendidikan minimal hingga jenjang SMP sebagai dasar peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Peningkatan Kesadaran Orang Tua

Semakin meningkatnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan minimal sampai jenjang SMP bagi masa depan anak.

d. Keterlibatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Dukungan dari masyarakat, tokoh pendidikan, dan pemerintah daerah dalam mendorong anak untuk tetap bersekolah serta mencegah putus sekolah.

e. Ketersediaan Pendidikan Nonformal

Adanya layanan pendidikan kesetaraan seperti program Paket B sebagai alternatif bagi anak yang sempat putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan.

Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Biaya Pendidikan Tidak Langsung

Meskipun biaya sekolah sudah digratiskan, masih terdapat biaya tambahan seperti transportasi, pembelian seragam, buku, dan kebutuhan sekolah lainnya yang menjadi beban bagi sebagian keluarga. Kondisi ini dapat menghambat keberlanjutan pendidikan anak.

b. Pernikahan Dini

Terjadinya pernikahan usia dini menyebabkan sebagian anak, khususnya perempuan, tidak melanjutkan pendidikan karena harus menjalankan peran rumah tangga. Hal ini menjadi salah satu penyebab putus sekolah.

c. Rendahnya Motivasi Belajar

Sebagian peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah, yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, serta kurangnya dukungan dalam proses pembelajaran, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakmampuan menyelesaikan pendidikan.

d. Ketertinggalan Akademik

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan tertinggal pelajaran cenderung merasa tidak mampu mengikuti proses pembelajaran, sehingga berisiko putus sekolah apabila tidak mendapatkan pendampingan yang memadai.

Solusi Alternatif:

a. Pendataan dan Identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS)

Melakukan pendataan secara berkala terhadap anak yang berpotensi putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan untuk segera ditindaklanjuti.

b. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Memperkuat koordinasi dengan bidang Pembinaan SD, PNF, pemerintah desa, dan pihak terkait dalam penanganan anak putus sekolah.

c. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan

Melaksanakan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan minimal hingga SMP serta dampaknya bagi masa depan anak.

d. Program Pencegahan Pernikahan Dini

Bekerja sama dengan pihak sekolah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini terhadap keberlanjutan pendidikan.

36. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan. Kualitas kelembagaan mencakup berbagai aspek, termasuk manajemen sekolah, pelaksanaan kurikulum, sarana prasarana, dan proses evaluasi berbasis standar nasional pendidikan, yang tercermin melalui hasil akreditasi sekolah.

Faktor Pendorong Capaian

a. Mayoritas Satuan Pendidikan Telah Terakreditasi Minimal B

Sebanyak 65 satuan pendidikan telah memenuhi standar akreditasi minimal B. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan mutu pendidikan secara umum dan dapat menjadi contoh praktik baik bagi sekolah lain dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

b. Pembinaan dan Pendampingan dari Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah secara berkelanjutan melakukan pembinaan, supervisi, dan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam

meningkatkan tata kelola sekolah, administrasi, serta kualitas proses pembelajaran sesuai standar akreditasi.

c. Koordinasi dengan BAN-S/M Provinsi Kalimantan Selatan

Adanya koordinasi dengan BAN-S/M Provinsi Kalimantan Selatan mendukung pelaksanaan akreditasi serta memberikan arahan terkait pemenuhan instrumen dan standar penilaian akreditasi sekolah.

d. Komitmen Sekolah dalam Peningkatan Mutu

Sebagian besar satuan pendidikan memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pembenahan administrasi, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pemenuhan standar pendidikan secara bertahap.

Faktor Penghambat Capaian

a. Masih Terdapat Satuan Pendidikan yang Belum Memenuhi Standar Akreditasi Minimal

Masih terdapat 11 satuan pendidikan yang belum memenuhi standar akreditasi minimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya pemenuhan dokumen administrasi sekolah, serta kualitas pengelolaan pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan sesuai instrumen akreditasi.

b. Adanya Satuan Pendidikan Baru

Terdapat 1 satuan pendidikan baru yang belum dapat mengikuti proses akreditasi karena belum memenuhi masa operasional dan persyaratan administratif sesuai ketentuan pelaksanaan akreditasi. Akibatnya, sekolah tersebut belum dapat dinilai dalam pemenuhan standar minimal akreditasi.

c. Keterbatasan Pemahaman terhadap Instrumen Akreditasi

Sebagian satuan pendidikan masih mengalami kendala dalam memahami indikator dan instrumen penilaian akreditasi sehingga persiapan dokumen dan implementasi standar mutu belum optimal.

d. Belum Optimalnya Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

Beberapa sekolah masih mengalami keterbatasan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, baik pada aspek sarana prasarana, tenaga pendidik, pengelolaan sekolah, maupun mutu proses pembelajaran.

Solusi Alternatif:

a. Melaksanakan Pendampingan Intensif bagi Sekolah Belum Terakreditasi Minimal

Memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkala kepada 11 satuan pendidikan yang belum memenuhi standar akreditasi minimal, terutama pada aspek administrasi, pengelolaan sekolah, dan pemenuhan instrumen akreditasi.

b. Menyusun Rencana Tindak Lanjut Pemenuhan Standar

Sekolah menyusun program perbaikan berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah dan rekomendasi akreditasi agar pemenuhan standar dapat dilakukan secara bertahap dan terarah.

c. Penguatan Koordinasi dengan BAN-S/M

Meningkatkan koordinasi dengan BAN-S/M Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperoleh arahan, informasi kebijakan, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan akreditasi.

37. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja ini berfokus pada peningkatan implementasi Kurikulum Nasional dan muatan lokal di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Banjar, sebagai upaya untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar nasional sekaligus memperkaya konten pendidikan dengan nilai-nilai lokal yang relevan.

Faktor Pendorong Capaian

a. Adanya Kebijakan Implementasi Kurikulum Nasional

Penerapan kurikulum nasional didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan dan karakteristik peserta didik.

b. Dukungan Platform dan Sumber Belajar Digital

Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar serta berbagai sumber belajar digital membantu guru dalam memahami implementasi kurikulum nasional dan pengembangan pembelajaran berbasis proyek serta muatan lokal.

c. Pembinaan dan Pendampingan dari Pengawas dan Dinas Pendidikan

Pengawas sekolah dan dinas pendidikan secara berkala memberikan sosialisasi, supervisi, dan pendampingan terkait implementasi kurikulum nasional dan integrasi muatan lokal dalam pembelajaran.

Faktor Penghambat Capaian

a. Pemahaman Guru terhadap Implementasi Kurikulum Belum Merata

Masih terdapat guru yang belum sepenuhnya memahami penerapan kurikulum nasional, terutama dalam penyusunan perangkat ajar, asesmen, dan pembelajaran berbasis proyek.

b. Keterbatasan Kompetensi dalam Pengembangan Muatan Lokal

Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun materi dan strategi pembelajaran muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan peserta didik.

c. Keterbatasan Sumber Belajar dan Media Pembelajaran

Belum semua satuan pendidikan memiliki sumber belajar, bahan ajar, dan media pembelajaran yang mendukung implementasi kurikulum nasional dan muatan lokal secara optimal.

Solusi Alternatif:

a. Melaksanakan Pelatihan dan Bimtek Kurikulum

Mengadakan pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis bagi guru terkait implementasi kurikulum nasional, penyusunan perangkat ajar, asesmen, dan pembelajaran berbasis proyek.

b. Mengoptimalkan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar

Mendorong guru memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar sebagai sarana belajar mandiri dan pengembangan perangkat pembelajaran.

c. Mengembangkan Pembelajaran Muatan Lokal Berbasis Potensi Daerah

Sekolah menyusun materi muatan lokal yang relevan dengan budaya, potensi, dan kearifan lokal daerah agar pembelajaran lebih kontekstual dan menarik bagi peserta didik.

d. Meningkatkan Pendampingan dan Supervisi

Pengawas sekolah dan kepala sekolah melakukan pendampingan rutin, supervisi akademik, dan evaluasi terhadap penerapan kurikulum di satuan pendidikan.

38. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja ini berfokus pada upaya peningkatan pemerataan distribusi serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) di satuan pendidikan, guna mendukung mutu pembelajaran yang merata dan berkelanjutan. Pemerataan dan peningkatan kualitas PTK menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bermutu di seluruh wilayah.

1) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik

Faktor Pendorong Capaian

a. Koordinasi dengan Kepala Sekolah dan Pengawas

Adanya koordinasi dan kerja sama antara dinas pendidikan, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam pendataan guru membantu proses pemetaan kebutuhan guru sertifikasi secara lebih akurat.

b. Dukungan Pendataan Berbasis Sistem

Pemanfaatan data kepegawaian dan data pendidikan membantu dalam proses identifikasi guru yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti PPG.

c. Komitmen Sekolah dalam Mendukung Sertifikasi Guru

Kepala sekolah memberikan dukungan kepada guru untuk melengkapi administrasi dan mempersiapkan diri mengikuti program sertifikasi guru.

Faktor Penghambat Capaian

a. Guru Sertifikasi Memasuki Masa Purnatugas dan Meninggal Dunia

Pada Triwulan I terdapat guru bersertifikasi yang memasuki masa purnatugas maupun meninggal dunia sehingga jumlah guru bersertifikat pendidik mengalami penurunan. Kondisi ini memengaruhi capaian target pemenuhan guru sertifikasi pada satuan pendidikan.

b. Keterbatasan Kesempatan Mengikuti PPG

Masih terdapat guru yang belum terpanggil untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) karena keterbatasan kuota, mekanisme seleksi, serta penjadwalan dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan proses peningkatan jumlah guru bersertifikat belum dapat berjalan optimal pada Triwulan I.

c. Belum Meratanya Pemenuhan Persyaratan Administratif

Sebagian guru masih mengalami kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan kelengkapan data pendukung untuk mengikuti program PPG.

Solusi Alternatif:

a. Melakukan Pemutakhiran Data Guru Secara Berkala

Melaksanakan pendataan dan verifikasi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai dasar usulan calon peserta PPG pada periode berikutnya.

b. Menyusun Pemetaan Kebutuhan Guru Sertifikasi

Mengidentifikasi jumlah guru yang memasuki masa purnatugas, guru yang belum sertifikasi, dan kebutuhan guru bersertifikat pada setiap satuan pendidikan.

c. Meningkatkan Koordinasi dengan Kepala Sekolah dan Pengawas

Memperkuat koordinasi terkait kelengkapan administrasi, validasi data guru, dan kesiapan calon peserta PPG agar proses usulan dapat berjalan lebih optimal.

2) Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama

Faktor Pendorong Capaian

a. Koordinasi dengan BKPSDM

Adanya koordinasi dengan BKPSDM mendukung proses penataan dan distribusi guru secara berkala sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

b. Pemanfaatan Data Kebutuhan Guru

Data kebutuhan guru pada setiap sekolah membantu dalam pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan maupun kelebihan guru sehingga penataan distribusi dapat dilakukan lebih terarah.

c. Dukungan Kebijakan Pemerataan Guru

Pemerintah daerah terus mendorong pemerataan layanan pendidikan melalui kebijakan penataan distribusi guru agar kebutuhan tenaga pendidik dapat terpenuhi secara bertahap.

Faktor Penghambat Capaian

a. Perbedaan Kontur Geografis

Kondisi geografis yang beragam, seperti daerah terpencil, wilayah perairan, dan akses transportasi yang terbatas, menjadi kendala dalam pemerataan penempatan guru. Hal ini menyebabkan beberapa sekolah masih mengalami kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu.

b. Ketimpangan Distribusi Guru

Masih terdapat ketidakseimbangan jumlah guru antarwilayah, di mana sebagian sekolah mengalami kelebihan guru sementara sekolah lain masih kekurangan tenaga pendidik.

Solusi Alternatif:

a. Melakukan Pemetaan Kebutuhan Guru

Melaksanakan identifikasi dan pemetaan jumlah guru berdasarkan mata pelajaran, rombongan belajar, dan kondisi wilayah untuk mengetahui sekolah yang mengalami kekurangan atau kelebihan guru.

b. Mengoptimalkan Koordinasi dengan BKPSDM

Memperkuat koordinasi dengan BKPSDM terkait perencanaan redistribusi, mutasi, dan penempatan guru sesuai kebutuhan sekolah.

c. Menyusun Prioritas Distribusi Guru

Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah di wilayah terpencil, sulit dijangkau, atau yang mengalami kekurangan tenaga pendidik paling tinggi.

39. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola dan manajemen satuan pendidikan agar berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan. Peningkatan manajemen sekolah menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Faktor Pendorong Capaian

a. Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi kepala sekolah serta tenaga kependidikan mendukung peningkatan kemampuan dalam pengelolaan satuan pendidikan sesuai standar yang berlaku.

b. Peran Pengawas Sekolah dalam Monitoring dan Evaluasi

Pengawas sekolah secara berkala melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap pengelolaan sekolah sehingga membantu menjaga konsistensi penerapan prosedur dan tata kelola sekolah.

c. Adanya Forum MKKS

Forum MKKS menjadi wadah berbagi pengalaman, praktik baik (best practices), dan solusi antar kepala sekolah dalam menghadapi perubahan kebijakan dan penguatan manajemen sekolah.

Faktor Penghambat Capaian

a. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang Cepat

Adanya dinamika dan perubahan kebijakan pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, menyebabkan satuan pendidikan harus melakukan penyesuaian secara terus-menerus terhadap pedoman, standar, dan prosedur pengelolaan sekolah. Kondisi ini memerlukan kesiapan administrasi dan pemahaman yang cepat dari pihak sekolah.

b. Penyesuaian Administrasi dan Tata Kelola Sekolah

Perubahan regulasi berdampak pada perlunya penyesuaian dokumen perencanaan, pelaporan, penganggaran, dan administrasi sekolah sehingga membutuhkan waktu dan koordinasi yang cukup intensif pada Triwulan I.

c. Belum Meratanya Pemahaman terhadap Kebijakan Baru

Sebagian kepala sekolah dan tenaga kependidikan masih memerlukan pendampingan dalam memahami implementasi kebijakan baru, terutama yang berkaitan dengan tata kelola sekolah dan manajemen berbasis sekolah.

Solusi Alternatif:

d. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Secara Berkala

Melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait perubahan kebijakan pendidikan kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan agar implementasi kebijakan dapat dipahami secara tepat.

b. Mengoptimalkan Peran MKKS

Mengaktifkan forum MKKS sebagai sarana diskusi, koordinasi, dan berbagi praktik baik dalam penerapan kebijakan dan pengelolaan sekolah.

c. Meningkatkan Pendampingan dan Supervisi

Pengawas sekolah melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan tata kelola sekolah agar penyesuaian kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

40. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Tujuan dari sasaran kinerja ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui pengembangan dan penerapan kurikulum nasional serta muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, potensi daerah, dan kebutuhan perkembangan zaman.

Faktor Pendorong:

a. Adanya Landasan Kebijakan Daerah

Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2004 menjadi dasar hukum dalam pengembangan dan pelaksanaan muatan lokal keagamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

b. Dukungan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Tingginya dukungan masyarakat, tokoh agama, komite sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan terhadap penguatan pembelajaran keagamaan menjadi faktor pendorong dalam implementasi kurikulum muatan lokal.

c. Koordinasi dengan Pengawas dan Satuan Pendidikan

Terjalinnnya koordinasi yang baik antara dinas pendidikan, pengawas sekolah, dan satuan pendidikan membantu pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah.

Faktor Penghambat:

e. Keterbatasan Guru yang Sesuai dengan Bidang Muatan Lokal

Masih terbatasnya jumlah guru yang memiliki latar belakang pendidikan, kompetensi, atau keahlian yang sesuai dengan mata pelajaran muatan lokal menyebabkan pelaksanaan pembelajaran belum berjalan secara optimal pada beberapa satuan pendidikan SMP.

b. Penugasan Guru yang Belum Linier

Masih terdapat guru yang diberikan tugas mengajar muatan lokal namun tidak sesuai dengan bidang keahlian atau latar belakang pendidikannya. Kondisi ini memengaruhi kualitas penyampaian materi dan efektivitas proses pembelajaran.

c. Keterbatasan Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Sebagian guru masih mengalami kendala dalam menyusun perangkat ajar, modul, dan bahan pembelajaran muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan daerah.

Solusi Alternatif:

d. Melakukan Pemetaan Kompetensi Guru

Melaksanakan identifikasi dan pemetaan guru yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran muatan lokal sebagai dasar penugasan pembelajaran.

b. Mengoptimalkan Penugasan Guru Sesuai Kompetensi

Menyesuaikan penugasan guru agar lebih linier dengan bidang ajar muatan lokal sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat secara bertahap.

c. Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan Guru

Mengadakan pelatihan, workshop, atau pembinaan bagi guru terkait pengembangan perangkat ajar, metode pembelajaran, dan implementasi kurikulum muatan lokal.

41. Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Tujuan dari sasaran kinerja ini adalah untuk meningkatkan kemampuan akademik dan nonakademik peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) agar memiliki kompetensi yang unggul, berkarakter, kreatif, serta mampu bersaing di tingkat daerah maupun nasional.

Faktor Pendorong:

a. Koordinasi dengan Satuan Pendidikan Berjalan Baik

Koordinasi antara dinas pendidikan dan satuan pendidikan berjalan dengan baik sehingga informasi terkait persiapan lomba dan pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan secara cepat kepada sekolah.

b. Dukungan Sekolah terhadap Pembinaan Prestasi

Sekolah memiliki komitmen dalam mendukung pembinaan peserta didik untuk mengikuti berbagai lomba dan ajang kompetisi akademik maupun nonakademik.

c. Antusiasme Peserta Didik

Peserta didik menunjukkan minat dan antusiasme yang cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan lomba sebagai sarana pengembangan kompetensi dan prestasi.

Faktor Penghambat:

a. Keterlambatan Sosialisasi Jadwal dan Juknis Lomba

Jadwal dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan lomba dari BPTI baru disosialisasikan pada akhir Triwulan I. Kondisi ini menyebabkan persiapan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan peserta didik di daerah menjadi terbatas.

b. Penyesuaian Jadwal Kegiatan Daerah

Karena jadwal lomba dari pusat diterima pada akhir Triwulan I, maka pelaksanaan seleksi dan pembinaan di tingkat daerah harus menyesuaikan kembali dengan jadwal nasional sehingga waktu persiapan menjadi lebih singkat.

c. Keterbatasan Waktu Pembinaan Peserta Didik

Waktu yang terbatas berdampak pada belum optimalnya pembinaan peserta didik dalam persiapan menghadapi lomba akademik maupun nonakademik.

Solusi Alternatif:

a. Melakukan Koordinasi Intensif dengan Satuan Pendidikan

Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan sekolah terkait informasi jadwal, juknis, dan persiapan pelaksanaan lomba agar penyesuaian kegiatan dapat dilakukan lebih cepat.

b. Menyusun Persiapan Awal Pembinaan Peserta Didik

Sekolah tetap melaksanakan pembinaan dasar dan penjaringan peserta didik berprestasi meskipun jadwal resmi lomba belum diterbitkan.

c. Menyesuaikan Jadwal Kegiatan Daerah Secara Fleksibel

Melakukan penyesuaian jadwal seleksi dan pembinaan tingkat daerah sesuai dengan ketentuan pusat agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan efektif.

42. Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Tujuan dari sasaran kinerja ini adalah untuk membentuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki karakter positif, berakhlak mulia, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki sikap sosial dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, agama, dan Profil Pelajar Pancasila.

Faktor Pendorong :

a. Dukungan Program Penguatan Karakter di Sekolah

Sekolah telah melaksanakan berbagai program pembiasaan positif seperti kegiatan keagamaan, upacara bendera, literasi, gotong royong, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter peserta didik.

b. Implementasi Profil Pelajar Pancasila

Penerapan pembelajaran berbasis Profil Pelajar Pancasila dalam kurikulum membantu pengembangan karakter peserta didik melalui penguatan nilai religius, disiplin, mandiri, kreatif, dan gotong royong.

c. Dukungan Kepala Sekolah dan Guru

Kepala sekolah dan guru berperan aktif dalam memberikan pembinaan, keteladanan, serta pengawasan terhadap perilaku dan kedisiplinan peserta didik di lingkungan sekolah.

Faktor Penghambat:

a. Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan

Lingkungan sosial dan pergaulan yang kurang mendukung dapat memengaruhi perilaku peserta didik sehingga berdampak pada kedisiplinan dan pembentukan karakter positif.

b. Rendahnya Kesadaran Sebagian Peserta Didik

Masih terdapat peserta didik yang kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan penerapan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari.

c. Kurangnya Pengawasan dan Pendampingan Orang Tua

Tidak semua orang tua dapat memberikan pendampingan dan pengawasan secara optimal terhadap perkembangan karakter dan perilaku anak di rumah.

Solusi Alternatif:

a. Mengoptimalkan Program Pembiasaan Positif

Sekolah meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembiasaan seperti budaya disiplin, literasi, kegiatan keagamaan, dan gotong royong secara rutin dan berkelanjutan.

b. Penguatan Implementasi Profil Pelajar Pancasila

Guru mengintegrasikan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah untuk mendukung pembentukan karakter peserta didik.

c. Meningkatkan Pendampingan dan Keteladanan Guru

Guru dan tenaga kependidikan memberikan pembinaan, pengawasan, dan keteladanan secara konsisten dalam membentuk perilaku positif peserta didik.

43. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan melalui pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) secara berkelanjutan. Kompetensi yang baik dari PTK menjadi fondasi utama dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Faktor Pendorong Capaian

a. Optimalisasi Komunitas Belajar (Kombel)

Kegiatan komunitas belajar guru mulai dioptimalkan sebagai wadah berbagi praktik baik, diskusi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi secara kolaboratif antar guru.

b. Penyederhanaan Administrasi

Adanya upaya penyederhanaan administrasi pembelajaran membantu guru memiliki waktu lebih banyak untuk fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan diri.

c. Mentoring dan Peer Feedback

Pelaksanaan mentoring dan peer feedback antar guru mendukung peningkatan kompetensi melalui saling berbagi pengalaman, supervisi sejawat, dan evaluasi pembelajaran secara bersama.

d. Dukungan Kepala Sekolah dan Pengawas

Kepala sekolah dan pengawas memberikan arahan, pembinaan, serta pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi guru dan implementasi pembelajaran.

Faktor Penghambat Capaian

a. Hambatan Manajerial dan Sistemik

Pada Triwulan I, masih terdapat beban administrasi yang cukup tinggi sehingga guru memiliki keterbatasan waktu untuk fokus pada peningkatan kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Selain itu, pelaksanaan pelatihan belum merata bagi seluruh guru, sehingga terdapat perbedaan kesempatan dalam memperoleh pengembangan kompetensi. Dukungan kepemimpinan di beberapa satuan pendidikan juga belum optimal dalam mendorong budaya belajar dan inovasi guru.

b. Hambatan Kompetensi Teknis dan Literasi

Sebagian guru masih mengalami kesenjangan literasi digital, khususnya dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran dan platform digital pendidikan. Selain itu, pemahaman terhadap implementasi kurikulum, penyusunan perangkat ajar, dan asesmen pembelajaran masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif.

c. Hambatan Psikologis dan Budaya Kerja

Masih terdapat guru yang berada pada zona nyaman (comfort zone) dan belum sepenuhnya termotivasi untuk melakukan pengembangan diri secara mandiri. Rendahnya motivasi intrinsik dalam mengikuti pelatihan dan inovasi pembelajaran turut memengaruhi peningkatan kualitas pembelajaran.

Solusi Alternatif:

a. Mengoptimalkan Kegiatan Komunitas Belajar

Mengaktifkan komunitas belajar guru secara rutin sebagai sarana diskusi, berbagi praktik baik, dan peningkatan kompetensi pembelajaran.

b. Melaksanakan Pendampingan dan Mentoring Guru

Guru senior, kepala sekolah, dan pengawas memberikan mentoring serta pendampingan kepada guru terkait implementasi kurikulum, pembelajaran, dan penggunaan teknologi pendidikan.

c. Meningkatkan Literasi Digital Guru

Melaksanakan pelatihan dasar penggunaan teknologi dan platform pembelajaran digital untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran berbasis teknologi.

44. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan dan pemerataan pendidik serta tenaga kependidikan (PTK) di seluruh satuan pendidikan, sebagai upaya mendukung kelancaran proses pembelajaran dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Pemenuhan dan distribusi guru, kepala sekolah, serta pengawas menjadi bagian penting dalam menjamin pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

1) Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Faktor Pendorong:

a. Kebijakan dan Regulasi Strategis

Adanya kebijakan pemerintah terkait rekrutmen berbasis kebutuhan riil sekolah, penataan distribusi tenaga pendidikan, dan penyederhanaan proses administrasi mutasi menjadi faktor pendorong pemerataan tenaga pendidikan.

b. Dukungan Kebijakan Penugasan Daerah Khusus

Kebijakan masa bakti dan penugasan pada daerah khusus membantu mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada wilayah yang masih kekurangan SDM pendidikan.

c. Peningkatan Kesejahteraan dan Insentif

Adanya dukungan tunjangan khusus daerah terpencil, penghargaan, dan jaminan pengembangan karier menjadi motivasi bagi tenaga pendidikan untuk mendukung pemerataan penempatan.

Faktor Penghambat:

a. Sistem Rekrutmen dan Administrasi Belum Optimal

Proses rekrutmen, penempatan, dan mutasi tenaga pendidik serta tenaga kependidikan masih memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan riil sekolah di lapangan. Mekanisme administrasi mutasi yang cukup panjang dan keterbatasan formasi tenaga kependidikan turut memengaruhi percepatan pemerataan SDM pendidikan.

b. Ketimpangan Kesejahteraan dan Keterbatasan Anggaran

Perbedaan kesejahteraan, insentif, dan fasilitas antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil menjadi salah satu penyebab kurang meratanya distribusi tenaga pendidikan. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah memengaruhi kemampuan dalam pemberian dukungan kesejahteraan dan fasilitas tambahan.

c. Faktor Sosial dan Personal

Pertimbangan keluarga, kondisi tempat tinggal, serta keterbatasan fasilitas penunjang di lokasi penugasan menyebabkan sebagian tenaga pendidikan kurang berminat ditempatkan di wilayah tertentu.

Solusi Alternatif:

a. Melakukan Pemetaan Kebutuhan PTK Secara Berkala

Melaksanakan pendataan dan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kondisi riil sekolah, jumlah peserta didik, dan wilayah penugasan.

b. Mengoptimalkan Koordinasi dengan BKPSDM dan Instansi Terkait

Meningkatkan koordinasi dengan BKPSDM dan instansi terkait dalam proses penataan, mutasi, dan distribusi tenaga pendidikan.

c. Menyusun Prioritas Pemerataan Tenaga Pendidikan

Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada wilayah terpencil, sekolah dengan kekurangan SDM, dan daerah dengan akses terbatas.

2) Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Faktor Pendorong:

a. Kebijakan Pemerintah tentang Penguatan Pengawasan Pendidikan

Adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendorong pemenuhan rasio ideal pengawas sekolah terhadap satuan pendidikan menjadi dasar penguatan fungsi supervisi dan peningkatan mutu pendidikan di SMP.

b. Dukungan Sistem Data dan Pemetaan Sekolah

Pemanfaatan data pendidikan membantu dalam pemetaan jumlah sekolah binaan dan kebutuhan pengawas secara lebih akurat sehingga perencanaan distribusi pengawas dapat dilakukan secara lebih terarah.

c. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan

Adanya koordinasi yang baik antara pengawas sekolah dan dinas pendidikan membantu dalam proses penataan wilayah binaan dan pemerataan tugas pengawasan.

Faktor Penghambat:

a. Jumlah Pengawas Belum Seimbang dengan Jumlah Sekolah

Jumlah pengawas sekolah belum sebanding dengan banyaknya satuan pendidikan SMP, sehingga satu pengawas harus membina beberapa sekolah sekaligus dengan wilayah yang cukup luas.

b. Luasnya Wilayah Binaan

Sebagian pengawas memiliki wilayah kerja yang luas dan tersebar, sehingga pelaksanaan supervisi dan pendampingan tidak dapat dilakukan secara optimal dan merata.

c. Keterbatasan Formasi Pengawas Baru

Proses pengangkatan atau penambahan pengawas baru masih terbatas sehingga pemenuhan rasio ideal belum dapat tercapai dalam waktu singkat.

Solusi Alternatif:

a. Melakukan Pemetaan Wilayah Binaan Pengawas

Melaksanakan pemetaan ulang jumlah sekolah SMP dan distribusi pengawas untuk memastikan pembagian wilayah binaan lebih proporsional dan efektif.

b. Mengoptimalkan Supervisi Berbasis Digital

Memanfaatkan teknologi komunikasi dan sistem digital untuk mendukung supervisi, monitoring, dan pelaporan pengawas sekolah secara lebih efisien.

c. Mengusulkan Penambahan Formasi Pengawas

Mengajukan kebutuhan penambahan pengawas sekolah kepada pemerintah daerah sesuai dengan rasio ideal pengawas terhadap satuan pendidikan SMP.

d. Menyusun Prioritas Supervisi

Pengawas menyusun prioritas kunjungan dan pendampingan berdasarkan tingkat kebutuhan sekolah, seperti sekolah dengan capaian mutu rendah atau memiliki permasalahan khusus.

3) Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama

Faktor Pendorong:

a. Kebijakan Pemerataan Guru

Adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pemerataan distribusi guru mendorong upaya penataan penempatan guru SMP agar lebih seimbang antara sekolah yang kelebihan dan kekurangan guru.

b. Dukungan Data Pokok Pendidikan

Pemanfaatan data dari Dapodik membantu dalam memetakan kebutuhan guru berdasarkan jumlah rombongan belajar, beban mengajar, dan kondisi riil sekolah.

c. Koordinasi Antarinstansi

Adanya koordinasi antara dinas pendidikan, BKPSDM, dan satuan pendidikan mendukung proses penataan dan redistribusi guru secara bertahap dan terarah.

Faktor Penghambat:

a. Ketimpangan Distribusi Guru Antar Wilayah

Masih terdapat ketidakseimbangan jumlah guru antara sekolah di wilayah perkotaan dan daerah terpencil, sehingga indeks distribusi guru belum merata.

b. Keterbatasan Formasi dan Rekrutmen

Keterbatasan formasi guru baru menyebabkan pemenuhan kebutuhan guru di sekolah tertentu belum dapat segera terpenuhi.

c. Kurangnya Minat Penempatan di Daerah Tertentu

Sebagian guru kurang berminat untuk ditempatkan di wilayah terpencil atau dengan akses terbatas sehingga proses pemerataan menjadi terhambat.

Solusi Alternatif:

a. Melakukan Pemetaan Kebutuhan Guru Secara Berkala

Melaksanakan pemutakhiran data melalui Dapodik untuk mengetahui secara akurat kebutuhan dan kelebihan guru di setiap sekolah.

b. Mengoptimalkan Redistribusi Guru

Melakukan penataan ulang dan redistribusi guru berdasarkan beban mengajar dan kebutuhan riil sekolah agar pemerataan lebih optimal.

c. Memperkuat Koordinasi dengan BKPSDM

Meningkatkan koordinasi dengan BKPSDM dalam proses mutasi, penempatan, dan penataan guru.

45. Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Tujuan dari sasaran kinerja ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui pemenuhan dan peningkatan kualifikasi akademik serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar sesuai dengan standar nasional pendidikan, sehingga mampu mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Faktor Pendorong:

a. Kebijakan Standar Kualifikasi Pendidikan

Adanya regulasi nasional yang mewajibkan pendidik minimal berkualifikasi S1/D4 menjadi dasar utama peningkatan kualifikasi PTK.

b. Kesadaran Profesionalisme PTK

Meningkatnya kesadaran guru dan tenaga kependidikan terhadap pentingnya kualifikasi pendidikan dalam mendukung karier dan peningkatan mutu pembelajaran.

c. Dukungan Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan

Adanya dukungan dari kepala sekolah dan dinas pendidikan dalam memberikan rekomendasi serta fasilitasi bagi PTK yang melanjutkan studi.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan Waktu PTK

Beban kerja mengajar dan tugas administrasi yang tinggi menyebabkan PTK sulit membagi waktu untuk melanjutkan pendidikan formal.

b. Faktor Usia dan Masa Kerja

Sebagian PTK yang mendekati masa pensiun cenderung tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

c. Keterbatasan Biaya Pendidikan

Meskipun terdapat program bantuan, biaya pendidikan lanjutan masih menjadi kendala bagi sebagian PTK.

Solusi Alternatif:

a. Pengaturan Beban Kerja PTK

Satuan pendidikan melakukan penataan beban kerja agar PTK yang sedang melanjutkan studi tetap dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.

b. Sosialisasi Pentingnya Peningkatan Kualifikasi

Melaksanakan sosialisasi kepada PTK mengenai pentingnya peningkatan kualifikasi pendidikan untuk karier dan mutu pembelajaran.

c. Pemetaan PTK yang Belum Berkualifikasi S1/D4

Melakukan pendataan dan pemetaan PTK yang belum memenuhi kualifikasi minimal sebagai dasar penyusunan program peningkatan jenjang pendidikan.

d. Pemberian Motivasi dan Pendampingan

Memberikan dorongan, pendampingan, dan arahan kepada PTK agar memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

46. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Tujuan dari sasaran kinerja ini adalah untuk mewujudkan ketersediaan, pemerataan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang layak, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang efektif pada satuan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh.

1) Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Faktor Pendorong:

a. Dukungan Program Pemerintah

Adanya program bantuan sarana dan prasarana pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta bantuan lainnya mendorong peningkatan pemenuhan standar sarana pembelajaran di satuan pendidikan.

b. Pemanfaatan Dana Operasional Sekolah

Penggunaan BOS membantu satuan pendidikan dalam memenuhi kebutuhan dasar sarana pembelajaran seperti alat tulis, media pembelajaran, dan pemeliharaan ringan fasilitas sekolah.

c. Monitoring dan Pembinaan

Adanya pembinaan dari dinas pendidikan dan pengawas sekolah membantu satuan pendidikan dalam melakukan evaluasi dan peningkatan sarana pembelajaran secara bertahap.

Faktor Penghambat :

a. Keterbatasan Anggaran

Sebagian satuan pendidikan masih mengalami keterbatasan anggaran untuk pemenuhan sarana pembelajaran yang sesuai standar.

b. Ketimpangan Sarana Antar Sekolah

Masih terdapat kesenjangan kualitas sarana pembelajaran antara sekolah di wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

c. Kondisi Infrastruktur yang Belum Memadai

Beberapa sekolah masih memiliki ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang belum memenuhi standar kelayakan.

d. Pemeliharaan Sarana yang Belum Optimal

Pemeliharaan sarana dan prasarana di beberapa satuan pendidikan belum dilakukan secara rutin dan terencana.

Solusi Alternatif:

a. Optimalisasi Penggunaan BOS

Mengoptimalkan penggunaan BOS untuk pemenuhan sarana pembelajaran prioritas sesuai kebutuhan SNP secara tepat sasaran.

b. Pemetaan Kebutuhan Sarana Sekolah

Melakukan identifikasi dan pemetaan kondisi sarana pembelajaran di setiap satuan pendidikan sebagai dasar perencanaan pengadaan dan perbaikan.

c. Prioritas Pengadaan Sarana Esensial

Memprioritaskan pemenuhan sarana pembelajaran yang paling mendesak seperti ruang kelas, buku pelajaran, dan media pembelajaran dasar.

2) Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Faktor Pendorong:

a. Dukungan Program Pemerintah

Adanya dukungan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan melalui dana pemerintah pusat dan daerah, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya.

b. Pemanfaatan Dana Operasional Sekolah

BOS turut mendukung pemeliharaan dan perbaikan ringan prasarana pembelajaran agar tetap layak digunakan.

c. Komitmen Satuan Pendidikan

Kepala sekolah memiliki komitmen dalam menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana sekolah agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

d. Pembinaan dan Monitoring

Adanya pendampingan dari dinas pendidikan dan pengawas sekolah membantu satuan pendidikan dalam mengidentifikasi kebutuhan serta peningkatan prasarana secara bertahap.

Faktor Penghambat :

a. Keterbatasan Anggaran Pembangunan

Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi prasarana di beberapa satuan pendidikan.

b. Kondisi Bangunan yang Belum Memenuhi Standar

Sebagian sekolah masih memiliki ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lain yang belum memenuhi standar kelayakan SNP.

c. Ketimpangan Prasarana Antar Wilayah

Terdapat kesenjangan prasarana antara sekolah di wilayah perkotaan dan daerah terpencil.

d. Proses Pengadaan dan Pembangunan yang Bertahap

Peningkatan prasarana membutuhkan waktu dan proses perencanaan yang panjang sehingga tidak dapat langsung terpenuhi dalam satu periode.

Solusi Alternatif:

a. Pemetaan Kondisi Prasarana Sekolah

Melakukan pendataan dan analisis kondisi prasarana di setiap satuan pendidikan sebagai dasar perencanaan perbaikan dan pembangunan.

b. Prioritas Perbaikan Prasarana Mendesak

Memprioritaskan perbaikan prasarana yang sudah rusak berat atau tidak layak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran.

c. Perencanaan Pembangunan Bertahap

Menyusun rencana peningkatan prasarana pendidikan secara bertahap berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah.

47. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran

Tujuan dari sasaran kinerja ini adalah untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, layak, dan sesuai standar

pada satuan pendidikan Sekolah Dasar guna mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif, aman, dan berkualitas.

Faktor Pendorong:

a. Tersedianya alokasi anggaran pada awal tahun

Penetapan APBD dan dukungan pendanaan pendidikan pada awal tahun menjadi dasar pelaksanaan program pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana SD.

b. Tersedianya data kebutuhan sarana prasarana sekolah dasar

Data hasil pendataan sekolah melalui Dapodik dan usulan sekolah membantu proses identifikasi kebutuhan prioritas pada Triwulan I.

c. Adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan SD

Koordinasi awal tahun berjalan cukup baik dalam penyusunan usulan kebutuhan rehabilitasi, pengadaan meubelair, dan fasilitas pembelajaran.

Faktor Penghambat:

a. Pelaksanaan fisik kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan administrasi

Pada Triwulan I sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap penyusunan dokumen, verifikasi usulan, dan proses administrasi pengadaan sehingga realisasi fisik belum optimal.

b. Keterbatasan anggaran dibanding kebutuhan sekolah dasar

Kebutuhan rehabilitasi ruang kelas, sanitasi, meubelair, dan media pembelajaran masih cukup tinggi dibanding ketersediaan anggaran.

d. Masih terdapat data kebutuhan sarana prasarana yang belum sepenuhnya valid

Beberapa sekolah belum memperbaiki kondisi riil sarana prasarana sehingga memerlukan verifikasi ulang untuk penentuan prioritas kegiatan.

Solusi Alternatif:

a. Mempercepat proses verifikasi dan administrasi kegiatan

Percepatan penyusunan dokumen perencanaan dan pengadaan diperlukan agar pelaksanaan fisik dapat segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

b. Melakukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan

Sekolah dasar dengan kondisi kerusakan berat dan kebutuhan mendesak diprioritaskan dalam pelaksanaan program sarana prasarana.

c. Mengoptimalkan pembaruan data sarana prasarana sekolah

Sekolah didorong untuk memperbarui data Dapodik dan menyampaikan laporan kondisi fasilitas secara berkala agar perencanaan lebih akurat.

48. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan pemerataan sarana serta prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memadai, aman, dan mendukung proses pembelajaran sehingga tercipta lingkungan belajar yang nyaman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak usia dini.

1) Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik

Faktor Pendorong:

a. Meningkatnya perhatian pemerintah terhadap layanan PAUD

Kebijakan pemerintah dalam penguatan pendidikan anak usia dini mendorong peningkatan kualitas sarana pendukung pembelajaran di satuan PAUD.

b. Tersedianya data kebutuhan sarana PAUD

Pendataan melalui Dapodik PAUD membantu pemetaan kondisi sarana dan kebutuhan fasilitas sehingga perencanaan pengadaan lebih tepat sasaran.

c. Partisipasi masyarakat dan komite penyelenggara PAUD

Dukungan orang tua, masyarakat, yayasan, dan pihak swasta membantu pemenuhan fasilitas belajar dan lingkungan bermain anak.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan anggaran pemenuhan sarana PAUD

Kebutuhan sarana pembelajaran, alat bermain, dan fasilitas pendukung masih cukup besar dibanding kemampuan anggaran yang tersedia.

b. Masih terdapat satuan PAUD dengan sarana belum lengkap

Beberapa PAUD belum memiliki fasilitas belajar, alat permainan edukatif, maupun meubelair sesuai standar layanan PAUD.

c. Kondisi sarana yang mengalami kerusakan

Sebagian alat bermain dan fasilitas pembelajaran mengalami kerusakan akibat penggunaan rutin dan keterbatasan pemeliharaan.

Solusi Alternatif:

- a. Melakukan prioritas pemenuhan sarana berdasarkan kebutuhan mendesak

Satuan PAUD dengan kondisi sarana paling minim dan tingkat kerusakan tinggi diprioritaskan dalam bantuan dan pengadaan.

- b. Mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber pendanaan

Pemanfaatan APBD, BOP PAUD, bantuan pemerintah pusat, CSR, dan dukungan masyarakat dapat membantu percepatan pemenuhan sarana.

- c. Meningkatkan pembaruan dan validasi data sarana PAUD

Monitoring dan pemutakhiran data secara berkala diperlukan agar kebutuhan sarana dapat dipetakan secara akurat.

- 2) Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik

Faktor Pendorong:

- a. Tersedianya alokasi anggaran awal tahun untuk PAUD

Dukungan anggaran pemerintah daerah maupun bantuan pemerintah pusat pada awal tahun menjadi dasar pelaksanaan perencanaan pemenuhan prasarana PAUD.

- b. Adanya pendataan kondisi prasarana satuan PAUD

Data Dapodik dan usulan dari satuan PAUD membantu identifikasi kondisi ruang belajar, sanitasi, area bermain, dan fasilitas pendukung lainnya.

- c. Adanya koordinasi antara dinas pendidikan dan satuan PAUD

Koordinasi pada awal tahun membantu proses inventarisasi kebutuhan serta penentuan prioritas penanganan prasarana PAUD.

Faktor Penghambat:

- a. Pelaksanaan kegiatan masih berada pada tahap perencanaan

Pada Triwulan I sebagian besar kegiatan masih berupa inventarisasi kebutuhan, penyusunan dokumen, dan proses administrasi sehingga realisasi fisik belum maksimal.

- b. Masih terdapat satuan PAUD dengan prasarana belum memadai

Beberapa PAUD masih memiliki keterbatasan ruang belajar, sanitasi, pagar pengaman, dan area bermain yang sesuai standar.

- c. Keterbatasan anggaran pemenuhan prasarana PAUD

Kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan fasilitas PAUD masih cukup tinggi dibanding kemampuan anggaran yang tersedia.

Solusi Alternatif:

a. Mempercepat proses administrasi dan verifikasi usulan

Percepatan penyusunan dokumen dan verifikasi kebutuhan diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

b. Melakukan prioritas penanganan berdasarkan kondisi prasarana

PAUD dengan kondisi fasilitas paling terbatas dan tingkat kerusakan tertinggi diprioritaskan dalam program bantuan dan rehabilitasi.

c. Mengoptimalkan pembaruan data prasarana PAUD

Satuan PAUD didorong untuk rutin memperbarui data kondisi bangunan dan fasilitas agar perencanaan lebih tepat sasaran.

49. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan kelayakan sarana serta prasarana pendidikan nonformal/kesetaraan guna mendukung proses pembelajaran yang efektif, aman, nyaman, dan merata sehingga dapat meningkatkan akses serta mutu layanan pendidikan bagi masyarakat.

1) Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik

Faktor Pendorong:

a. Adanya pendataan kebutuhan sarana lembaga pendidikan nonformal

Data dari PKBM, lembaga kursus, dan satuan pendidikan kesetaraan membantu identifikasi kebutuhan sarana pembelajaran pada awal tahun.

b. Dukungan pengelola lembaga pendidikan nonformal

Pengelola PKBM dan lembaga kesetaraan aktif mengusulkan kebutuhan fasilitas belajar guna mendukung kelancaran proses pembelajaran.

c. Koordinasi antara dinas pendidikan dan lembaga penyelenggara cukup baik

Koordinasi awal tahun membantu proses inventarisasi kebutuhan dan penyusunan prioritas pemenuhan sarana pembelajaran.

Faktor Penghambat:

a. Pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap administrasi dan perencanaan

Pada Triwulan I sebagian besar kegiatan masih berupa pendataan, penyusunan dokumen, dan proses pengadaan sehingga realisasi fisik belum optimal.

b. Keterbatasan anggaran pemenuhan sarana pendidikan nonformal

Kebutuhan fasilitas belajar, meubelair, media pembelajaran, dan perangkat pendukung masih cukup tinggi dibanding anggaran tersedia.

c. Masih terdapat lembaga dengan sarana pembelajaran belum lengkap

Sebagian PKBM dan lembaga kesetaraan masih memiliki keterbatasan meja kursi, alat pembelajaran, dan fasilitas penunjang lainnya.

d. Pemutakhiran data sarana belum sepenuhnya optimal

Sebagian lembaga belum rutin memperbarui data kondisi sarana sehingga memengaruhi akurasi perencanaan kebutuhan.

Solusi Alternatif:

a. Mempercepat proses administrasi dan pengadaan kegiatan

Percepatan penyusunan dokumen dan proses pengadaan diperlukan agar pemenuhan sarana dapat segera direalisasikan pada triwulan berikutnya.

b. Melakukan prioritas bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan

Lembaga pendidikan nonformal dengan kondisi sarana paling terbatas diprioritaskan dalam penyaluran bantuan fasilitas pembelajaran.

c. Mengoptimalkan pembaruan data sarana lembaga pendidikan nonformal

PKBM dan lembaga kesetaraan didorong untuk memperbarui data sarana secara berkala agar perencanaan lebih tepat sasaran.

d. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia

Lembaga dapat melakukan penggunaan fasilitas secara bersama dan penataan ruang belajar secara efisien untuk mendukung proses pembelajaran.

2) Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik

Faktor Pendorong:

a. Adanya pendataan kondisi prasarana lembaga pendidikan nonformal

Data dari PKBM dan lembaga pendidikan kesetaraan membantu identifikasi kebutuhan ruang belajar, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

b. Koordinasi antara dinas pendidikan dan lembaga penyelenggara berjalan cukup baik

Koordinasi awal tahun membantu proses inventarisasi kebutuhan dan penyusunan prioritas penanganan prasarana.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan tempat belajar tetap

Beberapa lembaga pendidikan nonformal masih menggunakan fasilitas pinjam pakai atau gedung sementara sehingga pengembangan prasarana belum optimal.

b. Proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu

Tahapan administrasi dan pengadaan barang/jasa pada awal tahun menyebabkan pelaksanaan kegiatan fisik belum optimal.

c. Data kondisi prasarana belum sepenuhnya terbaru

Perubahan kondisi fasilitas di lapangan belum seluruhnya tercatat dalam sistem pendataan sehingga memerlukan verifikasi ulang.

Solusi Alternatif:

a. Mengoptimalkan pembaruan data prasarana lembaga pendidikan nonformal

Lembaga pendidikan nonformal didorong untuk memperbarui data kondisi bangunan dan fasilitas secara berkala agar perencanaan lebih akurat.

b. Mendorong pemeliharaan rutin fasilitas belajar

Pengelola lembaga perlu melakukan pemeliharaan ringan secara berkala untuk menjaga kelayakan dan kenyamanan fasilitas pembelajaran.

c. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia

Pemanfaatan ruang belajar dan fasilitas bersama secara efisien dapat membantu mendukung kelancaran proses pembelajaran.

50. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekola Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan pemerataan sarana serta prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memadai guna mendukung proses pembelajaran yang efektif, aman, nyaman, dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik.

- 1) Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik

Faktor Pendorong:

a. Tersedianya data kebutuhan sarana SMP

Pendataan melalui Dapodik membantu identifikasi kebutuhan ruang laboratorium, meubelair, media pembelajaran, dan sarana penunjang lainnya.

b. Adanya koordinasi antara dinas pendidikan dan satuan pendidikan SMP

Koordinasi awal tahun membantu penyusunan usulan kebutuhan serta penentuan prioritas pengadaan dan rehabilitasi sarana sekolah.

c. Partisipasi sekolah dalam pengelolaan sarana pembelajaran

Sekolah aktif menyampaikan kebutuhan fasilitas pembelajaran dan melakukan inventarisasi kondisi sarana secara berkala.

Faktor Penghambat:

a. Masih terdapat sarana pembelajaran yang belum lengkap

Beberapa SMP masih memiliki keterbatasan fasilitas laboratorium, perpustakaan, alat praktik, dan media pembelajaran pendukung.

b. Kondisi sarana mengalami kerusakan akibat penggunaan rutin

Sebagian meja kursi, perangkat pembelajaran, dan fasilitas laboratorium mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan bertahap.

Solusi Alternatif:

a. Melakukan prioritas bantuan berdasarkan tingkat kebutuhan

SMP dengan kondisi sarana paling terbatas dan tingkat kerusakan tertinggi diprioritaskan dalam penyaluran bantuan.

b. Mengoptimalkan pembaruan data sarana sekolah

Sekolah didorong untuk memperbarui data kondisi sarana secara berkala agar perencanaan kebutuhan lebih tepat sasaran.

c. Mendorong pemeliharaan rutin fasilitas pembelajaran

Sekolah perlu meningkatkan pemeliharaan dan pengawasan penggunaan sarana agar usia pakai fasilitas lebih panjang.

2) Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik

Faktor Pendorong:

a. Adanya pendataan kondisi prasarana sekolah

Data Dapodik membantu identifikasi kebutuhan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

- b. Koordinasi antara dinas pendidikan dan satuan pendidikan berjalan cukup baik

Koordinasi awal tahun membantu proses inventarisasi kebutuhan serta penentuan prioritas rehabilitasi dan pembangunan fasilitas sekolah.

Faktor Penghambat:

- a. Keterbatasan anggaran pemenuhan prasarana

Kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan fasilitas sekolah masih cukup tinggi dibanding kemampuan anggaran yang tersedia.

- b. Kondisi bangunan dan fasilitas mengalami kerusakan

Sebagian ruang kelas dan fasilitas pendukung mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat usia bangunan dan penggunaan rutin.

- c. Proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu

Tahapan administrasi dan pengadaan barang/jasa menyebabkan pelaksanaan kegiatan fisik belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada Triwulan I.

Solusi Alternatif:

- a. Melakukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan

SMP dengan kondisi fasilitas paling terbatas dan tingkat kerusakan tertinggi diprioritaskan dalam program rehabilitasi dan pembangunan.

- b. Mengoptimalkan pembaruan data prasarana sekolah

Sekolah didorong untuk memperbarui data kondisi bangunan dan fasilitas secara berkala agar perencanaan lebih tepat sasaran.

A.3 Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan di tunjang oleh Program Pengelolaan Pendidikan, dengan rincian aktivitas atau kegiatan sebagai berikut:

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6

- a. Melakukan pendataan sasaran anak usia PAUD melalui koordinasi dengan satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, dan pihak terkait sebagai dasar pemetaan layanan pendidikan.

- b. Melaksanakan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya PAUD sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan dasar.
 - c. Melakukan koordinasi dengan lembaga PAUD terkait peningkatan layanan pembelajaran, daya tampung peserta didik, dan kesiapan penerimaan peserta didik baru.
- 2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15
- a. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data anak usia sekolah melalui koordinasi dengan satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, dan pihak terkait untuk mengetahui anak yang belum bersekolah atau berisiko putus sekolah.
 - b. Melakukan koordinasi dengan sekolah terkait daya tampung peserta didik, penerimaan peserta didik baru, dan upaya pencegahan putus sekolah.
 - c. Melakukan monitoring terhadap peserta didik yang memiliki risiko tidak melanjutkan sekolah atau tingkat kehadiran rendah.
- 3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan
- a. Melaksanakan koordinasi dan pemutakhiran data Anak Tidak Sekolah (ATS) serta peserta didik pendidikan kesetaraan bersama PKBM dan pemangku kepentingan terkait sebagai dasar penyusunan intervensi program.
 - b. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada PKBM guna memastikan proses layanan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, perangkat daerah terkait, dan masyarakat dalam upaya penanganan anak tidak sekolah.
- 4) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini
- a. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait dan pemerintah desa/kelurahan dalam mendukung peningkatan akses layanan pendidikan anak usia dini.
 - b. Dinas Pendidikan melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data satuan pendidikan dan peserta didik PAUD sebagai bagian dari penguatan basis data pendidikan daerah.
 - c. Dinas Pendidikan menyusun langkah strategis dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi anak usia dini pada wilayah dengan tingkat keterjangkauan layanan PAUD yang masih rendah.
- 5) Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar

- a. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan SD terkait kesiapan penerimaan peserta didik baru, daya tampung sekolah, dan pemerataan akses layanan pendidikan dasar.
 - b. Dinas Pendidikan melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data peserta didik dan satuan pendidikan SD sebagai bagian dari penguatan basis data pendidikan daerah.
 - c. Dinas Pendidikan menyusun langkah strategis peningkatan APK SD berdasarkan hasil pemetaan wilayah, kondisi akses pendidikan, dan data anak usia sekolah dasar.
- 6) Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama
- a. Dinas Pendidikan melaksanakan pendataan lulusan SD/ sederajat yang akan melanjutkan ke jenjang SMP sebagai dasar pemetaan potensi peserta didik baru dan wilayah dengan risiko rendahnya partisipasi sekolah.
 - b. Dinas Pendidikan melaksanakan pemetaan daya tampung SMP negeri dan swasta guna memastikan ketersediaan layanan pendidikan bagi lulusan SD/ sederajat.
 - c. Dinas Pendidikan melakukan identifikasi terhadap anak lulusan SD/ sederajat yang belum melanjutkan pendidikan serta melaksanakan koordinasi penanganan bersama pemerintah desa/ kelurahan dan pihak terkait.
- 7) Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini
- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam mendukung peningkatan akses layanan PAUD, khususnya pada wilayah dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah.
 - b. Menyusun langkah strategis peningkatan APM PAUD berdasarkan hasil pemetaan wilayah, kelompok usia layanan, dan kondisi keterjangkauan pendidikan anak usia dini.
- 8) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar
- a. Melakukan identifikasi terhadap anak usia sekolah dasar yang belum bersekolah atau berisiko putus sekolah melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan kepada keluarga.
 - b. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan layanan pendidikan pada satuan SD guna memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan mendukung keberlangsungan peserta didik.
- 9) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama

- a. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan SD dan SMP terkait kesiapan transisi peserta didik dari jenjang SD ke SMP guna mendukung keberlanjutan pendidikan sesuai usia sekolah.
- b. Melaksanakan pembinaan kepada satuan pendidikan SMP dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan, penguatan tata kelola sekolah, dan pencegahan putus sekolah.
- c. melakukan fasilitasi dan koordinasi program bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu guna mendukung keberlanjutan pendidikan pada jenjang SMP.

2. Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan di tunjang oleh 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum dan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, dengan rincian aktivitas atau kegiatan sebagai berikut:

- a. Memimpin koordinasi awal tahun pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan guna memastikan keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan target kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan.
- b. Mengarahkan penyusunan rencana kerja dan pengendalian pelaksanaan program pendidikan Triwulan I sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi awal terhadap capaian kinerja bidang pendidikan untuk mengidentifikasi tingkat ketercapaian program serta kendala pelaksanaan pada awal tahun anggaran.
- d. Mengoordinasikan pemutakhiran dan validasi data pendidikan sebagai dasar penyusunan kebijakan, pengukuran capaian indikator, dan pemenuhan SPM Pendidikan.
- e. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan kepala satuan pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan pada awal tahun pelaksanaan program.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di tunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian aktivitas atau kegiatan sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Mengarahkan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah agar selaras dengan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target pembangunan daerah.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan I guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai target dan indikator yang telah ditetapkan.
 - d. Mengoordinasikan peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja perangkat daerah melalui pemenuhan data dukung yang akurat, terukur, dan akuntabel.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dan pengawasan internal sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
4. Meningkatkan Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah
- Sasaran kinerja Meningkatkan Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di tunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian aktivitas atau kegiatan sebagai berikut:
- a. Mengarahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepatuhan administrasi serta kinerja internal Triwulan I sebagai upaya peningkatan efektivitas tata kelola perangkat daerah.
 - b. Mengoordinasikan penerapan disiplin kerja dan tertib administrasi di lingkungan perangkat daerah untuk mendukung peningkatan Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI).
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
5. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan

Sasaran kinerja Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Dengan Ketentuan dengan indikator Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah

sesuai ketentuan ditunjang oleh kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta bahan pendukung dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Aksi, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
- b. Melaksanakan proses administrasi dan pencairan dana kegiatan perencanaan guna mendukung kelancaran penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- c. Menyusun dokumen Proses Bisnis dan Rencana Aksi Tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan perencanaan kinerja perangkat daerah.
- d. Menyiapkan dokumen administrasi dan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah guna mendukung koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- e. Melaksanakan pengumpulan data, regulasi, dan dokumen pendukung sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

6. Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP

Sasaran kinerja Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP dengan indikator Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan ditunjang oleh kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan, inventarisasi, dan verifikasi data serta bahan pendukung sebagai dasar penyusunan dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - b. Melakukan identifikasi dan pengolahan data pengendalian internal sebagai bahan analisis dalam penyusunan dokumen SPIP yang terintegrasi dan sesuai ketentuan.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan harmonisasi data SPIP guna memastikan kesesuaian dokumen dengan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal perangkat daerah.
- #### 7. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan ditunjang

oleh kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS dan PPPK untuk periode Januari sampai dengan Maret guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- b. Melaksanakan pembayaran honorarium pengelola keuangan periode Januari sampai dengan Maret sebagai dukungan terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi dan keuangan perangkat daerah.
- c. Melaksanakan belanja makan dan minum rapat guna mendukung kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi, pembinaan, dan kegiatan administrasi perangkat daerah.

8. Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan dengan indikator Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan ditunjang oleh kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) pada lingkungan perangkat daerah sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
- b. Melakukan penginputan dan pemutakhiran data aset daerah dalam sistem administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah guna mendukung tertib administrasi aset.
- c. Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan administrasi Barang Milik Daerah untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi fisik barang.
- d. Mengoordinasikan penyusunan laporan administrasi Barang Milik Daerah Triwulan I sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian dan pelaporan aset perangkat daerah.

9. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan

Sasaran kinerja Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan ditunjang oleh kegiatan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendampingan Kenaikan Pangkat
- b. Melakukan tahapan pengumpulan data peserta yang sedang melakukan kenaikan pangkat
- c. Melengkapai berkas-berkas usul kenaikan pangkat
- d. Mempersiapkan data kepesertaan Bimtek
- e. Melakukan negosiasi dengan pihak ke tiga .untuk kerja sama dalam melaksanakan kegiatan BIMTEK

10. Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas ditunjang oleh kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan dan pengarsipan dokumen berdasarkan kebutuhan dan tanggal dokumen
- b. Melakukan Survey Penyedia
- c. Melakukan Survey Harga Barang
- d. Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk kelengkapan spj
- e. melakukan proses negosiasi harga barang

11. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas

Sasaran kinerja Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas ditunjang oleh kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan dan pembayaran tagihan rutin Dinas Pendidikan seperti tagihan listrik dan air
- b. Melakukan pembayaran gaji, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

12. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan

Sasaran kinerja Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana

pemeliharaan ditunjang oleh kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembayaran tagihan BBM kendaraan dinas
- b. Melakukan pembayaran tagihan pemeliharaan peralatan kantor
- c. Melakukan pengecekan dan perbaikan peralatan kantor seperti AC dan computer

13. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

1) Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Melaksanakan pendataan dan pemetaan kebutuhan guru PAUD pada setiap wilayah dan satuan pendidikan guna mendukung pemerataan pendidik.
- b. Mengoordinasikan penempatan dan distribusi guru PAUD sesuai kebutuhan layanan pendidikan dan kondisi wilayah.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemerataan guru PAUD sebagai bahan pengambilan kebijakan pemenuhan tenaga pendidik.

2) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik

- a. Melaksanakan pendataan dan verifikasi pendidik serta tenaga kependidikan PAUD yang telah dan belum memiliki sertifikat pendidik.
- b. Mengoordinasikan fasilitasi usulan sertifikasi pendidik PAUD sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendidik PAUD guna mendukung peningkatan profesionalisme tenaga pendidik.

14. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan pelaksanaan rapat Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD dan pendampingan Sistem Informasi BOS (SI BOS) PAUD melalui penyusunan administrasi kegiatan, penyiapan bahan rapat, koordinasi peserta, serta pengumpulan data pendukung pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaksanakan rapat Tim BOSP PAUD dan pendampingan SI BOS PAUD guna meningkatkan koordinasi, pemahaman, dan ketepatan pengelolaan administrasi serta pelaporan dana BOSP PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

15. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal dan Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembentukan Tim Penyusun Silabus dan Kurikulum Muatan Lokal melalui koordinasi penetapan tim, penyusunan administrasi kegiatan, serta penyiapan bahan dan dokumen pendukung penyusunan kurikulum muatan lokal.
- b. Melaksanakan koordinasi terkait penyusunan Kurikulum dan Silabus Muatan Lokal sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
- c. Melaksanakan review dan revisi modul muatan lokal guna menyesuaikan materi pembelajaran dengan kurikulum, kebutuhan peserta didik, dan kebijakan pendidikan yang berlaku.

16. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan survey dan Monev ke sekolah penerima bantuan
- b. Melakukan Pendampingan ke Satuan Pendidikan Nonformal dalam penatausahaan BOSP

- c. Melaksanakan Kegiatan rapat TIM BOSP PAUD dan Sosialisasi Akreditasi Satuan PAUD
- d. Melakukan Koordinasi dengan Bunda PAUD untuk pelaksanaan Rapat Pokja Bunda PAUD
- e. Melakukan Koordinasi dengan BAN PDM untuk pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Akreditasi Satuan PAUD
- f. Melakukan Kegiatan Pendampingan Akreditasi Satuan PAUD

17. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Bagi Peserta Didik Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan peserta didik tidak mampu
- b. Melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik tidak mampu

18. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penyusunan Kurikulum dan Silabus Muatan Lokal sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
- b. Melaksanakan review dan revisi modul muatan lokal guna menyesuaikan materi pembelajaran dengan kurikulum, kebutuhan peserta didik, dan kebijakan pendidikan yang berlaku.

19. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan

Keuangan sesuai ketentuan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendampingan penggunaan aplikasi ARKAS kepada Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF).
- b. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengelolaan perencanaan serta pelaporan anggaran melalui ARKAS pada SPNF.
- c. Melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) BOSP terbaru kepada satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait.

20. Meningkatkan Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu

Sasaran kinerja Meningkatkan Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik Tidak Mampu dengan indikator Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi awal dengan pihak internal dan eksternal Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan program Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.
- b. Menginventarisasi dan menghimpun bahan/data pendukung penyusunan regulasi penyaluran Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.
- c. Menyusun draft awal regulasi/petunjuk teknis penyaluran Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.
- d. Melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.

21. Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Sasaran kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan indikator Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan dan Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan
 - a. Melaksanakan pendataan masyarakat sasaran program pendidikan kesetaraan.
 - b. Melaksanakan sosialisasi program pendidikan kesetaraan kepada masyarakat.

- c. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal/kesetaraan dalam peningkatan layanan pendidikan kesetaraan.
 - 2) Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan
 - a. Melaksanakan pendataan pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan.
 - b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program pendidikan kesetaraan kepada pondok pesantren.
 - c. Melaksanakan pembinaan administrasi dan kelembagaan pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren.
- 22. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran kinerja Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan aktivitas sebagai berikut:

 - a. Melakukan pendataan calon peserta kegiatan peningkatan kompetensi
 - b. Melaksanakan kegiatan Diklat Pendampingan Pengembangan Pedagogik Profesional dan kompetensi calon peserta PPG PAUD
- 23. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya yang ditingkatkan kompetensinya ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

 - a. Melakukan Pendataan dan verifikasi data PTK di Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
 - b. Melaksanakan Rapat terkait ketersediaan PTK di Satuan Pendidikan Nonformal/kesetaraan.
 - c. Menyusun laporan hasil rapat terkait penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan nonformal/kesetaraan
- 24. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal S1/D4 ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendataan dan verifikasi data PTK di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Melaksanakan Rapat terkait tindak lanjut untuk peningkatan kualifikasi PTK PAUD.
25. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. Melaksanakan pendataan kebutuhan kepala satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data kepala satuan pendidikan PAUD.
 - c. Melaksanakan koordinasi terkait pemenuhan dan distribusi kepala satuan pendidikan PAUD.
 - d. Menyusun usulan penempatan kepala satuan pendidikan PAUD sesuai kebutuhan.
 - 2) Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. Melaksanakan pendataan kebutuhan pengawas sekolah pada jenjang PAUD.
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data pengawas sekolah PAUD.
 - c. Melaksanakan koordinasi terkait pemerataan distribusi pengawas sekolah PAUD.
 - d. Menyusun usulan penempatan pengawas sekolah PAUD sesuai wilayah binaan.
26. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan dengan indikator Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Sekolah Dasar ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi dengan koordinator wilayah bidang Pendidikan untuk pendataan dan verifikasi siswa tidak sekolah
- b. Melaksanakan rapat koordinasi penanganan dan penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tingkat Sekolah Dasar.
- c. Melaksanakan sosialisasi pentingnya pendidikan dasar kepada masyarakat dan orang tua peserta didik.

27. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja pembinaan akreditasi Sekolah Dasar tahun berjalan.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pengawas sekolah terkait pemetaan kondisi akreditasi SD.
- c. Melakukan inventarisasi dan verifikasi data sekolah yang akan menghadapi akreditasi/re-akreditasi.
- d. Melaksanakan rapat koordinasi peningkatan mutu kelembagaan SD bersama kepala sekolah.
- e. Memberikan pembinaan kepada kepala sekolah terkait pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

28. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal dengan indikator Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi dengan koordinator wilayah bidang Pendidikan untuk data guru-guru yang memiliki potensi dalam penyusunan kurikulum
- b. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru yang mempunyai potensi besar dalam penyusunan kurikulum

29. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik dan Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik
 - a. Menyusun rencana kerja peningkatan jumlah guru bersertifikasi di jenjang Sekolah Dasar.
 - b. Melakukan pendataan dan verifikasi data guru SD yang sudah dan belum memiliki sertifikat pendidik.
 - c. Berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk validasi data guru calon peserta sertifikasi.
 - 2) Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar
 - a. Menyusun rencana pemetaan pemerataan guru Sekolah Dasar di seluruh satuan pendidikan.
 - b. Melaksanakan analisis kebutuhan guru berdasarkan jumlah rombongan belajar dan beban kerja sekolah.
 - c. Mengumpulkan dan memvalidasi data distribusi guru per sekolah.
 - d. Mengidentifikasi ketimpangan distribusi guru antar sekolah dan wilayah.
30. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan dan verifikasi kesesuaian data anggaran Tahun 2026 yang diinput pada aplikasi SIBOS dan ARKAS oleh satuan pendidikan.
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi awal terhadap penginputan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada sekolah dasar.
 - c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan Dana BOS kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah.
31. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar dengan indikator Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar, Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar dan Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar ditunjang oleh

kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

1) Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar

- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan kondisi keamanan lingkungan sekolah dasar berdasarkan data awal (baseline).
- b. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas terkait kondisi keamanan sekolah (fisik, sosial, dan digital).
- c. Menghimpun data kejadian/insiden terkait keamanan sekolah (perundungan, kekerasan, dan pelanggaran disiplin).
- d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Sekolah Aman dan Ramah Anak kepada satuan pendidikan.

2) Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar

- a. Melakukan pemetaan implementasi pendidikan karakter dan kebhinekaan di sekolah dasar.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan sekolah terkait penguatan Profil Pelajar Pancasila.
- c. Menghimpun data kegiatan sekolah yang mendukung toleransi, keberagaman, dan anti-diskriminasi.
- d. Melaksanakan pembinaan kepada sekolah dalam penguatan kegiatan pembelajaran berbasis kebhinekaan.

3) Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar

- a. Melakukan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus (inklusi) di sekolah dasar.
- b. Mengidentifikasi kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan guru dan kepala sekolah terkait layanan pendidikan inklusif.

32. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Sasaran kinerja Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data kekurangan dan kelebihan guru jenjang SD
- b. Membuat SK penerima insentif inklusi, daerah khusus dan guru honor SD

- c. Melakukan filter daftar penerima insentif non ASN yang sudah lulus PPPK
 - d. Melaksanakan kegiatan Diklat Pendampingan PPG dan Diklat Pendampingan PPG PJOK SD
33. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Sasaran kinerja Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan data kekurangan dan kelebihan guru di masing-masing satuan Pendidikan
 - b. Menyiapkan surat edaran pembaharuan data guru di sekolah masing-masing satuan pendidikan setelah masuknya PPPK
 - c. Menyiapkan bahan rapat perhitungan kepala sekolah dasar
 - d. Membuat rekapitulasi usulan mutasi guru triwulan I baik lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar maupun yang ingin keluar dari Kabupaten Banjar
 - e. Melakukan update data unit kerja baru PNS yang telah terbit SK Mutasi
34. Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Sasaran kinerja Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:
- a. Melakukan pendataan kepada sekolah-sekolah terkait data guru yang sudah memiliki ijazah S1
 - b. Membuat rekapitulasi data guru yang sudah S1 dan belum S1

35. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan dengan indikator Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan kepala sekolah untuk verifikasi dan validasi data siswa tidak mampu
- b. Koordinasi dengan pihak bank penyalur dalam proses pembuatan rekening dan penyaluran dana bantuan

36. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi internal dan lintas sektor (pengawas, kepala sekolah) untuk menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan akreditasi sekolah
- b. Melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pembinaan akreditasi di tingkat sekolah

37. Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal

Sasaran kinerja Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal dengan indikator Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas untuk memastikan keselarasan pelaksanaan kurikulum nasional dan lokal.
- b. Mendorong dan membimbing satuan pendidikan dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP).

38. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik dan Indeks Pemerataan Guru

Sekolah Menengah Pertama ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi lintas bidang (kepegawaian, kurikulum, pengawas sekolah) untuk merancang redistribusi guru berbasis kebutuhan dan pemetaan wilayah.
- b. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan manajemen PTK, termasuk pengembangan karier, penilaian kinerja, dan beban kerja guru.
- c. Menginisiasi program pelatihan, Bimtek, atau komunitas belajar untuk mendukung peningkatan kualitas kompetensi PTK sesuai bidangnya.

39. Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan Pendampingan dengan satuan pendidikan terhadap pengelolaan anggaran
- b. Membuat SK Panitia, Surat Undangan untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan pengelolaan dana BOS jenjang SMP
- c. Menyiapkan kelengkapan administrasi untuk kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Juknis Dana BOSP
- d. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Juknis Dana BOSP

40. Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama

Sasaran kinerja Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan indikator Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Program Pengembangan Kurikulum, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi internal Seksi Bidang SMP untuk membahas mekanisme pelaksanaan kegiatan tahun 2026.
- b. Menyusun hasil kesepakatan rapat koordinasi sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bidang SMP.

- c. Menyusun draft rencana kegiatan Workshop Muatan Lokal Arab Melayu sebagai bagian dari Revitalisasi Budaya Tulis Daerah.

41. Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Sasaran kinerja Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan indikator Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan prestasi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- b. Melaksanakan pendataan dan pemetaan peserta didik berprestasi akademik dan non-akademik di seluruh SMP.
- c. Melaksanakan kegiatan Lomba Motivasi belajar mandiri SMP terbuka.

42. Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Sasaran kinerja Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemetaan awal implementasi pendidikan karakter di seluruh SMP berdasarkan data rapor pendidikan/hasil evaluasi sekolah.
- b. Menghimpun data satuan pendidikan SMP yang memiliki nilai karakter baik sebagai baseline capaian indikator.
- c. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru dalam implementasi penguatan Profil Pelajar Pancasila.
- d. Melaksanakan sosialisasi penguatan pendidikan karakter kepada satuan pendidikan SMP.

43. Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

dengan sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan, Pengembangan konten digital untuk Pendidikan, Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan, Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data kekurangan dan kelebihan guru SMP
- b. Membuat SK dan Surat Edaran untuk penerima Insentif bagi Guru Non ASN, Guru Inklusi dan Guru Non ASN di Daerah Khusus
- c. Pelaksanaan Rapat Penyediaan PTK SMP

44. Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran kinerja Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan data kekurangan dan kelebihan guru SMP
- b. Menyiapkan surat edaran pembaharuan data guru di sekolah masing-masing satuan pendidikan setelah masuknya PPPK
- c. Melaksanakan Rapat pemetaan PTK SMP
- d. Membuat rekapitulasi usulan mutasi guru triwulan I

45. Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dengan indikator Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan kepada sekolah-sekolah terkait data guru yang sudah memiliki ijazah S1

46. Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas

Sasaran kinerja Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas dengan indikator Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
 - a. Melakukan pemetaan kondisi sarana pembelajaran (alat peraga, media pembelajaran, TIK, buku, dan bahan ajar) pada seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Nonformal.
 - b. Menghimpun dan menginventarisasi data ketersediaan sarana pembelajaran berdasarkan Dapodik dan hasil verifikasi lapangan.
 - c. Melaksanakan analisis kesenjangan (gap analysis) sarana pembelajaran terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 - d. Menyusun daftar kebutuhan prioritas sarana pembelajaran yang belum memenuhi SNP.
- 2) Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
 - a. Melakukan pemetaan kondisi prasarana pendidikan (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya).
 - b. Menghimpun data kondisi fisik prasarana satuan pendidikan berdasarkan Dapodik dan monitoring lapangan.
 - c. Melaksanakan identifikasi tingkat kerusakan dan kelayakan prasarana pendidikan di semua jenjang.

- d. Melakukan koordinasi dengan kepala satuan pendidikan terkait kondisi dan kebutuhan prasarana.

47. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran dengan indikator Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dan Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik
 - a. Melaksanakan verifikasi dan validasi kondisi sarana pembelajaran di sekolah dasar.
 - b. Melakukan identifikasi sekolah yang memiliki sarana pembelajaran kurang lengkap atau tidak layak.
 - c. Melakukan review akhir dokumen perencanaan teknis pengadaan sarana pendidikan (alat peraga, media pembelajaran, TIK, dan buku).
- 2) Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik
 - a. Melaksanakan identifikasi tingkat kerusakan dan kelayakan prasarana sekolah dasar.
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi kondisi prasarana pada satuan pendidikan SD.
 - c. Melakukan review akhir dokumen perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan (ruang kelas, perpustakaan, sanitasi, dan fasilitas lainnya).

48. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran dengan indikator Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dan Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap
 - a. Melaksanakan persiapan data kebutuhan sarana pendidikan berdasarkan hasil pemetaan satuan pendidikan.
 - b. Mengidentifikasi spesifikasi teknis sarana pendidikan (alat peraga, media pembelajaran, TIK, buku).
 - c. Melakukan survei harga pasar untuk kebutuhan sarana pendidikan pada beberapa penyedia barang.
 - d. Menghimpun dan membandingkan data harga satuan sarana pendidikan sebagai dasar penyusunan HPS.
 - 2) Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap
 - a. Melaksanakan persiapan data kebutuhan prasarana pendidikan berdasarkan hasil survei kondisi lapangan (ruang kelas, sanitasi, perpustakaan, dll.).
 - b. Mengidentifikasi spesifikasi teknis pekerjaan prasarana pendidikan sesuai standar teknis (gambar kerja, volume, dan mutu pekerjaan).
 - c. Melakukan survei harga satuan bahan bangunan, upah tenaga kerja, dan biaya pendukung prasarana pendidikan.
 - d. Menghimpun dan membandingkan data harga untuk penyusunan analisis kewajaran harga prasarana pendidikan.
 - e. Menyusun draft Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan prasarana pendidikan.
49. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran
- Sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran dengan indikator Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dan Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan aktivitas sebagai berikut:
- 1) Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik
 - a. Melakukan pemetaan kondisi sarana pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan (PKBM/ SKB).
 - b. Menghimpun data ketersediaan sarana pembelajaran seperti buku, modul, alat bantu belajar, dan media pembelajaran.

- c. Melaksanakan verifikasi dan validasi kondisi sarana pembelajaran di satuan pendidikan nonformal/kesetaraan.
- 2) Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik
 - a. Melakukan pemetaan kondisi prasarana satuan pendidikan nonformal/kesetaraan (ruang belajar, kantor, sanitasi, dan fasilitas pendukung).
 - b. Menghimpun data kondisi fisik prasarana PKBM/SKB berdasarkan Dapodik dan hasil monitoring lapangan.
 - c. Melaksanakan identifikasi tingkat kelayakan dan kerusakan prasarana pendidikan nonformal/kesetaraan.
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi kondisi prasarana pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan.

50. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran

Sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran dengan indikator Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik dan Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik ditunjang oleh kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik
 - a. Melakukan finalisasi dokumen perencanaan teknis pengadaan sarana pendidikan (alat peraga, media pembelajaran, TIK, dan buku).
 - b. Memastikan kesesuaian spesifikasi sarana dengan hasil pemetaan kebutuhan satuan pendidikan.
 - c. Menyusun dan menyiapkan dokumen pemilihan penyedia pengadaan sarana pendidikan.
 - d. Melakukan review kelengkapan dokumen administrasi pemilihan penyedia sarana.
- 2) Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik
 - a. Melakukan finalisasi perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan (ruang kelas, perpustakaan, sanitasi, dll.).

- b. Memastikan kesesuaian desain teknis, volume pekerjaan, dan RAB prasarana dengan hasil survei lapangan.
- c. Melakukan verifikasi akhir dokumen teknis prasarana pendidikan.
- d. Menyusun dokumen pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi prasarana pendidikan.
- e. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen teknis dan administrasi pemilihan penyedia prasarana.

A.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I, Dinas Pendidikan telah mencapai 50 dari 62 sasaran kinerja yang ditetapkan, atau sekitar 80,65%. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus untuk dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan melakukan evaluasi mendalam terhadap sasaran yang belum tercapai, termasuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, baik dari sisi teknis, anggaran, maupun koordinasi antar unit kerja. Perlu disusun langkah percepatan pencapaian target pada triwulan II dengan mengutamakan sasaran strategis dan berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Dinas Pendidikan juga memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan koordinator wilayah bidang Pendidikan dan satuan pendidikan, serta melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan program yang mengalami kendala. Harapannya, langkah-langkah ini dapat mendorong peningkatan kinerja dan mencapai target yang telah direncanakan secara maksimal.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2026 untuk mendukung Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebesar Rp **347.178.979.798,-**. Adapun Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp **136.552.057.874,-** (39,33% dari total anggaran Tw I).

Pencapaian realisasi anggaran dapat dilihat dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	N/A	N/A	0	347.178.979.798	136.552.057.874	39,33%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	N/A	N/A	0			
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18 Kesetaraan	N/A	N/A	0			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	N/A	N/A	0			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar	N/A	N/A	0			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama	N/A	N/A	0			
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini	N/A	N/A	0			
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar	N/A	N/A	0			
		Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama	N/A	N/A	0			
2	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Indeks Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	N/A	N/A	0			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	N/A	0			
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Pendidikan	N/A	N/A	0	315.915.725.867	115.460.512.684	36,55%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
5	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	75	75	100	18.122.200	17.116.333	94,45%
6	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen SPIP	Persentase Dokumen SPIP sesuai ketentuan	75	75	100	0	0	0,00%
7	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	0	0	0	313.766.871.918	114.461.346.349	36,48%
8	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan	0	0	0	0	0	0,00%
9	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	75	75	100	136.530.000	0	0,00%
10	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	75	75	100	437.575.526	109.562.952	25,04%
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	75	75	100	1.059.348.690	836.429.561	78,96%
12	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Rencana Kebutuhan	75	75	100	367.403.000	0	0,00%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
13	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah sesuai Rencana Pemeliharaan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana pemeliharaan	75	75	100	129.874.533	36.057.489	27,76%
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah(ATS)-Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,8	0,8	100	14.081.123.800	11.626.785.200	82,57%
15	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	0,53	0,53	100			
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersertifikat Pendidik	39,09	39,09	100			
16	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi minimal B	0	0	0			
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang terakreditasi minimal B	0	0	0			
17	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	0	0	0			
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	100	100			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
18	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Laporan Administrasi dan Keuangan Sesuai Ketentuan	70,59	70,59	100	4.652.873.000	4.269.313.000	91,76%
19	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	7,64	7,64	100			
20	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Din	Nilai Iklim Keamanan Pendidikan Anak Usia Dini	69,43	69,43	100			
		Nilai Iklim Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini	68,2	68,2	100			
21	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan	1	1	100	8.854.167.800	7.155.463.064	80,81%
22	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	0	0	0			
23	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,29	2,29	100			
24	Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Masyarakat yang terlayani Pendidikan kesetaraan	29,5	29,5	100			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pondok Pesantren yang Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan	7	7	100			
25	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar Kesetaraan	0	0	0			
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar Kesetaraan	0	0	0			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar Kesetaraan	0	0	0			
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	0	0	0			
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	0	0	0			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama Kesetaraan	0	0	0			
		Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	0	0	0			
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	0	0	0			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Atas Kesetaraan	0	0	0			
26	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditingkatkan kompetensinya	40,22	40,22	100	574.083.000	202.009.136	35,19%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
27	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang ditingkatkan kompetensinya	98,45	98,45	100			
28	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Kualifikasi minimal S1/D4	66,04	66,04	100			
29	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini	0 0	0 0	0 0			
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS)-Sekolah Dasar	3,11	3,11	96,78	9.904.716.501	3.987.306.473	40,26%
31	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	0	0	0			
32	Meningkatnya Kualitas Siswa	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Dasar	0	0	0			
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Dasar	0	0	0			
		Nilai Rerata Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	0	0	0			
33	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	80	80	100			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
34	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi Pendidik	60	82,55	137,6			
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Dasar	0,64	0,64	100			
35	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	0	0	0	9.785.423.001	3.921.036.670	40,07%
36	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar	0	0	0			
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Dasar	0	0	0			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Dasar	0	0	0			
37	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang Pendidikan Dasar yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	1	1	100	42.400.000	39.399.272	92,92%
38	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Dasar	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar	0	0	0			
39	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Literasi Baik	64,18	64,61	100,7			
		Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Numerasi Baik	56,93	60,58	106,4			
		Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar yang berprestasi Akademik dan Non Akademik	0	0	0			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
40	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Nilai Karakter Baik	79,62	75,33	94,61			
41	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	20	20	100	76.893.500	26.870.531	34,95%
42	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	01:01,0	01:01,0	100			
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	01:11,3	01:11,3	100			
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar	0,6	0,6	100			
43	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Dasar	94,5	94,5	100			
44	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Persentase Penurunan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	5,27	5,27	100	5.222.055.630	4.964.171.102	95,06%
45	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B	88,16	85,53	97,02			
46	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik	Nilai Rerata Kemampuan Literasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	0	0	0			
		Nilai Rerata Kemampuan Numerasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	0	0	0			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Nilai Rerata Kemampuan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	0	0	0			
47	Meningkatnya Penerapan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal	100	100	100			
48	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi pendidik	60	71,25	118,75			
		Indeks Pemerataan Guru Sekolah Menengah Pertama	0,84	0,84	100			
49	Meningkatnya Tata Kelola dan Manajemen Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Laporan Administrasi dan Keuangan sesuai ketentuan	100	100	100			
50	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Belajar	Nilai Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	4.996.658.630	4.739.556.911	94,85%
		Nilai Iklim Kebhinekaan Sekolah Menengah Pertama	0	0	0			
		Nilai Iklim Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama	0	0	0			
51	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan Sesuai dengan Kebutuhan	0	0	0			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
52	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan bagi Peserta Didik tidak mampu jenjang Sekolah Menengah Pertama	Persentase Peserta Didik tidak mampu yang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama	38,9	36,5	93,83	84.557.000	84.545.032	99,99%
53	Meningkatnya Kompetensi dan Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Literasi Baik	0	0	0			
		Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Numerasi Baik	0	0	0			
		Persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Berprestasi Akademik dan Non Akademik	0	0	0			
54	Meningkatnya Pengembangan Karakter Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Nilai Karakter Baik	0	0	0	140.840.000	140.069.159	99,45%
55	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama yang meningkat kompetensinya	49	49	100			
56	Meningkatnya Pemenuhan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kepala Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	01:01,0	01:01,0	100			
		Rasio Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	01:07,6	01:07,6	100			

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama	0,8	0,8	100			
57	Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama	96,33	96,33	100,00			
58	Meningkatnya Sarana Prasarana Pendidikan Berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki sarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	0	0	0	2.049.240.000	513.282.415	25,05%
		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki prasarana pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	0	0	0			
59	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	0	0	0	863.820.000	362.246.500	41,94%
		Persentase satuan Pendidikan sekolah dasar yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	0	0	0			
60	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	0	0	0	841.170.000	70.418.000	8,37%

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)	Target Triwulanan	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		Persentase satuan Pendidikan anak usia dini yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	0	0	0			
61	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	0	0	0	35.650.000	16.891.145	47,38%
		Persentase satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	0	0	0			
62	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekola Menengah Pertama dalam Proses Pembelajaran	Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dengan kondisi lengkap dan baik	0	0	0	308.600.000	63.726.770	20,65%
		Persentase satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang memiliki prasarana dengan kondisi lengkap dan baik	0	0	0			

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan I, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja dan keuangan menunjukkan hasil yang belum optimal secara keseluruhan.

Dari target 62 sasaran kinerja, telah terealisasi sebanyak 50 sasaran kinerja atau sebesar 80,65%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik, terutama pada tahapan perencanaan, koordinasi, pemetaan, serta finalisasi dokumen teknis. Namun demikian, masih terdapat 12 sasaran kinerja yang belum terealisasi dan akan menjadi fokus percepatan pada triwulan berikutnya.

Sementara itu, dari aspek keuangan, target anggaran Triwulan I sebesar Rp347.178.979.798, dengan realisasi sebesar Rp136.552.057.874 atau sebesar 39,33%. Capaian ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih relatif rendah dibandingkan target yang direncanakan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh sebagian kegiatan yang masih berada pada tahap persiapan, finalisasi perencanaan teknis, serta proses pengadaan barang dan jasa yang belum seluruhnya selesai pada Triwulan I.

Secara umum, terdapat kesenjangan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan, di mana capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah berjalan, namun belum seluruhnya diikuti dengan realisasi pembayaran sesuai rencana anggaran.

B. Saran-Saran

Untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya, diperlukan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

- a. Percepatan penyelesaian sasaran kinerja yang belum terealisasi, khususnya kegiatan yang masih berada pada tahap perencanaan dan persiapan teknis, agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.
- b. Peningkatan koordinasi antara bidang teknis, perencanaan, dan keuangan, guna memastikan keselarasan antara capaian fisik kegiatan dengan realisasi anggaran.
- c. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk kegiatan sarana dan prasarana yang sudah memasuki tahap finalisasi, sehingga penyerapan anggaran dapat meningkat pada Triwulan II.

- d. Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal dan mengurangi potensi keterlambatan pelaksanaan.
- e. Optimalisasi perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan, agar distribusi penyerapan anggaran lebih merata di setiap triwulan dan tidak terpusat pada akhir tahun anggaran.
- f. Penyempurnaan finalisasi perencanaan teknis lebih awal, sehingga tidak menghambat proses pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian kinerja dan realisasi keuangan pada triwulan berikutnya dapat lebih optimal, seimbang, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara

Hi. Liana Penny, ST.,MS
Pembina Tk. I
NIP. 198007122005012013

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja PD

https://drive.google.com/file/d/1_faDHKUeIXaS7TrWBm81ZYMgWDydMcw/view?usp=drive_link

2. Rencana Aksi

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OA0fu-15OQaQ2pyVJNkrOAEgmvEapW3D/edit?usp=drive_link&oid=108919441170979282411&rtpof=true&sd=true